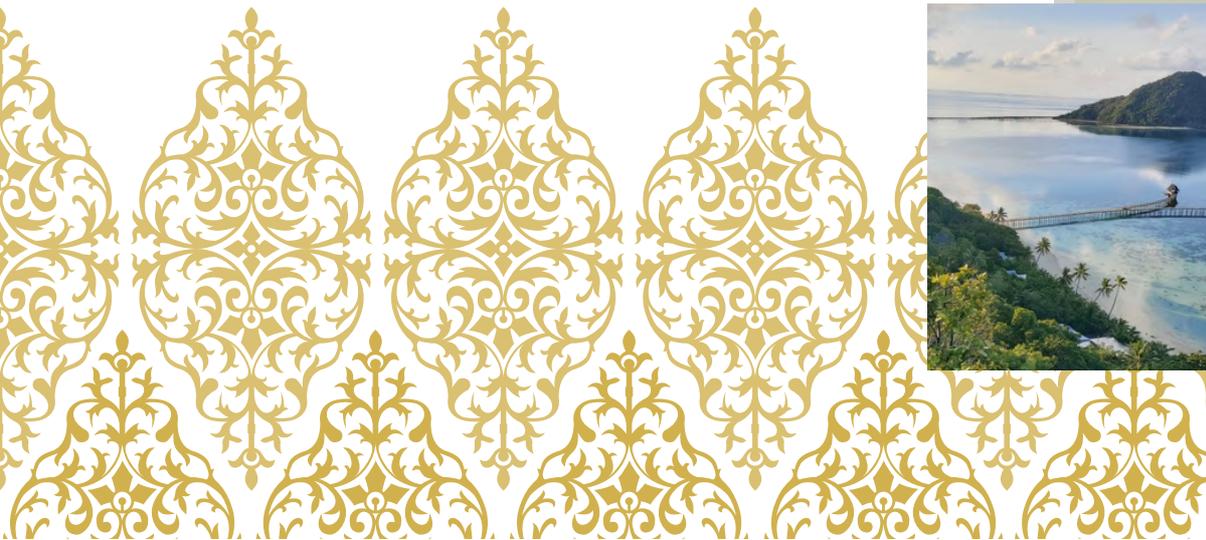




KAJIAN FISKAL REGIONAL



**Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Prov. Kepulauan Riau
Triwulan III Tahun 2023**





Korespondensi

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau

Jalan Sultan Muhammad Syah Dompok
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124
djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Indra Soeparjanto

(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau)

Ketua

Anisah Alfada

(Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Penyunting

Rolly Indra

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A)

Kontributor

Ibrohim Husin

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Maretika Pujilestari

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C)

Lorensia Kristina Br Siregar

(Pelaksana Seksi PPA II A)

Erika Krissanta

(Pelaksana Seksi PPA II B)

M. Rizky Firdaus

(Pelaksana Seksi PPA II C)

Desain

Lorensia Kristinan Br Siregar

(Pelaksana Seksi PPA II A)

Aset Visual

Foto

**Dinas Pariwisata Prov. Kepri
Kanwil DJPb Prov. Kepri**

Ilustrasi/Grafis

**Canva
Kanwil DJPb Prov. Kepri**



KATA PENGANTAR

Segecap puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajian Fiskal Regional merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu *output* pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Indra Soeparjanto

**Kepala Kanwil DJPb
Prov. Kepulauan Riau**

KFR diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan perekonomian daerah dan menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kualitas tata kelola fiskal pusat dan daerah.

Penyusunan kajian ini juga akan meningkatkan sinergi antar *stakeholders* untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Triwulan III Tahun 2023 ini mencakup informasi perkembangan fiskal regional (APBN, APBD dan konsolidasian) dengan analisis tematik Analisis/Reviu Ketimpangan Fiskal Regional (Vertikal dan Horizontal) dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi UU HKPD.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, KPKNL Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Suyono Saputro sebagai *Local Expert* dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, Mata Garuda Kepulauan Riau dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Harapannya kedepan sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporan masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada KFR Triwulan III Tahun 2023 ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami KFR yang disusun dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, November 2023

Selayang Pandang

KEPULAUAN RIAU



Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iv
Selayang Pandang	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiii
<i>Dashboard</i> Makro Ekonomi	xiv
Ringkasan Eksekutif	xv

B A B

Analisis Ekonomi Regional

1

Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi **2**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB	6
Inflasi	7
Ekspor Impor	9

Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan **11**

Tingkat Kemiskinan	11
Tingkat Pengangguran	13
Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	13
Nilai Tukar Petani (NTP)	14
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	16
Indeks Pembangunan Manusia	17

B A B

Analisis Fiskal Regional

2

Analisis Laporan Realisasi APBN **20**

Pendapatan Negara	21
Belanja Negara	26
Surplus/Defisit	31
Analisis Prognosis APBN Regional	31

Analisis Laporan Realisasi APBD **33**

Pendapatan Daerah Konsolidasi	33
Belanja Daerah Konsolidasi	38
Surplus/Defisit	39
Pembiayaan Daerah	40

Analisis Anggaran Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah **43**

Konsolidasi APBN dan APBD	43
Kontribusi Belanja Konsolidasi Pemerintah Terhadap PDRB	44
Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita	41

B A B

Pengembangan Ekonomi Daerah

3

Profil/Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L- DAK Fisik di Tingkat Wilayah	45
Distribusi RO Harmonis di Tingkat Wilayah	46
Kinerja Belanja K/L	56
Progres Sampai Dengan Triwulan III 2023	56
Identifikasi dan Analisis Masalah	56
Kesimpulan dan Rekomendasi	63
Kesimpulan	63
Rekomendasi	64

B A B

Analisis Tematik

4

Analisis Ketimpangan Fiskal Vertikal	67
Analisis Variabel Pembentuk Koefisien Ketimpangan Fiskal	67
Analisis Perkembangan Koefisien Ketimpangan Fiskal Vertikal	68
Analisis Ketimpangan Fiskal Horizontal	71
Analisis Deskriptif Variabel Pembentuk Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil	71
Analisis Perkembangan Hasil Perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil	73
Analisis Peluang dan Tantangan serta Strategi Kebijakan dan Implementasi UU HKPD	75
Analisis Tren Tingkat Transfer ke Daerah (TKD) dan Tingkat Ketimpangan Fiskal dan Horizontal	75
Analisis Kesiapan Daerah dalam Mendukung Upaya Penurunan Ketimpangan Fiskal	84

B A B

Kesimpulan dan Rekomendasi

5

Kesimpulan	87
Rekomendasi	92

DAFTAR TABEL

1.1	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2018-2022 (Metode Lama)	18
1.2	Pagu dan Realisasi Upaya Peningkatan IPM di Kabupaten Lingga Tahun 2022 - 2023	18
2.1	Perkembangan I-Account APBN di Kepri Triwulan II 2022 dan Triwulan III 2023 (Rp Miliar)	20
2.2	Perkembangan Penerimaan Perpajakan di Kepri (yoy)	22
2.3	Perbandingan Tax Ratio Kepri dengan Regional Sumatera dan Nasional	25
2.4	Realisasi Belanja Berdasarkan Sepuluh Fungsi s.d. Triwulan III 2023	28
2.5	Realisasi Belanja Sepuluh K/L Terbesar s.d. Triwulan III 2023	28
2.6	Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 10 K/L Terbesar s.d. Triwulan III 2023	29
2.7	Realisasi PN di Kepri s.d. 30 September 2023	29
2.8	Deviasi Realisasi APBN s.d. Triwulan III 2023 Lingkup Kepri	32
2.9	Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV 2023 Lingkup Kepri	32
2.10	Perkembangan I-Account APBD di Kepri Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2023 (Rp miliar)	33
2.11	Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal	40
2.12	Perkembangan I-Account APBN dan APBD di Kepri Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2023	43
2.13	Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Kepri terhadap PDRB	44
2.14	Rasio Belanja Pemerintah di Kepri per Kapita	44
4.1	Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Wilayah Prov. Kepri Secara Akumulatif	67
4.2	Perkembangan PDRB ADHK Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri	71
4.3	Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kab. Dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri	73
4.4	Perkembangan Indeks Entropi Theil	74
4.5	Tren Perkembangan TKD Tahun 2018-Semester I 2023	75

DAFTAR GRAFIK

1.1	Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kepri Tahun 2022-2023 (triliun)	1
1.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kepri ahun 2018-2023 (<i>yoy</i>)	2
1.3	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2018-2023 (<i>qtq</i>)	2
1.4	Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi di Regional Sumatera (% <i>C-to-C</i>)	2
1.5	PDRB Kepri menurut Pengeluaran	3
1.6	Jumlah Investasi Per Sektor di Kepri Triwulan III Tahun 2023 (Rp miliar)	3
1.7	Jumlah Investasi pada Sektor Tersier di Kepri Triwulan III Tahun 2023 (Rp miliar)	3
1.8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kepri Tahun 2019-2023	4
1.9	PDRB Kepri menurut Lapangan Usaha	5
1.10	Perkembangan Inflasi Kepri dan Nasional (<i>yoy</i>)	6
1.11	Inflasi Regional Sumatera per September 2023 (<i>yoy</i>)	6
1.12	Perkembangan Inflasi Kepri dan Nasional (<i>mtm</i>)	7
1.13	Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (<i>mtm</i>)	8
1.14	Perkembangan Ekspor dan Impor Kepri Tahun 2022-2023 (US\$ Juta)	9
1.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)	11
1.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)	11
1.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kepri Tahun 2020-2023 (persen)	12
1.18	Perkembangan Rasio Gini Kepri Tahun 2019-2022 (ribu jiwa)	13
1.19	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2019-2023	14
1.20	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepri Tahun 2019-2023	15
1.21	Perkembangan IPM Kepri Tahun 2018-2022 (Metode Lama)	17
1.22	Perkembangan IPM Kepri Tahun 2020-2023 (Metode Baru)	17
1.23	Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2022 (Metode Baru)	17
2.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2023	21
2.2	Porsi Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2023	21
2.3	Porsi Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. Triwulan III 2023	22
2.4	Porsi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak s.d. Triwulan III 2023	22
2.5	Penerimaan per Sektor Dominan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 2023 (Rp miliar)	24
2.6	Perbandingan Tax Ratio Nasional, Regional Sumatera, dan Kepri	26
2.7	Porsi Realisasi Belanja Negara s.d. Triwulan iii 2023	26
2.8	Perkembangan Realisasi Belanja Negara Triwulan III 2022 dan 2023 (Rp Miliar)	27
2.9	Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Output Belanja PN di Kepri s.d. Triwulan III 2023	30
2.10	Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan s.d. Triwulan III 2023	34
2.11	Breakdown PAD per Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)	35

DAFTAR GRAFIK

2.12	Pajak Reklame Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (Rp Miliar)	36
2.13	Porsi Belanja APBD di Kepri s.d. Triwulan iii 2023	38
2.14	Penggunaan SiLPA per Kabupaten/Kota (Rp Miliar)	40
2.15	Indeks Kemandirian Fiskal I Tahun 2017 s.d. Tahun 2022	41
2.16	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I Tw III 2023	42
2.17	Indeks Kemandirian Fiskal II Tahun 2017 s.d. Tahun 2022	42
2.18	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II Tw III Tahun 2023	43
3.1	Pagu Total dan Pagu Belanja Terkait RO Harmonisasi (Rp miliar)	45
3.2	Perbandingan Pagu dan Realisasi RO Harmonis - DAK Fisik	46
3.3	Pagu dan Realisasi per Bidang - RO Harmonis	47
3.4	Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik - Jalan	48
3.5	Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik - Pendidikan	49
3.6	Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik -Kesehatan dan KB	50
3.7	Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik - Pertanian	51
3.8	Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemda	51
3.9	Pagu dan Realisasi Belanja terkait RO Harmonis per Pemda	52
3.10	Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Kepri	52
3.11	Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Bintan	53
3.12	Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Batam	54
3.13	Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Tanjungpinang	54
3.14	Pagu dan Realisasi Belanja Terkait RO Harmonisasi per Kementerian Lembaga	55
3.15	Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Jalan	56
3.16	Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Pendidikan	57
3.17	Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Kesehatan dan KB	58
3.18	Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Pertanian	59
3.19	Sebaran Kendala per Kategori	60
3.20	Sebaran Kendala per Kategori - Jalan	61
3.21	Sebaran Kendala per Kategori - Kesehatan dan KB	61
3.22	Sebaran Kendala per Kategori -Pendidikan	62
3.23	Sebaran Kendala per Kategori - Pertanian	62
4.1	Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Wilayah Prov. Kepri Secara Akumulatif	67
4.2	Hasil Perhitungan CVI 1 Pemda Lingkup Wilayah Prov. Kepri Tahun 2018-2023	69

DAFTAR GRAFIK

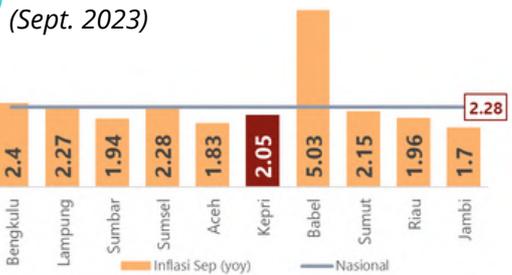
4.3	Hasil Perhitungan CVI 2 Pemda Lingkup Wilayah Prov. Kepri Tahun 2018-2023	70
4.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri	72
4.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri	72
4.6	Hasil Perhitungan Indeks <i>Williamson</i> Pemda Lingkup Prov. Kepri Tahun 2018-2023	73
4.7	Pengaruh DBH Terhadap CVI 1	75
4.8	Hubungan Realisasi DBH dengan CVI 2	76
4.9	Hubungan Realisasi DAU dengan CVI 1	77
4.10	Hubungan Realisasi DAU dengan CVI 2	77
4.11	Hubungan Realisasi DAK dengan CVI 1	78
4.12	Pengaruh DAK Terhadap CVI 2	79
4.13	<i>Share</i> Dana Transfer ke Daerah dan Pendapatan Terhadap CVI 1 dan CVI 2	80
4.14	<i>Share</i> DBH per Total Pendapatan terhadap CVI 1 dan CVI 2	80
4.15	<i>Share</i> DAU per Total Pendapatan Terhadap CVI 1 dan CVI 2	81
4.16	Grafik Pengaruh DAK per Total Pendapatan terhadap CVI 1 dan CVI 2	82
4.17	Pengaruh DAU Terhadap Indeks <i>Entropi Theil</i>	82
4.18	Hubungan Realisasi DBH dengan Indeks <i>Entropi Theil</i>	83
4.19	Pengaruh DAK Terhadap Indeks <i>Entropi Theil</i>	84

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

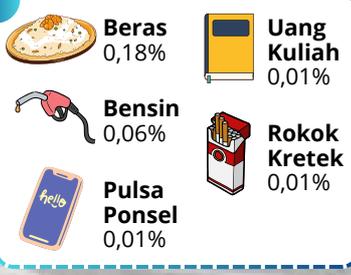
sampai dengan Triwulan III Tahun 2023



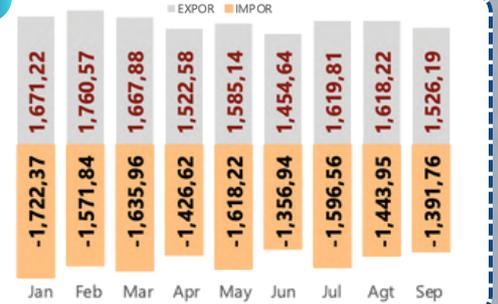
Inflasi Regional (Sept. 2023)



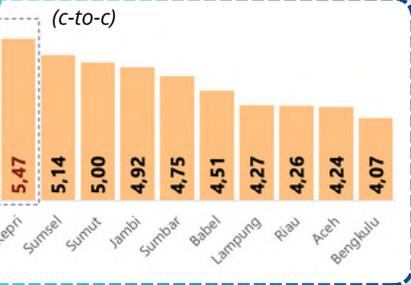
Andil Inflasi



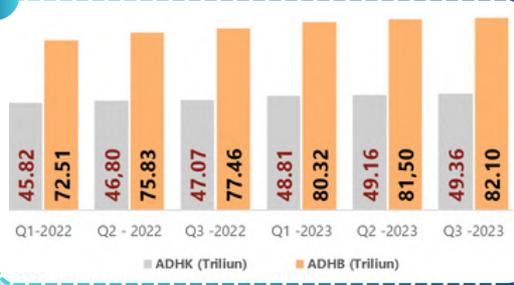
Perkembangan Ekspor-Import



Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c)



Perkembangan PDRB



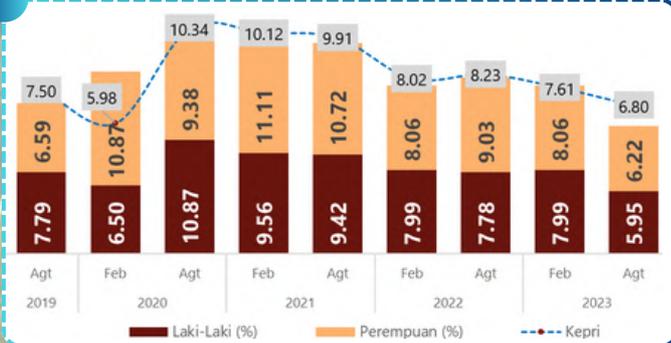
Kondisi makro ekonomi sampai dengan Triwulan III 2023 makin membaik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan inflasi, serta inflasi Kepri yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.

Perkembangan Indikator Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan III Tahun 2023



Tingkat Pengangguran Terbuka



Kemiskinan Penduduk



Kondisi kesejahteraan Kepulauan Riau membaik ditandai dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia, kenaikan nilai tukar petani, dan peningkatan nilai tukar nelayan.

Perkembangan Indikator Fiskal Provinsi Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

APBN

Pendapatan Negara



terdiri atas



Belanja Negara



terdiri atas

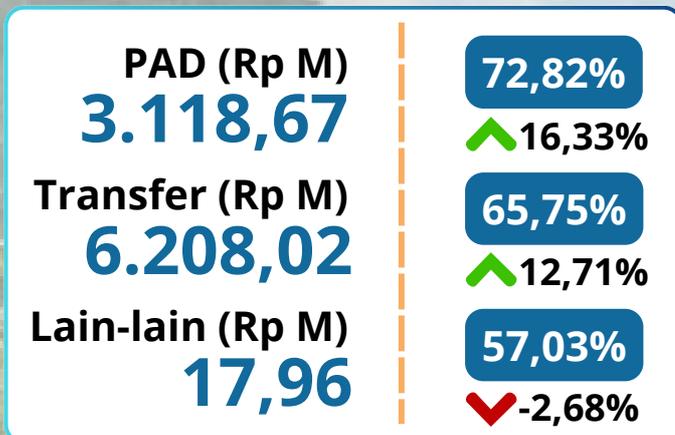


APBD

Pendapatan Daerah



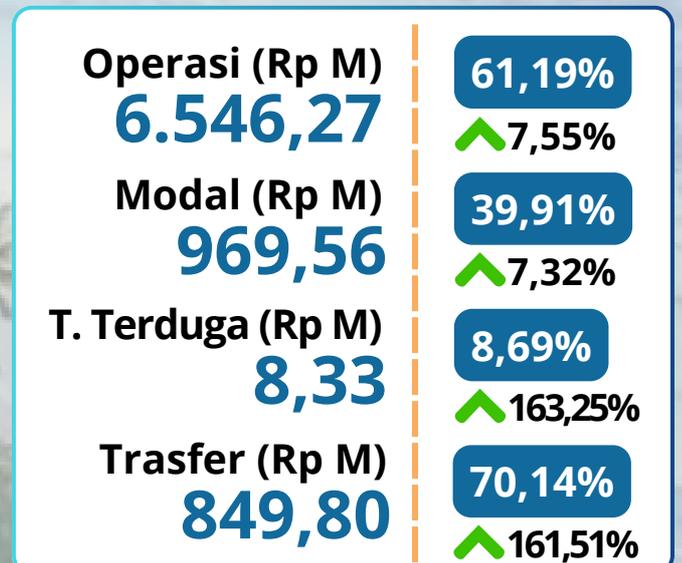
terdiri atas



Belanja Daerah

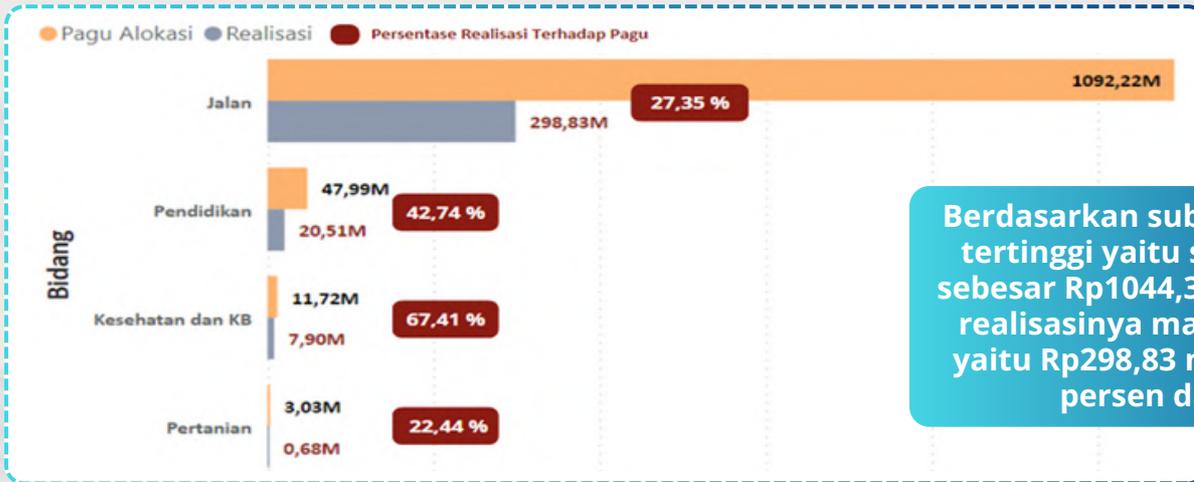


terdiri atas



Kinerja fiskal regional tumbuh membaik ditandai dengan pertumbuhan realisasi Belanja APBN, Pendapatan APBD, dan Belanja APBD. Pendapatan APBN tetap terjaga di atas 75 persen.

Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik



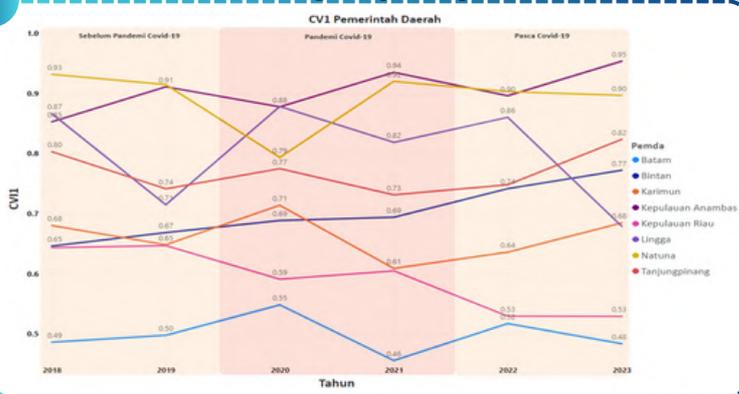
Berdasarkan subbidang, Pagu RO tertinggi yaitu subbidang Jalan sebesar Rp1044,33 miliar. Namun, realisasinya masih sangat kecil yaitu Rp298,83 miliar atau 27,35 persen dari Pagu.

Kendala Utama Kecilnya Realisasi Belanja

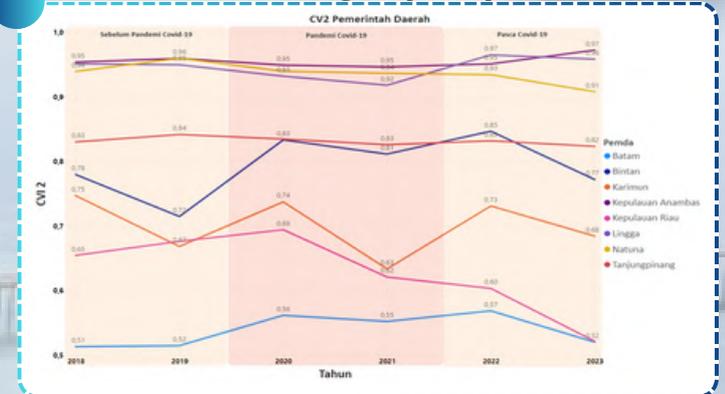


Ketimpangan Fiskal Vertikal

CVI 1 Pemda Lingkup Kepri 2018-2023

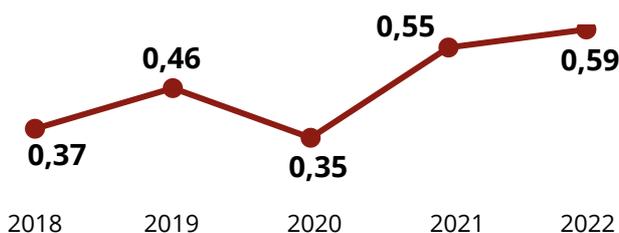


CVI 2 Pemda Lingkup Kepri 2018-2023

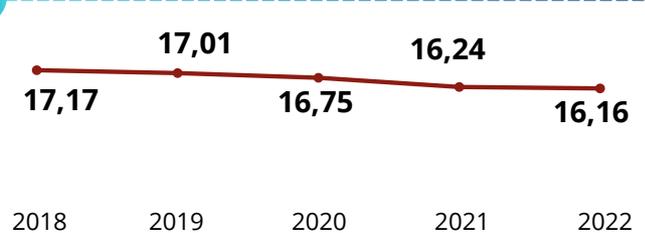


Ketimpangan Fiskal Horizontal

Indeks Williamson Kepri



Indeks Entropi Theil Kepri



Hasil dari CVI 1 dan CVI 2 menunjukkan hampir seluruh Kab/Kota memiliki tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang tinggi, kecuali Kota Batam yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang mencapai proporsi 50 persen dari total Pendapatan Daerahnya. Sedangkan dari sisi ketimpangan fiskal horizontal menunjukkan nilai Indeks Williamson yang fluktuatif namun tren menurun terjadi pada Indeks Entropi Theil Kepri dari tahun 2018-2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikator Makro Ekonomi

Perekonomian Kepri triwulan III 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp82,10 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,36 triliun. Kemudian, sejalan dengan perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 4,94 persen (*yoy*), perekonomian Kepri juga tumbuh sebesar 4,88 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut cenderung melambat, seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian global tahun 2023 diproyeksikan melambat dari tahun 2022. Angka tersebut juga tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 6,03 persen (*yoy*).

Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2023 lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Sumatera yakni sebesar 4,50 persen (*yoy*) dan PDRB Kepri berada pada urutan keempat dari struktur perekonomian Sumatera dengan *share* sebesar 5,08 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian terbaik Kepri sampai dengan triwulan III 2023 dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,47 persen (*ctc*) yang menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Regional Sumatera.

Berdasarkan pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Regional Kepri, yaitu Rp37.385,02 miliar (45,54 persen). PMTB juga mengalami pertumbuhan *year on year* sebesar 10,12 persen (*yoy*). Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di Kepri secara *year on year* di triwulan III 2023.

Berdasarkan lapangan usaha, terdapat 3 sektor yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian di Kepri, yaitu Industri Pengolahan Rp19.766,51 miliar (39,44 persen), Konstruksi Rp9.863,89 miliar (20,83 persen), dan Pertambangan dan Penggalian Rp5.701,74 miliar (11,64 persen).

Tekanan inflasi bulan September 2023 dari gabungan 2 kota di Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) tercatat sebesar 2,05 persen (*yoy*) dan 0,16 persen (*mtm*) dengan IHK sebesar 114,66 (*yoy*). Tekanan inflasi ini lebih rendah 6,79 persen (*yoy*) dan juga lebih rendah dibandingkan tingkat Inflasi Nasional sebesar 2,28 persen (*yoy*). Inflasi di Kepri bulan September 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas beras 0,18 persen, bensin 0,06 persen, Biaya Pulsa Ponsel 0,01 persen, Uang Kuliah Akademi 0,01 persen, dan Rokok Kretek Filter sebesar 0,01 persen.

Neraca perdagangan luar negeri Kepri pada bulan September tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US\$134,43 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan September sebesar US\$1.526,19 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan September sebesar US\$1.391,76 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 41,26 persen (*yoy*).

Angka kemiskinan di Kepri pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya. Secara *year on year*, Jumlah Penduduk Miskin di Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen poin, menurun ±9,18 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kepri.

TPT Kepri bulan Agustus 2023 mencapai angka 6,80 persen atau turun 1,43 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022 (*yoy*). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Agustus 2023 TPT lebih didominasi oleh Perempuan dengan nilai TPT 6,22 persen poin dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

kemudian nilai TPT Laki-Laki sebesar 5,95 persen poin. Kepri menjadi Provinsi ke-2 dengan tingkat penurunan TPT tertinggi secara Nasional yang menunjukkan sinyal positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Kepri.

Tumbuhnya seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di Kepri, terutama PMTB yang tumbuh sebesar 10,12 persen (yoy) khususnya pada sektor industri pengolahan turut meningkatkan perluasan lapangan kerja baru. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kesanggupan pihak swasta akan tenaga kerja dan berkontribusi atas penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kepri.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepri yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,388 Meningkat 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran melebar pada periode Maret 2023. Namun, bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Rasio Gini tercatat menurun sebesar 0,002 point (yoy).

NTP Kepri pada September 2023 sebesar 104,26 dan menunjukkan adanya pertumbuhan negatif sebesar 0,45 persen (yoy). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (113,46). hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian. Nilai tersebut telah melebihi target NTP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,91 persen.

NTN Kepri bulan September 2023 sebesar 109,22. Angka NTN tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,38 persen (yoy) dan berada di atas angka NTN Nasional (105,64). Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis Kepri yang merupakan Kepulauan dan memiliki keanekaragaman biota laut yang menjadi salah satu keunggulan daerah. Namun demikian, Capaian tersebut masih berada di bawah sasaran NTN pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 115,5.

Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi". Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka IPM Kepri pada tahun 2023 sebesar 79,08 atau tumbuh sebesar 0,76 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan tingkat IPM tertinggi ketiga Nasional dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

Analisis Fiskal Regional

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp8.072,72 miliar (75,72 persen dari Target) dengan pertumbuhan sebesar minus 6,66 persen (yoy). Namun bila mengesampingkan pajak yang diperoleh karenan kebijakan PPS pada tahun 2022, maka kinerja Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan yang positif. Pendapatan tersebut hanya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan sebesar 84,20 persen (Rp4.933 miliar) dan PNPB sebesar 15,80 persen (Rp925 miliar).

Dari sisi Penerimaan Perpajakan, pos Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi (151,84 persen), kemudian diikuti oleh Cukai (120,77 persen) dan PPN (24,92 persen), sedangkan untuk pos lainnya mengalami pertumbuhan kontraktif yaitu PPh (minus 4,53 persen), bea masuk (minus 16,80 persen), PBB (minus 51,98 persen), dan bea keluar (minus 81,16 persen).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari sisi PNBPN, pos PNBPN Lainnya telah melampaui target dengan pertumbuhan sebesar 14,44 persen (*yoy*) dan Pendapatan BLU juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,89 persen (*yoy*).

Dari sisi sektoral, sektor penyumbang perpajakan terbesar berturut-turut adalah Industri Pengolahan sebesar 43,04 persen (Rp3.063,40 miliar), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,74 persen (Rp978,21 miliar), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,63 persen (Rp542,77 miliar).

Tax ratio Kepri s.d. triwulan III sebesar 3,22 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan *tax ratio* regional Sumatera sebesar 3,16 persen.

Belanja Negara dapat direalisasikan sebesar Rp10.958,03 miliar atau 66,63 persen dari Pagu, terbagi atas TKD dan BPP. Realisasi BPP sebesar Rp5.130,29 miliar (60,42 persen) disumbang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.508,69 miliar (71,15 persen), Belanja Barang sebesar Rp2.500,19 miliar (65,96 persen), Belanja Modal sebesar Rp1.000,59 miliar (42,96 persen), Bantuan Sosial sebesar Rp2,93 miliar (63,77 persen), dan Belanja Lainnya sebesar Rp117,89 miliar (2,30 persen). Adapun realisasi TKD sebesar Rp5.827,74 miliar (73,27 persen), disumbang oleh DBH sebesar Rp839,88 miliar (68,16 persen), DAU sebesar Rp3.420,65 miliar (76,44 persen), DAK sebesar Rp1.329,19 miliar (67,60 persen), DID sebesar Rp52,75 miliar (83,55 persen), dan Dana Desa sebesar Rp185,27 miliar (85,07 persen).

Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 16,19 persen (*yoy*) sejalan dengan pertumbuhan realisasi BPP sebesar 39,38 persen (*yoy*) dan TKD sebesar 1,34 persen (*yoy*). Seluruh pos BPP tumbuh positif (*yoy*), menunjukkan perbaikan kinerja penyerapan belanja APBN tingkat regional.

Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp9.344,65 miliar atau 67,93 persen dari Pagu dan mengalami peningkatan 13,85 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp6.208,02 miliar (66,43 persen) dibandingkan PAD sebesar Rp3.118,67 miliar (33,37 persen).

Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD dengan realisasi sebesar Rp2,60 triliun, atau 75,96 persen dari Target. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp370,92 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp357,96 miliar, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp329 miliar.

Belanja Daerah Konsolidasi dapat direalisasikan sebesar Rp8.373,97 miliar atau 58,02 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 14,42 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 7,55 persen, Belanja Modal sebesar 7,32 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 163,25 persen, dan Transfer sebesar 161,51 persen.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Sektor konstruksi di Kepri memiliki pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023, dengan menjadi kontributor terbesar kedua, dan memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga (*yoy*). Berdasarkan ASI, realisasi pengadaan semen triwulan III 2023 meningkat 17,94 persen (*yoy*). Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya proyek pembangunan jalan di Kepri, dimana terdapat 5 kegiatan prioritas nasional dan 17 kegiatan prioritas BP Batam. Pembangunan jalan di Kepri dilaksanakan oleh Balai PJN, dengan Pagu terkait RO harmonis sebesar Rp1.076,91 miliar. Dukungan fiskal terlihat memberikan dorongan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi di Kepri, salah satunya melalui proyek pembangunan jalan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah Kepulauan Riau memiliki pagu terbesar dalam RO Harmonis, dengan Pagu sebesar Rp1.044,33 miliar pada subbidang jalan. Namun Pagu yang besar tersebut belum dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu sebesar Rp284,96 miliar (27,29 persen dari Pagu). Beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, dan pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Kementerian PUPR memiliki Pagu terbesar, yaitu Rp1.107,03 miliar (95,85 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Namun realisasi yang dicapai masih terbilang kecil, yaitu sebesar Rp304,44 miliar (27,50 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Kementerian Pertanian memiliki persentase realisasi terkecil, dengan Pagu sebesar Rp3,02 miliar (0,26 persen dari total Pagu), realisasi anggaran sebesar Rp0,68 miliar (22,44 persen dari Pagu). Kendala yang teridentifikasi, yaitu realisasi output tidak dapat mencapai target, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan, dan terbatasnya jumlah SDM.

Kemendikbud Ristek memiliki Pagu sebesar Rp32,90 miliar (2,85 persen dari Pagu), yang telah direalisasikan sebesar Rp14,90 miliar (44,83 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, pengesahan DIPA bulan Oktober, permasalahan dengan pihak ketiga, lokasi kegiatan di daerah terluar, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, menunggu juknis lebih lanjut, adanya pergantian bendahara, mutasi dan promosi pejabat PPK, ketersediaan SDM yang kurang.

Kementerian Kesehatan dengan pagu sebesar Rp4,95 miliar (0,43 persen dari total Pagu), telah direalisasikan Rp2,59 miliar (52,32 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang ditemui, yaitu perubahan jadwal kegiatan sebagai akibat dari adanya revisi POK, terdapat kesalahan input capaian *output*, dan terbatasnya jumlah SDM.

Pagu Belanja terkait RO Harmonis yang terdapat pada BKKBN adalah sebesar Rp6,77 miliar, telah direalisasikan Rp5,31 miliar (78,43 persen dari Pagu). Salah satu kegiatan RO Harmonis adalah kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang direncanakan akan dilaksanakan minggu keempat November. Kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional, pelaksanaan di akhir tahun dinilai akan kurang memberikan dampak terhadap penurunan *stunting*. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada di akhir tahun lebih berisiko gagal dilaksanakan, misalnya adanya kebijakan pemotongan anggaran.

Analisis Tematik

Pendapatan Daerah menunjukkan tren peningkatan dari setiap tahun walaupun sempat terjadi pelemahan di tahun 2020 seiring dengan penurunan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Belanja Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dengan penurunan jumlah di tahun 2020 dan 2021 serta realisasinya masih rendah. SILPA menunjukkan tren peningkatan meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2020.

PDRB ADHK 2010 untuk seluruh wilayah Provinsi Kepri bergerak tumbuh positif kecuali Kab. Natuna dan Kepulauan Anambas yang belum dapat kembali pada kondisi pra COVID-19.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi juga telah bertumbuh positif dan kembali ke kinerja pra COVID-19. Terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2018-2023 dengan pengurangan jumlah penduduk terbesar pada Kota Batam.

Dana Transfer ke Daerah Pemda wilayah Prov. Kepri memiliki tren yang fluktuatif, namun hampir seluruh kabupaten dan kota mengalami peningkatan dana transfer pada tahun 2019 kecuali Kab. Karimun. Terjadi peningkatan dana transfer yang cukup signifikan bagi Kab. Natuna dan Kepulauan Anambas pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, hampir seluruh kabupaten dan kota lingkup Prov. Kepri memiliki tingkat ketimpangan fiskal yang tinggi kecuali Kota Batam.

Terdapat hubungan yang negatif antara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 dan CVI 2. Semakin besar realisasi DBH, DAU dan DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 dan CVI 2.

Semakin tinggi persentase DBH/DAU/DAK dibagi Pendapatan, maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, seiring dengan besarnya jumlah DBH/DAU/DAK yang diterima Pemerintah Daerah, harus diimbangi dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketimpangan fiskal vertikal tidak semakin tinggi.

Terdapat hubungan yang negatif antara realisasi DAU/DAK dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Maka dari itu, semakin besar realisasi DAU/DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin kecil.

Terdapat hubungan positif yang relatif kecil antara besar realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Dengan demikian, semakin besar realisasi DBH, maka semakin besar indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin besar.

Pemerintah Prov. Kepri adalah satu-satunya Pemda lingkup Prov. Kepri yang telah melakukan Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di antaranya pembangunan *fly over* dan jalan lingkaran pesisir. Belum terdapat Pemda di wilayah Prov. Kepri yang telah mengimplementasikan Dana Abadi Daerah dan sinergi pendanaan non APBD.

Rekomendasi

Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pusat khususnya Belanja Modal masih sangat rendah, diharapkan seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk menyusun strategi agar dapat mengantisipasi gagal kontrak dan keterlambatan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal;

1. Terhadap RO harmonis, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Kementerian PUPR memberikan penambahan pagu anggaran belanja barang pada satker Balai PJN di triwulan III 2023. Hal ini menyulitkan Balai PJN untuk melakukan eksekusi kegiatan atas penambahan Pagu tersebut. Kementerian PUPR perlu melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran, mengingat kondisi geografis Kepri merupakan wilayah kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada daerah terluar menjadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

- sulit dilaksanakan. Kementerian PUPR perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun dengan kondisi-kondisi tersebut.
- b. Balai PJJN Kepri yang mendapat tambahan anggaran di triwulan III 2023 perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline pekerjaan. Kedepannya perlu melakukan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah kepulauan, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang. Terkait permasalahan keterbatasan ketersediaan SDM, Balai PJJN perlu mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi atau alat yang lebih efisien, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif.
 - c. Beberapa anggaran belum dapat direalisasikan karena terdapat 1) blokir anggaran dan 2) belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Blokir anggaran terjadi pada satker BGP dan BPMP Kepri. Satker tersebut perlu mempercepat penyelesaian blokir anggaran dengan proaktif berkoordinasi ke tingkat wilayah hingga Eselon I, dan KPPN. Terkait kegiatan yang menunggu petunjuk teknis, satker dapat melakukan persiapan pada aspek-aspek tertentu yang dapat dilakukan tanpa petunjuk teknis.
 - d. Perwakilan BKKBN Kepri merencanakan kegiatan percepatan penurunan stunting pada minggu ke-4 Bulan November yang berakibat realisasi anggaran dan dampak (*outcome*) kegiatan tersebut menjadi terlambat. Kegiatan tersebut penting untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, agar *output* dan *outcome* atas kegiatan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebaiknya kegiatan tersebut direncanakan ke dalam kegiatan prioritas untuk dilaksanakan di awal tahun anggaran.
2. UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemda untuk melakukan perluasan skema pembiayaan daerah melalui pembiayaan utang daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan sinergi pendanaan APBD dan non APBD. Namun demikian, peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU HKPD untuk pelaksanaan perluasan skema pembiayaan daerah, belum ditetapkan. Pemerintah pusat perlu melakukan percepatan penetapan PP tersebut agar pemda dapat melaksanakan perluasan skema pembiayaan daerah.
 3. Untuk mengatasi ketimpangan vertikal di daerah, pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah, melalui analisis kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah

Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.

Dalam menurunkan TPT di Kepri, Pemda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun SMK dan Politeknik dengan jurusan/bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan industri di Kepri, karena saat ini belum ada sekolah/politeknik yang dapat memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri di Kepri. Pemda juga dapat memetakan kebutuhan SDM pada industri unggulan Kepri dan bekerja sama dengan

RINGKASAN EKSEKUTIF

melaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK), serta berkoordinasi dengan universitas/politeknik di daerah untuk menyediakan kurikulum dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM di lingkup Kepri.

Realisasi TKD masih sangat rendah khususnya DAK Fisik sebesar 51,80 persen dan DBH sebesar 68,16 persen, sehingga diharapkan peran pemerintah daerah untuk melengkapi syarat-syarat atau dokumen penyaluran dan mempercepat penyerapan TKD;

Pemda perlu memetakan, mengevaluasi, dan melakukan upaya percepatan pengumpulan pendapatan terhadap jenis Pendapatan dengan realisasi yang belum mencapai 75 persen dari Target dan Pendapatan dengan pertumbuhan negatif dibandingkan realisasi yoy.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar minus 2,96 persen. Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong dan mengevaluasi kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.

Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.

Dinas Kesehatan Kepri sebagai satker dekonsentrasi perlu memperbaiki proses penganggaran, serta membangun koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan, sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran. Peningkatan kapasitas SDM juga dapat menjadi solusi, dengan memberikan pelatihan terkait proses penganggaran yang tepat dan optimal. Pelatihan lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efisien dan mengatasi masalah ketersediaan SDM.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri sebagai satker dekonsentrasi perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan pemberian vaksin hewan dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya vaksin bagi hewan ternak. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi bagaimana proses sertifikasi benih pada dapat berjalan dengan lebih efisien, melalui penyiapan benih padi yang unggul, persiapan dokumen sertifikasi, mengikuti alur dan prosedur yang tepat dan bekerjasama dengan pihak sertifikasi Kementerian Pertanian, sehingga alur sertifikasi benih padi dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mengatasi keterbatasan SDM

Pemda juga perlu melakukan upaya peningkatan PAD untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal vertikal tersebut, yaitu:

- a. Dengan cara meningkatkan basis data perpajakan daerah, ekstensifikasi pajak, mengembangkan aplikasi dan sistem yang mendukung kemudahan pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

- b. Pemda dapat melakukan *mapping* potensi investasi dan pengembangan sektor perekonomian potensial daerah serta membentuk tim *taskforce* peningkatan PAD lintas sektor untuk dapat meningkatkan PAD

Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PDRB per kapita untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal horizontal, yaitu Pemda melakukan analisis sektor ekonomi dan investasi potensial untuk pengembangan daerah dan peningkatan lapangan pekerjaan.

Pemda dapat mulai melakukan opsi pembiayaan seperti pinjaman daerah, serta penerbitan sukuk dan obligasi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal serta memastikan kemampuan daerah untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan kemampuan untuk membayar investor bagi sukuk dan obligasi daerah.

Pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial daerah dan wilayah yang dapat dikembangkan. Contohnya, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Natuna terdapat potensi pariwisata, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan *master plan* untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar wilayah potensi pariwisata untuk dapat dibiayai dengan sinergi beberapa alternatif pendanaan, misalnya pembiayaan proyek tersebut dibagi pembiayaannya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Belanja Kementerian/Lembaga serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta. Pemda dapat berupaya juga untuk meningkatkan potensi investasi di daerah.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil Human Capital Gap dan Infrastructure Gap yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.

Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah Free Trade Zone (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalkan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di Kepri.

Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berada di Kepri.

Kanwil DJPb Prov Kepri

Pada tahun 2023, terdapat tiga BLU baru di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kanwil DJPb Kepri dapat secara berkala melakukan FGD Raperda PDRD dengan mengundang unit eselon 1 Kementerian Keuangan lain dan Bapenda seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk saling bertukar informasi dan memperoleh progress penyusunan serta kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Forum tersebut diharapkan akan memacu seluruh pemda untuk dapat mengakselerasi penyelesaian Raperda PDRD yang selaras dengan UU HKPD dan kebijakan fiskal nasional.

Kantor Wilayah DJPb Kepri hendaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah, progres kontrak atau proyek yang dibiayai dengan Dana Transfer, capaian output atas penggunaan Dana Transfer serta mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah.

Kantor Wilayah DJPb Kepri dapat melakukan sosialisasi kepada pimpinan daerah, Pemda, serta stakeholder lain terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan senantiasa mendorong Pemda untuk melakukan sinergi pendanaan kreatif yang sustain.

KPPN Tanjungpinang perlu melakukan pengawalan anggaran mulai dari proses perencanaan DIPA, terbitnya DIPA dan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja Balai PJN yang terbit pada semester II. Kemudian memastikan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline kegiatan.

KPPN Tanjung pinang juga perlu senantiasa mengingatkan satuan kerja BGP dan BPMP agar segera menyelesaikan blokir anggaran, dengan mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif berkoordinasi hingga ke unit eselon I.

KPPN Batam perlu memberikan arahan kepada satuan kerja Perwakilan BKKBN Kepri agar dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan *output* dan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tanah melayu tradisi berpantun
Kepulauan Riau, negeri kaya adat
KFR Triwulan III Tahun 2023 telah disusun
Semoga pembaca beroleh manfaat

BAB I



Masjid Agung Baitul Ma'mur
Kab. Kep. Anambas

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Kondisi makro ekonomi sampai dengan Triwulan III 2023 makin membaik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan inflasi, serta inflasi Kepri yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.





Analisis Ekonomi Regional

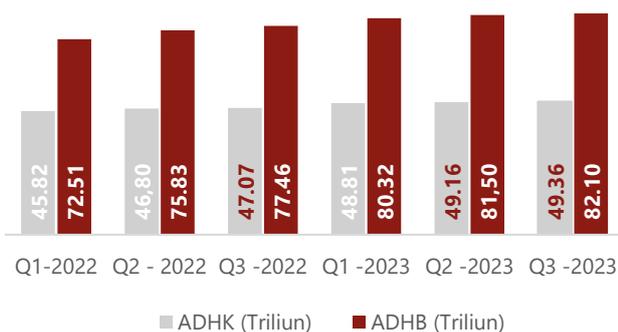
1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan triwulan III 2023 sedang dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian global yang terus meningkat. Secara tidak langsung tantangan dan lingkungan perekonomian global yang melemah memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian Nasional maupun Regional Kepri. Beberapa risiko yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Nasional diantaranya: (1) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (2) Volatilitas harga komoditas; (3) Eskalasi tensi global (Perang di Palestina); (4) *Geoeconomic Fragmentation*; dan (5) *Shock* akibat perubahan iklim (Badai *El Nino*). Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menyebabkan adanya tren perlambatan ekonomi global yang turut berdampak terhadap sektor riil di Indonesia. Demikian pula dengan Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya ditulis Kepri) yang turut terdampak atas melemahnya perekonomian global.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai yang dijadikan sebagai ukuran dalam mengukur kinerja perekonomian pada suatu region/wilayah tertentu. Perekonomian Kepri triwulan III 2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp82,10 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,36 triliun.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kepri Tahun 2022-2023 (triliun)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pada triwulan III 2023, sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 4,94 persen (*yoy*), perekonomian Kepri juga tumbuh sebesar 4,88 persen (*yoy*). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, perekonomian Kepri juga tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 6,03 persen (*yoy*). Kemudian, bila dibandingkan dengan triwulan II 2023, perekonomian Kepri pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen (*qtq*).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kepri disebabkan oleh beberapa fenomena diantara akibat adanya dampak badai *El Nino* yang terjadi di Indonesia pada awal semester II 2023 hingga Oktober 2023. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan angin yang cenderung masih menguat, karena adanya peralihan angin dari selatan ke utara. Hal tersebut berdampak buruk terhadap hasil produksi pertanian.

Kemudian, di triwulan III 2023 juga terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut dibanding dengan triwulan II 2023, yang dikarenakan pada triwulan II 2023 terdapat arus mudik lebaran Idul Fitri dan libur semester anak-anak sekolah tepatnya pada bulan Juni. Keseluruhan fenomena tersebut akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang di triwulan III 2023, baik secara *qtq* maupun secara *yoy*.

Grafik 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2018-2023 (*yoy*)

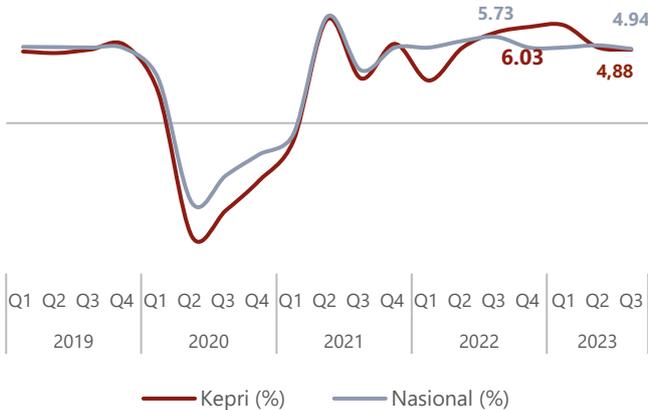
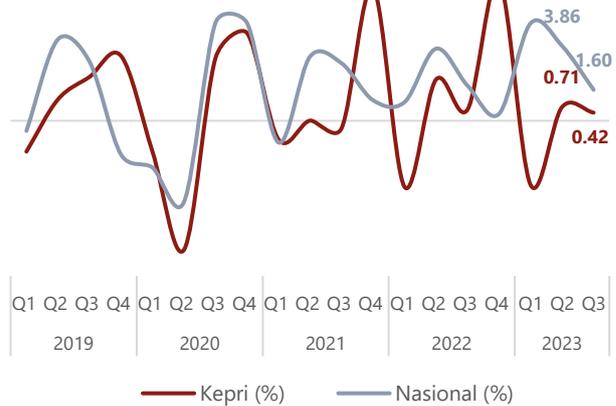


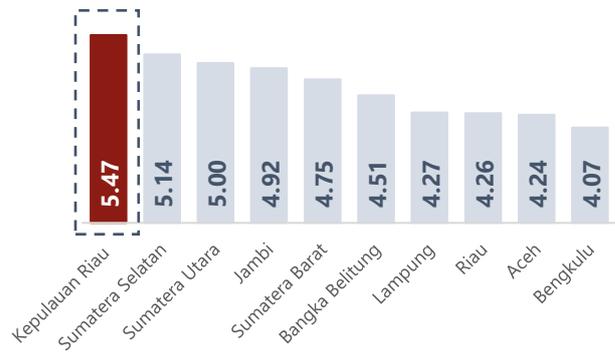
Figure 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2018-2023 (*qtq*)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Secara spasial, Pertumbuhan Ekonomi wilayah Sumatera triwulan III 2023 sebesar 4,50 persen (*yoy*) tumbuh lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 4,94 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 4,88 persen (*yoy*) berada pada urutan keempat dengan *share* distribusi PDRB sebesar 7,17 persen dan pertumbuhan tertinggi dimiliki Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,08 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian terbaik Kepri sampai dengan triwulan III 2023 dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,47 persen (*ctc*) yang menjadi provinsi dengan **pertumbuhan terbesar di Regional Sumatera.**

Grafik 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi di Regional Sumatera (%C-to-C)



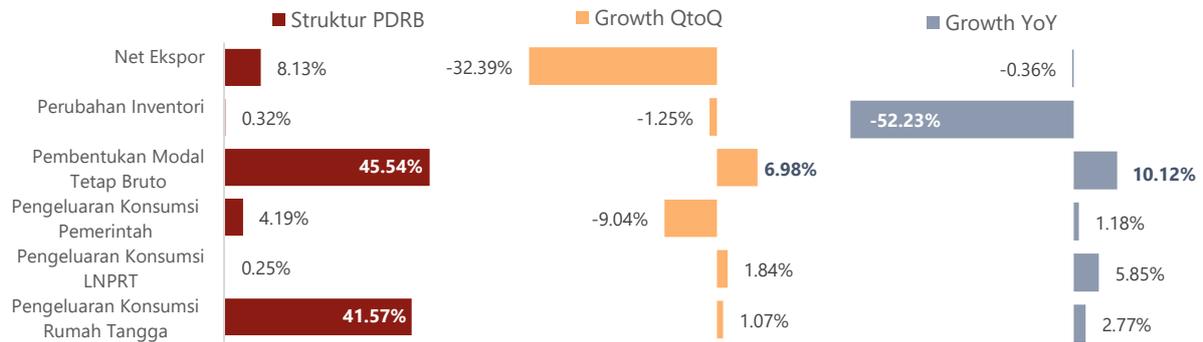
Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi di Kepri tergambar dalam komponen-komponen yang menyokong pertumbuhan PDRB, baik dari sektor lapangan usaha maupun sektor pengeluaran.



PDRB menurut Pengeluaran

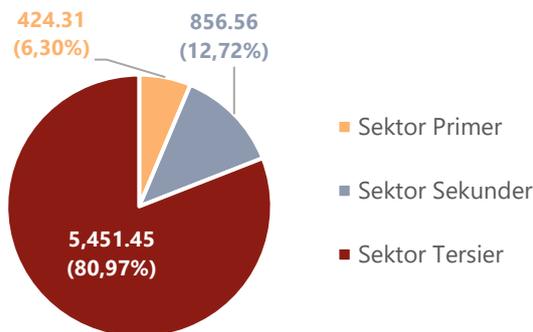
Grafik 1.5 PDRB Kepri menurut Pengeluaran



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.5, pertumbuhan PDRB di Kepri bila dilihat dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dengan andil PDRB sebesar Rp37.385,02 miliar (45,54 persen) dan tumbuh 10,23 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di Kepri secara *year on year* di triwulan III 2023. Investasi Kepri berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terealisasi sebesar Rp3.308,65 miliar atau tumbuh 288,89 persen dibandingkan tahun 2022 (yoy).

Grafik 1.6 Jumlah Investasi Per Sektor di Kepri Triwulan III Tahun 2023 (Rp miliar)



Sumber: NSWI BKPM, 2023 (diolah)

Grafik 1.7 Jumlah Investasi pada Sektor Tersier di Kepri Triwulan III Tahun 2023 (Rp miliar)



Data BKPM yang tertera dalam Grafik 1.6 dan Grafik 1.7 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah realisasi investasi tersebut didominasi oleh Sektor Tersier (80,97 persen), dan **subsektor yang paling berkontribusi yaitu Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran** dengan nilai investasi Rp1.237,06 miliar (22,69 persen). Lebih lanjut, ada pula investasi pada **sub sektor Listrik, Gas, dan Air** (22,23) yang didukung dengan adanya rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura juga semakin maju setelah ditandatanganinya *MoU* oleh Menteri ESDM dengan *Second Minister for Trade and Industri Singapore* di bulan September 2023 yang meliputi Kerjasama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas Indonesia-Singapura. Kemudian, juga terdapat proyek investasi listrik yang dikembangkan di Kepri dengan dibangunnya pabrik panel surya oleh *Xiny Group*, salah satu perusahaan terkemuka dalam industri kaca dan solar panel.

Kemudian, realisasi investasi sektor tersier disusul oleh subsektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp438,61 miliar (15,99 persen), dan subsektor Hotel dan Restoran Rp433,68 miliar (15,81 persen). Investasi tersebut juga diikuti dengan adanya pertumbuhan

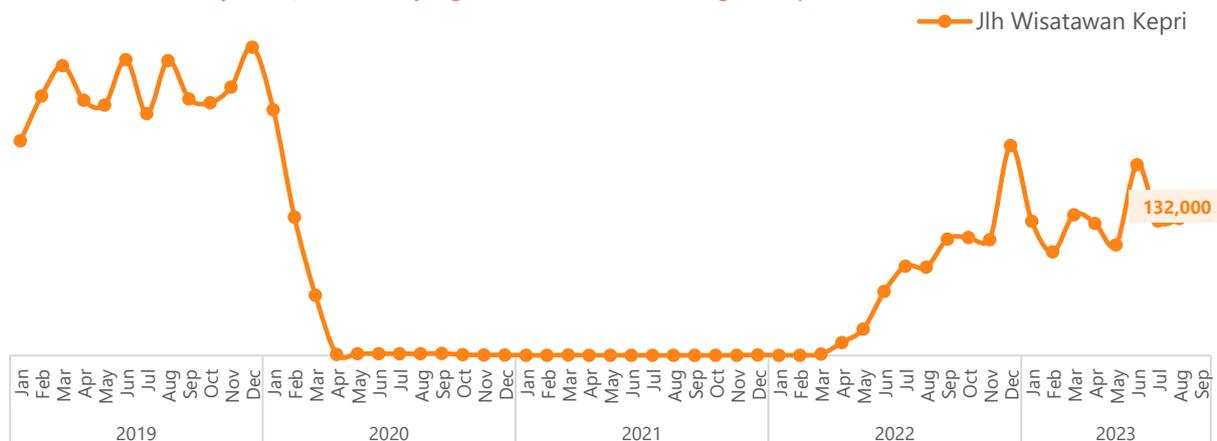


wisatawan mancanegara di Kepri yang terus mengalami pertumbuhan setelah pasca pandemi COVID-19.

Selain itu, Belanja Modal pemerintah sebagai komponen investasi pemerintah juga terus mengalami pertumbuhan s.d. triwulan III 2023. Di triwulan III Belanja Modal terealisasi sebesar Rp988,22 miliar, tumbuh 7,27 persen (yoy) yang secara khusus diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan oleh Kepri. Belanja Modal juga menjadi alat untuk menginisiasi investasi dari luar (*private investment*) untuk ikut serta menanamkan modal berinvestasi di Kepri. Pemerintah Daerah (Pemda) Kepri berfokus pada pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur yang memadai dan baik akan menarik para investor untuk masuk ke Kepri.

Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar Rp34,12 triliun (41,57 persen) dan mengalami pertumbuhan 2,77 persen (yoy). Meskipun kondisi global saat ini sedang dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi, berdasarkan survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2023, diperoleh nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2023 yang terjaga dalam zona optimis (>100) pada level 121,7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, dan juga pada regional Kepri tetap kuat. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan mobilitas masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara yang terus mengalami pertumbuhan di sepanjang tahun 2022-2023.

Grafik 1.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari s.d. September 2023 sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.8, mencapai 1.105.900 orang. Jumlah wisatawan mancanegara yang terus bertambah mendorong kontribusi tingkat konsumsi PDRB di Kepri. Sampai dengan triwulan III 2023, Kota Batam menjadi kota yang paling dominan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan total kunjungan 860.508 orang, diikuti Kabupaten Bintan (162.596 orang), Kabupaten Karimun (138.548 orang), dan Kota Tanjungpinang (39.707 orang).

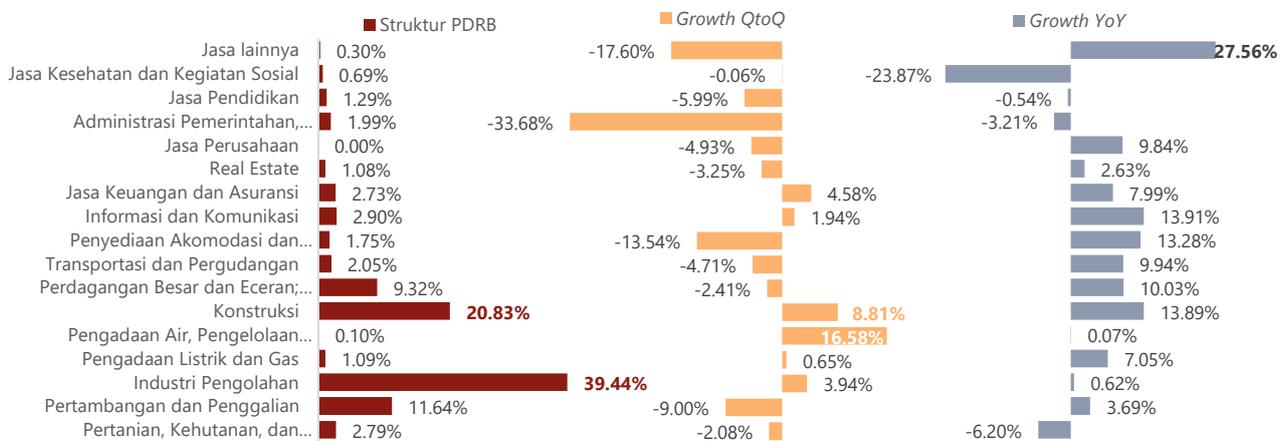
PDRB menurut Lapangan Usaha

Data PDRB triwulan III 2023 berdasarkan lapangan usaha, terdapat 3 sektor yang berkontribusi dominan terhadap PDRB di Kepri, yaitu berturut-turut Industri Pengolahan Rp19.766,51 miliar (39,44 persen), Konstruksi Rp9.863,89 miliar (20,83 persen), dan Pertambangan dan Penggalian Rp5.701,74 miliar (11,64 persen). Kemudian, bila dilihat berdasarkan pertumbuhan *year on year*, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi berturut-turut adalah



sektor Jasa Lainnya (27,56 persen), lalu diikuti sektor Informasi dan Komunikasi (13,91 persen), dan sektor Konstruksi (13,89 persen).

Grafik 1.9 PDRB Kepri menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Industri Pengolahan sebagai sektor utama yang mendominasi PDRB di Kepri tumbuh sebesar 0,62 persen (yoy). Kinerja pada Industri Pengolahan di Kepri didukung oleh produksi barang dari logam, elektronik, optik, serta alat angkutan laut yang nyatanya di bulan September 2023 masuk kedalam komoditas ekspor nonmigas terbesar Kepri dan telah menyumbang nilai ekspor sebesar US\$161,05 Juta atau 29,55 persen dari total nilai ekspor Kepri ke Singapura.

Selanjutnya, sektor konstruksi di wilayah Kepri juga terus berkembang sehingga dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi di Kepri. Berdasarkan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) terdapat peningkatan data realisasi pengadaan semen pada triwulan III 2023 dibanding triwulan II 2022, naik 17,94 persen. Dari 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan tahun 2023 hingga 2024, terdiri dari 5 kegiatan prioritas nasional dan 17 kegiatan prioritas BP Batam. Dengan rincian, pembangunan jalan koridor utama dari simpang Lualan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Jalan ini, akan dibangun sepanjang 9 Km dan akan dibangun 3 lajur kiri dan tiga lajur kanan. Sehingga nantinya akan menjadi 5 lajur kanan dan kiri.

1.1.2 Kontribusi Fiskal Terhadap Pembentukan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan PDRB merupakan sebuah proses peningkatan *output* per kapita dari satu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang meningkatkan produksi barang maupun jasa di masyarakat. Oleh karena itu, di negara manapun akan selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dapat berjalan secara maksimal serta menjamin pertumbuhan yang stabil.

Berdasarkan konsep *Keynesian*, dinyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan net ekspor ($Y = C + I + G + NX$). Sehingga, menurut *Keynes*, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan investasi, permintaan pengeluaran pemerintah, serta permintaan ekspor dan impor untuk peningkatan pendapatan Nasional. Peran pemerintah tersebut dapat dilihat



melalui APBN dan APBD yang menjadi alat pemerintah dalam memberikan kontribusi fiskal terhadap pembentukan PDRB.

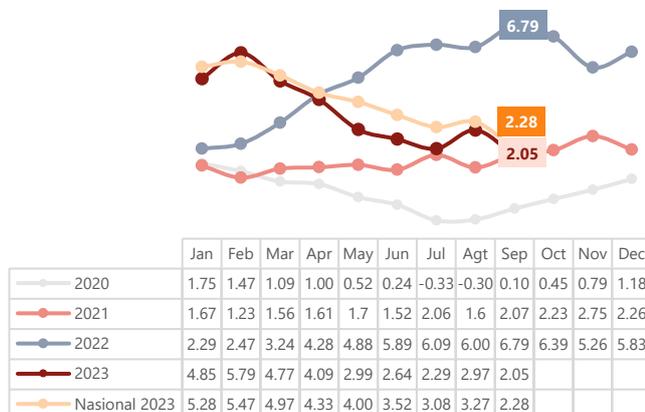
Berdasarkan hasil *mapping* konsolidasi Belanja APBN dan APBD Regional Kepri periode triwulan III 2023, maka diperoleh hasil relasi kontribusi fiskal terhadap Pembentukan PDRB pada sektor riil Kepri sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, serta belanja lain seperti Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-Lain, dan Transfer ke Daerah, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pengeluaran Pemerintah (G) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp19.083,75 miliar (87,25 persen).
2. Belanja Barang, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Konsumsi Pemerintah (C) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp378,58 miliar (1,73 persen).
3. Belanja Modal yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Investasi (I) dalam pembentukan PDRB adalah sebesar Rp2.411,07 miliar (11,02 persen).

1.1.3 Inflasi

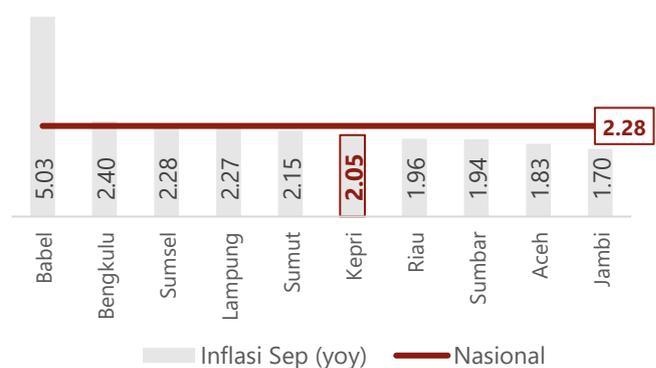
Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara berkelanjutan. Secara nasional, tingkat Inflasi *year on year* September 2023 sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Tekanan inflasi dari gabungan 2 kota di Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) tercatat sebesar 2,05 persen (*yoy*) dan 0,16 persen (*mtm*) dengan IHK sebesar 114,66 (*yoy*). Tekanan inflasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 sebesar 6,79 persen (*yoy*) dan juga lebih rendah dibandingkan tingkat Inflasi Nasional sebesar 2,28 persen (*yoy*).

Grafik 1.10 Perkembangan Inflasi Kepri dan Nasional (*yoy*)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

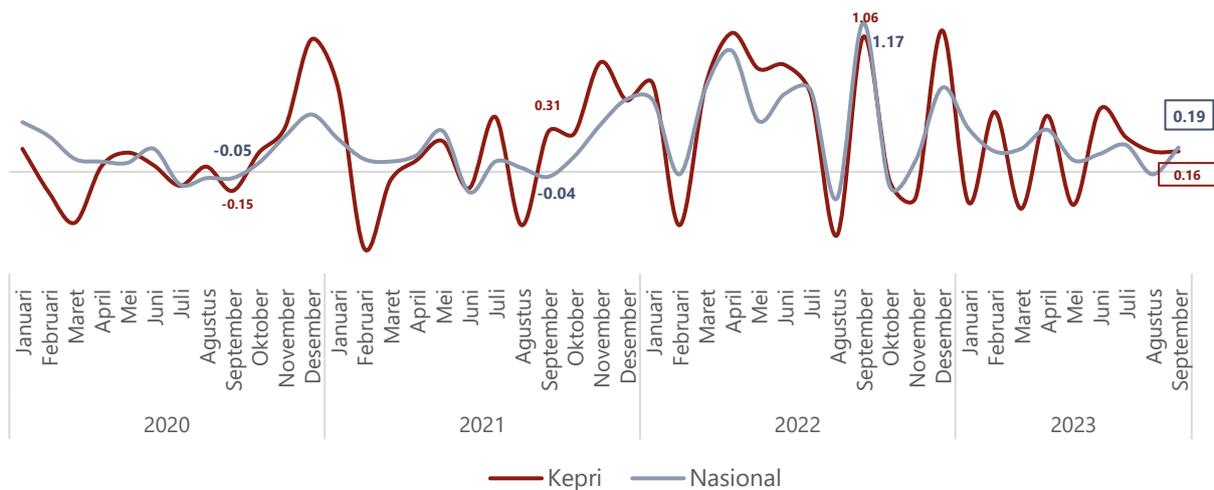
Grafik 1.11 Inflasi Regional Sumatera per September 2023 (*yoy*)



Berdasarkan Grafik 1.10, perkembangan inflasi di Kepri maupun di tingkat nasional pada bulan September 2023 secara *year on year* mengalami penurunan yang signifikan. Bila disesuaikan dengan target Inflasi Kepri pada bulan September 2023 masih berada di dalam rentang target sasaran Inflasi 2023, yakni 3 ± 1 persen. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, Kepri berada di urutan ke lima dengan inflasi 2,05 persen (*yoy*) dengan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di regional Sumatera di bulan September 2023 dengan inflasi 5,03 persen (*yoy*).



Grafik 1.12 Perkembangan Inflasi Kepri dan Nasional (mtm)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Tekanan inflasi baik secara nasional maupun di regional Kepri terus mengalami fluktuasi setiap bulannya sebagaimana tergambar pada grafik 1.12. Inflasi diperkirakan turun seiring dengan meredanya permintaan terhadap produk pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha. Penurunan tren inflasi juga sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi dari komoditas global dan membaiknya rantai pasok dunia, hal tersebut juga merupakan dampak *high base effect* dari kenaikan harga BBM di tahun 2022 dan penurunan harga CPO yang relatif menurun pada pertengahan tahun 2023 sehingga inflasi di tahun 2023 menjadi lebih rendah.

Tekanan inflasi Kepri diperkirakan dapat dijaga direntang sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1$ persen (*yoy*). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Komoditas yang mempunyai andil Inflasi besar dari gabungan 2 kota IHK Kepri pada bulan September 2023 (*yoy*) adalah beras 0,18 persen, bensin 0,06 persen, Biaya Pulsa Ponsel 0,01 persen, Uang Kuliah Akademi 0,01 persen, dan Rokok Kretek Filter sebesar 0,01 persen. Kemudian, komoditas yang mempunyai andil Deflasi terbesar pada bulan September 2023 (*yoy*) adalah Telur Ayam (-0,05 persen), Bawang Merah (-0,03 persen), Cabai Rawit (-0,02 persen), Bawang Putih (-0,01 persen), dan Cabai Merah (-0,01 persen).

Andil inflasi yang disumbang oleh komoditas Bensin tersebut sejalan sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana per 1 September 2023 pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina (Rp800-900/liter), Pertamina Turbo (Rp1.300-1.500/liter), Dexlite (Rp2.300-2.500/liter), dan Pertamina Dex (Rp2.400-2.900/liter).

Secara tahun kalender, Tingkat Inflasi gabungan 2 kota di Kepri tercatat sebesar 1,21 persen (*ytd*) dan tercatat sebagai inflasi tahun kalender terendah se-Sumatera sekaligus peringkat ketiga terendah se-Indonesia. Hal ini tentunya merupakan hasil upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim TPID Kepri di tahun 2023.



Sejumlah upaya upaya pengendalian Inflasi yang telah dilaksanakan pada bulan September 2023 yakni:

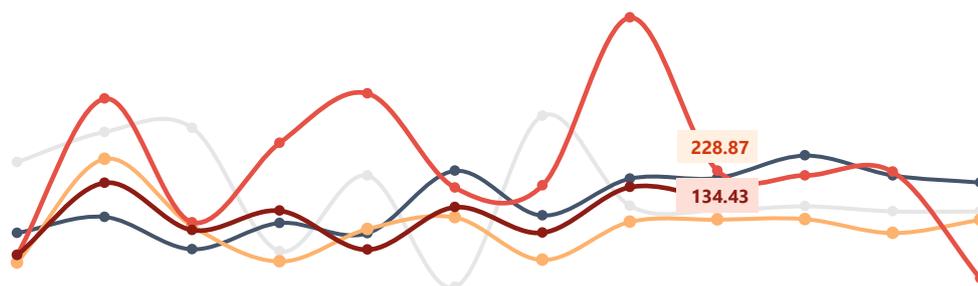
- Melaksanakan koordinasi dan sinergi program melalui HLM TPID Kota Batam pada 7 September 2023, Kota Tanjungpinang pada 29 September 2023 dan Kabupaten Karimun pada 21 September 2023.
- Bersinergi dengan Disperindag dalam melakukan pemantauan distribusi, memastikan ketersediaan stok, dan pergerakan harga kebutuhan pokok melalui pendataan di tingkat distributor, sub distributor, dan pasar tradisional & modern.
- Bersinergi dengan Dishub, KSOP, dan Balai Karantina dalam memastikan kelancaran distribusi barang yang menggunakan moda transportasi laut melalui dukungan perizinan bongkar muat kapal pengangkut komoditas pangan dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri.
- Penandatanganan 17 MoU KAD antara Kepri dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung.
- Program peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi melalui pengembangan pengolahan pakan unggas di Kota Tanjungpinang.
- Pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai berikut: Kota Batam pada 21 September 2023, Kota Tanjungpinang pada 23 September 2023, dan Kab. Natuna pada 15 September 2023.

1.1.4 Ekspor dan Impor

● Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan luar negeri di Kepri pada bulan September yang terlihat pada Grafik 1.13, tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US\$134,43 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan September sebesar US\$1.526,19 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan September sebesar US\$1.391,76 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 41,26 persen (yoy).

Grafik 1.13 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (mtm)



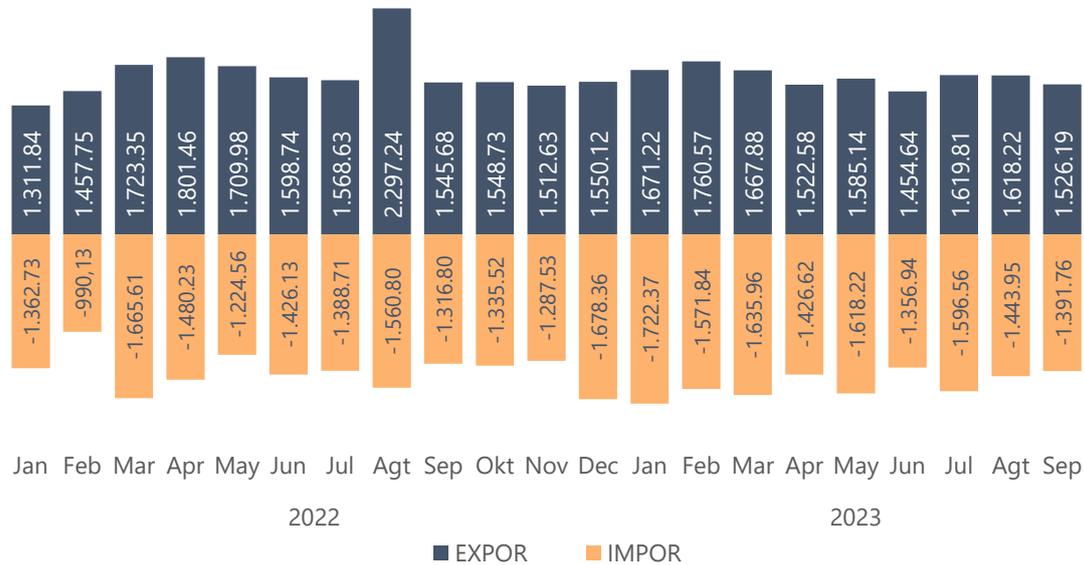
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	257.87	357.37	370.96	-37.71	212.65	-156.99	411.34	112.66	97.53	110.88	94.01	93.81
2021	22.35	75.66	-31.61	55.59	21.30	228.39	80.30	202.51	204.84	279.07	213.30	189.62
2020	-75.77	267.87	44.95	-72.19	35.31	74.02	-67.02	59.31	66.46	68.36	22.10	65.64
2022	-50.89	467.62	57.74	321.24	485.41	172.61	179.92	736.44	228.87	213.21	225.10	-128.24
2023	-51.15	188.73	31.92	95.96	-33.08	107.75	23.25	174.26	134.43			

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)



Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah Kepri terus melakukan upaya terbaik dalam meningkatkan infrastruktur *Hub Logistik* dalam memajukan perekonomian dan pergerakan ekspor impor di Kepri. Dukungan ini diharapkan dapat membentuk keseimbangan antara impor dan ekspor produk demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor dan Impor Kepri Tahun 2022-2023 (US\$ Juta)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

● Perkembangan Ekspor

Total nilai Ekspor Kepri (migas dan non migas) pada bulan September 2023 sebesar US\$1.526,19 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,26 persen bila dibandingkan dengan bulan September 2022 (yoy).

Sektor nonmigas yang terdiri atas Hasil Industri, Hasil Pertanian, Hasil Tambang, dan Lainnya, menyumbang 78,11 persen atau US\$1.192,11 Juta dari total ekspor Kepri pada bulan September 2023 yang didominasi oleh golongan mesin/peralatan listrik (mesin/pesawat mekanik, kapal laut). Nilai ekspor pada sektor nonmigas tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,66 persen (yoy) yang secara besar dipengaruhi oleh adanya penurunan pada hasil industri dan hasil pertanian. Kemudian, penurunan tersebut juga didorong oleh harga minyak dan gas yang secara global mengalami perlambatan, khususnya harga minyak nabati dan *Crude Palm Oil* (CPO).

Komoditas ekspor pada sektor migas di Kepri terdiri atas Gas Alam, Hasil Minyak, dan Minyak Mentah. Pada bulan September 2023, sektor migas menyumbang 21,89 persen atau US\$334,08 Juta dari total ekspor Kepri. Di bulan September 2023, capaian nilai ekspor sektor migas mengalami kenaikan sebesar 26,10 persen (yoy) yang disumbang oleh peningkatan ekspor sub sektor hasil minyak di bulan september 2023 sebesar 152,28 persen.

Bila dilihat dari sisi fiskal, nilai ekspor yang mengalami pertumbuhan negatif juga berdampak pada sektor fiskal, khususnya Pendapatan Bea Keluar. Sampai dengan bulan September 2023, perolehan Bea Keluar mencapai Rp139,84 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 81,16 persen (yoy).

Pada bulan September 2023, negara Singapura masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kepri dengan total nilai ekspor non migas sebesar US\$340,09 Juta dan sektor migas



sebesar US\$204,92 Juta atau mencapai 35,66 persen dari total ekspor Kepri bulan September 2023. Komoditas ekspor ke Singapura bulan September 2023 didominasi oleh bahan bakar mineral (37,60 persen), mesin/peralatan listrik (29,55 persen), dan mesin-mesin/pesawat mekanik (12,47 persen). Kemudian, disusul oleh Amerika (US\$270,36 Juta) dan Tiongkok (US\$82,36 Juta).

● Perkembangan Impor

Total nilai Impor Kepri (migas dan non migas) pada bulan September 2023 sebesar US\$1.391,76 Juta. Nilai impor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,69 persen bila dibandingkan dengan bulan September 2022 (*yoy*).

Pada bulan September 2023, nilai impor terbesar di Kepri bersumber dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) sebesar US\$325,17 Juta (23,36 persen), kemudian disusul oleh negara Singapura sebesar US\$224,00 Juta (17,53 persen) dan Malaysia sebesar US\$120,66 Juta (8,67 persen). Kemudian, bila dilihat dari golongan penggunaan barang, impor di Kepri masih didominasi oleh Barang Baku dan Penolong (82,93 persen), yang disusul oleh Barang Modal (11,78 persen) dan Barang Konsumsi (5,29 persen).

Barang Baku dan Penolong yang menjadi mayoritas produk impor ke Kepri mencerminkan bahwa sektor unggulan di Kepri, ada pada sektor industri manufaktur, khususnya pada produk mesin dan peralatan listrik yang nantinya akan kembali di ekspor ke luar negeri.

Pertumbuhan nilai Impor sebesar 5,69 persen pada bulan September 2023 nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan bea masuk yang pada bulan September 2023 mencapai Rp573,21 miliar. Pendapatan Bea Masuk di bulan September 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 17,00 (*yoy*). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai impor di Kepri tidak berkorelasi dengan perolehan pendapatan bea masuk, dikarenakan mayoritas barang impor yang masuk melalui Pelabuhan di Kota Batam yang mana Kota Batam merupakan daerah kepabeanan yang memiliki keistimewaan sebagai **Free Trade Zone (FTZ)** sehingga mayoritas barang-barang tersebut bebas dari pengenaan tarif bea masuk.

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Angka kemiskinan di Kepri pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya.

Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022 Jumlah Penduduk Miskin di Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen poin atau menurun $\pm 9,18$



ribu jiwa (yoy) dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, Jumlah Penduduk Miskin di Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.

Grafik 1.15 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)



Grafik 1.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Sebagaimana tergambar pada Grafik 1.15, di bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin Kepri sebesar 5,69 persen. Capaian tersebut menjadi persentase terendah keenam se-Indonesia, atau terendah kedua di Pulau Sumatera di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini juga berada di bawah angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,36 persen. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2023 sebesar 5,74 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (5,59 persen) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

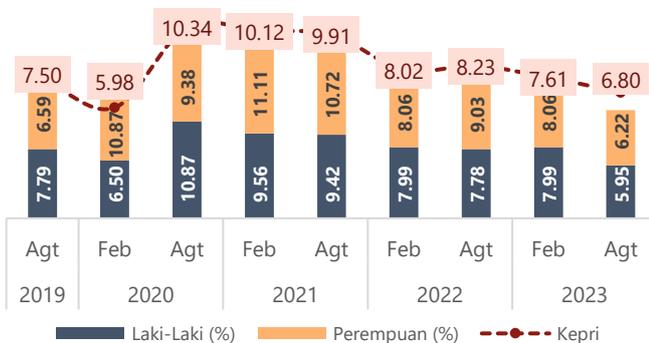
Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan pada Maret 2023, diantaranya adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. TPT pada bulan Februari 2023 berada pada 7,61 persen. Penduduk yang bekerja pada Februari 2023 sebanyak 1.023 ribu orang, naik sebanyak 50 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar 41,8 ribu orang yang merupakan industri unggulan Kepri. Hal ini menunjukkan sinyal positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Kepri.

Beberapa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan adanya operasi pasar murah yang merupakan kegiatan GNPIP bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi dengan bunga pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah. Pemerintah juga turut mendorong daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang s.d. September 2023 telah tersalurkan sebesar Rp27,44 miliar kepada 275 desa di 5 kabupaten lingkup Kepri (Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas).



1.2.2 Tingkat Pengangguran

Grafik 1.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kepri Tahun 2020-2023 (persen)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Kondisi ketenagakerjaan di Kepri telah menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang salah satunya tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bulan Agustus 2023 yang mengalami penurunan. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menunjukkan ketidakefektifan pasokan tenaga kerja.

Sampai dengan Agustus 2023, komposisi Angkatan Kerja di Kepri tercatat sebanyak 1.093.686 orang atau 68,68 persen dari total Penduduk Usia Kerja di Kepri (Semua orang yang berumur 15 tahun ke atas). Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Kepri adalah Sektor Industri Pengolahan (25,23 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar (16,45 persen); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (9,01 persen).

Sebagaimana tergambar pada Grafik 1.17, TPT pada bulan Agustus 2023 mencapai angka 6,80 persen atau turun 1,43 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022 (yoy). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Agustus 2023 TPT lebih didominasi oleh Perempuan dengan nilai TPT 6,22 persen poin dan kemudian nilai TPT Laki-Laki sebesar 5,95 persen poin dan 6,22 persen poin. TPT tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,32 persen dan bahkan berada pada posisi tertinggi ke-tiga tingkat nasional setelah Banten (7,52 persen) dan Jawa Barat (7,44 persen). Tingginya TPT di Kepri dipengaruhi oleh adanya *mismatch* ketersediaan lapangan kerja pada industri unggulan di Kepri, khususnya pada industri pengolahan, dengan keahlian dan lulusan masyarakat di Kepri. Dengan industri pengolahan yang

Namun demikian, Kepri juga merupakan Provinsi dengan tingkat penurunan TPT tertinggi kedua yakni sebesar -1,43 persen (yoy), setelah Provinsi Bali dengan penurunan TPT sebesar -2,11 persen (yoy). Penurunan TPT didukung dengan bergeliatnya sektor ekonomi dan kreatif, khususnya hotel dan restoran. Pegawai hotel dan restoran yang semula dirumahkan sudah mulai terserap kembali seiring dengan diskresi pemerintah baik dari negara tetangga yaitu Singapura dan pemerintah pusat untuk kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing serta dibukanya beberapa tempat wisata baru di Kepri.

Sebagai kesimpulan, tumbuhnya seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di Kepri, terutama PMTB yang tumbuh sebesar 10,12 persen (yoy) khususnya pada sektor industri pengolahan turut meningkatkan perluasan lapangan kerja baru. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kesanggupan pihak swasta akan tenaga kerja dan berkontribusi atas penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kepri.

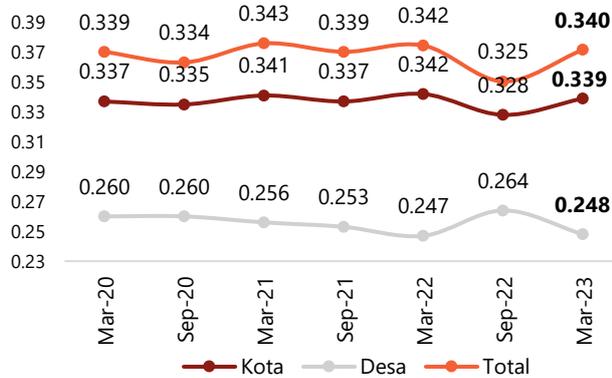


1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Koefisien Gini atau *Gini Ratio* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Peningkatan indikator kesejahteraan di Kepri seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka nyatanya tidak diikuti dengan penurunan Rasio Gini di Kepri. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepri yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,388. Meningkat 0,015 *point* dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran melebar pada periode Maret 2023. Namun, bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Rasio Gini tercatat menurun sebesar 0,002 *point* (yoy).

Grafik 1.18 - Perkembangan Rasio Gini Kepri Tahun 2019-2022 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepri yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah dengan upaya yang dilakukan,

diantaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi ke depan.

Sebagaimana tergambar pada Grafik 1.18, tren ketimpangan Kepri di perkotaan mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren ketimpangan di pedesaan. Pada Maret 2023, ketimpangan di perkotaan mencapai angka 0,339. Sedangkan angka gini rasio di desa per Maret 2023 sebesar 0,248, angka ini termasuk rendah selama periode tiga tahun terakhir.

1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

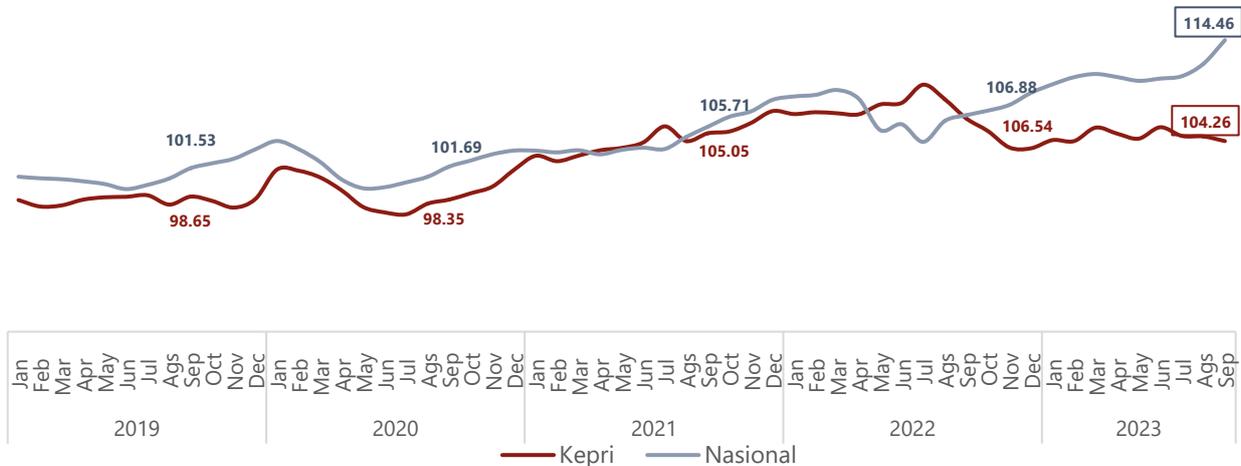
Penurunan rasio gini di pedesaan tersebut juga didorong oleh adanya intensitas penyaluran bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), penciptaan lapangan kerja yang layak, serta sejalan dengan pemulihan ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut potensi ketidakpastian ekonomi ke depan.

NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam memahami kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu regional. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara harga barang yang dihasilkan petani dengan harga barang yang harus mereka bayar sebagai konsumsi maupun input



produksi. Nilai tersebut dipengaruhi oleh produktivitas, permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, harga pupuk, serta biaya operasi/produksi lain seperti upah dan modal kerja.

Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

NTP Kepri pada bulan September 2023 yang tergambar pada Grafik 1.19 sebesar 104,26 dan menunjukkan adanya pertumbuhan negatif sebesar 0,45% bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2023. Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (113,46), hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian. Nilai tersebut telah melebihi target NTP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,91 persen.

Pada periode September 2023, tercatat dua subsektor mengalami penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yaitu: Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (-0,25%) dan Subsektor Peternakan (-0,66%). Terdapat kenaikan (It) pada Subsektor Tanaman Pangan (0,10%), Hortikultura (0,10%) dan Perikanan (46%). Kemudian, kondisi tersebut juga disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang mengalami kenaikan di tahun 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh biaya produksi dan penambahan barang modal yang naik sejalan dengan inflasi dari harga barang produksi.

Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Kepri antara lain: (1) kurangnya dukungan infrastruktur kegiatan pertanian (irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil pertanian); (2) belum optimalnya kapasitas petani dan pelaku perkebunan karena karakteristik geografis Kepri yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga perlu SDM yang cakap dalam mengelola pertanian; (3) serta perlunya pengembangan penggunaan teknologi pertanian baik dalam pengolahan maupun keberlanjutan pemasaran. Selain itu, lahan pertanian yang tidak terlalu luas juga menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kepri.

Pemerintah pusat turut mengupayakan perkembangan pertanian di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program. Sampai dengan triwulan III tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah merealisasikan belanja sebesar Rp28,47 miliar atau mencapai 55,77 persen dari total pagu Belanja TA 2023. Belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pertanian di Kepri antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) sarana pengembangan kawasan hortikultura;

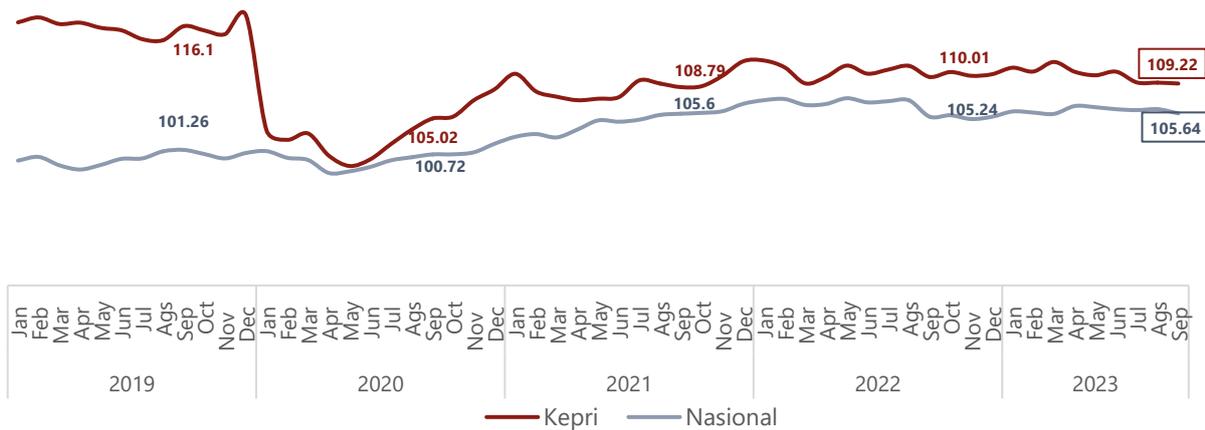


(3) penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan; (4) peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para petani untuk meningkatkan kualitas produksinya.

Dukungan pada sektor pertanian juga dilakukan oleh TPID Kepri. Pada tahun 2023, TPID Kepri telah membantu para petani melalui pemberian pupuk organik, pemberian bibit tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi lokal.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Grafik 1.20 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Kepri dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km. Dengan Kondisi demikian, tentunya Kepri menyimpan Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Kepri telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepri.

NTN merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikananannya. NTN terdiri atas nilai tukar perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan budidaya.

NTN Kepri di bulan September 2023 yang tergambar pada Grafik 1.20 sebesar 109,22. Angka NTN tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,38 persen (yoy) dan berada di atas angka NTN Nasional (105,64). Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis Kepri yang merupakan Kepulauan dan memiliki keanekaragaman biota laut yang menjadi salah satu keunggulan daerah.

Namun demikian, Capaian NTN tersebut masih berada di bawah sasaran NTN pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 115,5. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Peningkatan NTN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 0,56 persen lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar



Nelayan (Ib) sebesar 0,16 persen. Kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan secara garis besar didukung oleh naiknya harga komoditas tongkol (3,22 persen) untuk perikanan tangkap dan naiknya harga komoditas kepiting laut (5,41 persen) untuk perikanan budidaya.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan di Kepri, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) masih terdapat kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di pulau terluar Kepri seperti di Natuna dan berdampak pada hilangnya hasil laut Kepri yang seharusnya menjadi bagian nelayan lokal; (2) pencemaran laut oleh pembuangan limbah (minyak hitam) dari kapal internasional di perairan Selat Malaka; (3) lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan khususnya, bagi usaha kecil dan menengah; serta (4) teknologi pengolahan perikanan yang masih terbatas dan belum terstandar berstandar ekspor.

Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program. Sampai dengan triwulan III 2023, realisasi belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kepri adalah sebesar Rp59,18 miliar atau mencapai 58,36 persen dari total pagu TA 2023. Belanja tersebut digunakan dalam upaya mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, IPM juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kepri secara perlahan terus meningkat sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat perekonomian manusia namun juga mengukur tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan, sehingga angka IPM itu mengandung 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan. IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, $IPM < 60$ (rendah), $60 \leq IPM < 70$ (sedang), $70 \leq IPM < 80$ (tinggi), $IPM \geq 80$ (sangat tinggi).

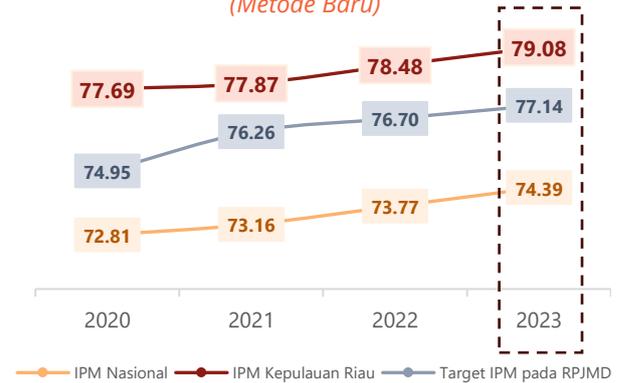
Sejak tahun 2023, terdapat perubahan metode perhitungan IPM, yang sebelumnya menggunakan UHH dengan tahun dasar 2010, saat ini telah menggunakan UHH dengan tahun dasar 2020. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya perubahan IPM yang berbeda sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, yang dapat dilihat pada Grafik 1.22.



Grafik 1.21 Perkembangan IPM Kepri Tahun 2018-2022 (Metode Lama)



Grafik 1.22 Perkembangan IPM Kepri Tahun 2020-2023 (Metode Baru)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level “tinggi”. Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka IPM Kepri pada tahun 2023 sebesar 79,08 atau tumbuh sebesar 0,76 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

Grafik 1.23 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2022 (Metode Baru)



Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, UHH penduduk Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen (yoy), menjadi 74,90 dari sebelumnya 74,62. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun.

Kemudian, HLS Kepri di tahun 2023 meningkat 0,46 persen menjadi 13,05 tahun dari yang sebelumnya 12,99 tahun, peningkatan tersebut memberikan arti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun. Lebih lanjut, RLS di Kepri juga meningkat 0,39 persen menjadi 10,41 tahun dari yang sebelumnya 10,37 tahun, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 10,37 tahun. Peningkatan juga terjadi pada pengeluaran per kapita yang tumbuh sebesar 3,66 persen di tahun 2023 (yoy) yang menandakan adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Kepri, baik dari sisi konsumsi maupun sisi investasi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri yang tergambar melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kualitas hidup masyarakat Kepri yang semakin baik.



Tabel 1.1 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2018-2022 (Metode Lama)

Wilayah	IPM Kabupaten/Kota di Kepri (Metode Lama)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Natuna	72,1	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kota Tanjung Pinang	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kota Batam	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Kepulauan Anambas	67,53	68,48	68,8	69,23	69,61
Karimun	70,56	71,1	71,44	71,7	72,65
Bintan	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99

*Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

*Data IPM per Kab/Kota Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan tabel 1.1, bila dilihat secara kewilayahan, angka IPM di seluruh kab/kota di Kepri juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 - 2022, dengan Kota Batam yang menjadi kota dengan angka IPM tertinggi di Kepri dengan skor 81,67 di tahun 2022. Namun demikian, bila kita lihat lebih dalam, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang angka IPM nya masih berada dibawah angka IPM Nasional. Terutama pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dilihat dari angka IPM tersebut, maka upaya pemerintah masih sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan di kabupaten/kota tersebut.

Dalam upaya mendorong pemerataan IPM melalui peningkatan tiap indeks pembentuk IPM di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa program dan kegiatan pada Kabupaten di Kepri yang masih dikategorikan IPM sedang, yaitu di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 1.2 Pagu dan Realisasi Upaya Peningkatan IPM di Kabupaten Lingga Tahun 2022 - 2023

Keterangan	Tahun 2022			Pagu Tahun 2023		
	Pagu	Realisasi	(%) Realisasi	Pagu	Realisasi	(%) Realisasi
Upaya Peningkatan Angka Anak Lahir Hidup dan Tumbuh Hidup	44.546.996.706	23.178.910.675	52,03%	42.873.026.747	22.077.356.400	51,49%
Upaya Peningkatan Jumlah Penduduk Usia Sekolah yang Mengikuti Pendidikan (SD - SMP - SMA)	54.006.463.038	17.556.851.065	32,51%	53.772.035.737	16.811.193.877	31,26%
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditandai dengan tingkat PDB/per kapita	1.864.198.130	1.141.442.440	61,23%	2.074.813.925	1.626.736.609	78,40%

*Sumber: Barenlitbang Kabupaten Lingga, Kepri 2023 (diolah)

Selanjutnya, terdapat beberapa program prioritas di Kabupaten Lingga melalui APBD yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya pada fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Pada tahun 2023, telah direalisasikan belanja untuk Fungsi Kesehatan sebesar Rp22,07 miliar dan untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp16,81 miliar, dan Fungsi Ekonomi sebesar Rp11,62.



Anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan pengelolaan Pendidikan di sekolah, penyediaan layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera, pengembangan dan peningkatan UMKM, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan IPM di daerah.

Melalui belanja tersebut, diharapkan setiap pemda dapat mencapai tujuan akhir dari pengalokasian anggaran di daerah yaitu memberikan hasil nyata berupa perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan angka kesejahteraan di Kepri, khususnya pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.





Bawah Reserve
Kab. Kep. Anambas

ANALISIS FISKAL REGIONAL

Kinerja fiskal regional tumbuh membaik ditandai dengan pertumbuhan realisasi Belanja APBN, Pendapatan APBD, dan Belanja APBD. Lebih lanjut, Pendapatan APBN tetap terjaga di atas 75 persen.





Analisis Fiskal Regional

2.1 Analisis Laporan Realisasi APBN

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distoratif, misalnya melalui penyesuaian tarif cukai dan subsidi BBM. Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat pemerataan keadilan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), program penanggulangan kemiskinan, *stunting*, dan daerah tertinggal. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1- Perkembangan I-Account APBN di Kepri Triwulan II 2022 dan Triwulan III 2023 (Rp Miliar)

Uraian	Realisasi s.d. Triwulan III TA 2022			Realisasi s.d. Triwulan III TA 2023			% Growth
	Target	Realisasi	% Real	Target	Realisasi	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	12.032,40	9.323,85	77,49	11.492,97	8.702,72	75,72	(6,66)
I. Penerimaan Dalam Negeri	12.032,40	9.323,85	77,49	11.492,97	8.702,72	75,72	(6,66)
1. Penerimaan Perpajakan	9.867,39	8.039,19	81,47	9.209,34	7.213,78	78,33	(10,27)
a. Pajak Dalam Negeri	8.455,21	6.606,26	78,13	8.528,78	6.499,39	76,21	(1,62)
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.412,17	1.432,93	101,47	680,56	714,39	104,97	(50,15)
2. PNBPNP	2.165,01	1.284,66	59,34	2.283,63	1.488,94	65,20	15,90
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b. PNBPNP Lainnya	466,70	520,00	111,42	412,91	595,11	144,13	14,44
c. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.698,32	764,66	45,02	1.870,72	893,83	47,78	16,89
B. Belanja Negara	15.702,15	9.431,41	60,06	16.445,75	10.958,03	66,63	16,19
1. Belanja Pemerintah Pusat	7.238,81	3.680,67	50,85	8.491,50	5.130,29	60,42	39,38
1. Belanja Pegawai	1.816,09	1.375,42	75,74	2.120,44	1.508,69	71,15	9,69
2. Belanja Barang	3.410,61	1.703,23	49,94	3.790,74	2.500,19	65,96	46,79
3. Belanja Modal	1.760,91	485,30	27,56	2.329,27	1.000,59	42,96	106,18
7. Bantuan Sosial	2,55	1,89	74,06	4,60	2,93	63,77	55,14
8. Belanja Lainnya	248,64	114,83	46,18	246,44	117,89	47,84	2,67
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	8.463,35	5.750,74	67,95	7.954,26	5.827,74	73,27	1,34
A. Transfer ke Daerah	8.254,20	5.578,19	67,58	7.736,47	5.642,47	72,93	1,15
- Dana Bagi Hasil	2.101,52	925,27	44,03	1.232,20	839,88	68,16	(9,23)
- Dana Alokasi Umum	4.280,64	3.546,18	82,84	4.474,84	3.420,65	76,44	(3,54)
- Dana Insentif Daerah	157,36	93,45	59,39	63,13	52,75	83,55	(43,56)
- DAK Fisik	592,32	285,13	48,14	805,94	417,49	51,80	46,42
- DAK Non Fisik	1.122,36	728,15	64,88	1.160,36	911,70	78,57	25,21
B. Dana Desa	209,14	172,55	82,50	217,79	185,27	85,07	7,37
C. Transfer Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Keseimbangan Primer	(3.669,75)	(107,57)	2,93	(4.952,78)	(2.255,31)	45,54	1.996,68
D. Surplus/Defisit Anggaran	(3.669,75)	(107,57)	2,93	(4.952,78)	(2.255,31)	45,54	1.996,68

Sumber: GFS, OM-SPAN, MEBE, dan Simtrada (data diolah)

Pendapatan dan Hibah ditargetkan sebesar Rp11.492,97 miliar dengan Pagu Belanja sebesar Rp16.445,75 miliar. Tingginya Belanja dibandingkan Pendapatan mengakibatkan APBN lingkup Kepri defisit sebesar Rp4.952,78 miliar. Kebijakan defisit anggaran ditempuh pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah mempertahankan nominal Belanja Negara yang diharapkan akan memberikan dampak stimulus bagi perekonomian Kepri di berbagai sektor.

Target Pendapatan dan Hibah sebesar Rp11.492,97 miliar lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp12.032,40 miliar. Namun demikian, target Pendapatan dan Hibah tahun 2022 tersebut merupakan hasil perubahan melalui APBN-P yang awalnya sebesar Rp7.127 miliar. APBN-P dilakukan karena realisasi penerimaan mampu mencapai 77,55 persen pada semester I 2023 sebagai **dampak kebijakan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS)**.

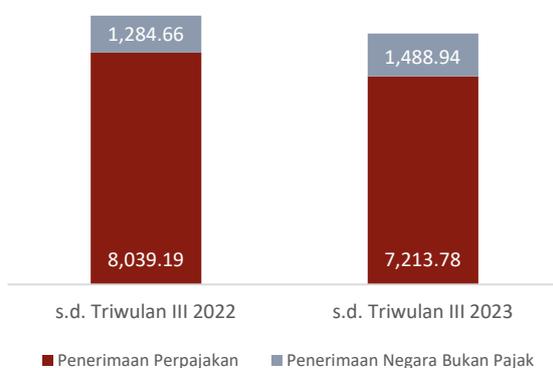
Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Pagu Belanja Negara meningkat 4,74 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan terjadi karena Pagu Belanja Pemerintah Pusat meningkat 17,31 persen sedangkan pagu Transfer ke Daerah tumbuh minus 6,02 persen. Peningkatan pagu Belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh peningkatan pagu Bantuan Sosial (80,17 persen) dan Belanja Modal (32,28 persen).

Peningkatan pagu Bantuan Sosial dan Belanja Modal menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan pembangunan. Di samping itu, melalui Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 telah ditetapkan dua PSN baru di Kepri, yaitu Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City sehingga terdapat total sepuluh PSN di Kepri. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial juga menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menjaga daya beli masyarakat dengan program Bantuan langsung tunai, PKH, dll.

2.1.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara hanya terdiri atas Penerimaan Dalam Negeri, dengan Realisasi sampai dengan triwulan iii 2023 sebesar Rp8.072,72 miliar atau 75,72 persen dari Target dan terjadi pertumbuhan minus sebesar 6,66 persen (yoy). Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi dominan yaitu sebesar 82,89 persen (Rp7.213,78 miliar) dibandingkan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 17,11 persen (Rp1.488,94 miliar).

Grafik 2.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2023



Sumber: GFS 1w III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

Grafik 2.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2023



Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)



Grafik 2.3 - Porsi Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. Triwulan iii 2023



Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

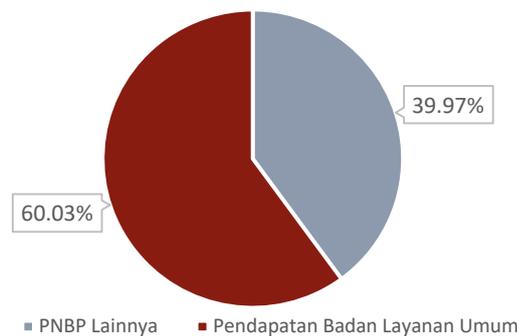
Penerimaan Perpajakan direalisasikan sebesar Rp7.213,78 miliar atau 78,33 persen dari Pagu. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar yaitu 90,10 persen (Rp6.499,39 miliar), sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 9,90 persen (Rp714,39 miliar) sebagaimana tertera dalam Grafik 2.3 berikut.

Pajak Dalam Negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Lainnya, dan Cukai. Realisasi didominasi oleh

PPh (88,67 persen) sebesar Rp5.763,25 miliar kemudian diikuti oleh PPN (9,94 persen), Pajak Lainnya (0,97 persen), Cukai (0,28 persen), dan PBB (0,14 persen). Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk memberikan kontribusi sebesar Rp574,55 miliar (80,42 persen), sedangkan kontribusi Bea Keluar sebesar Rp139,84 miliar (24,34 persen).

Realisasi PNBP sampai dengan triwulan iii 2023 sebesar Rp1.488,94 miliar atau 65,20 persen dari Pagu. Realisasi PNBP terdiri dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp595,11 miliar atau 144,13 persen dari Pagu, sedangkan Realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp893,83 miliar atau sebesar 47,78 persen dari Pagu.

Grafik 2.4 - Porsi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak s.d. Triwulan III 2023



Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

Analisis Growth Pendapatan Negara

Tabel 2.2- Perkembangan Penerimaan Perpajakan di Kepri (yoy)

Uraian	Realisasi (Rp miliar)		Growth (persen)
	s.d. Triwulan III TA 2022	s.d. Triwulan III TA 2023	
Pajak Dalam Negeri	6.606,26	6.499,39	-1,62
PPh	6.036,78	5.763,25	-4,53
PPN	517,03	645,88	24,92
PBB	19,26	9,25	-51,98
Cukai	8,22	18,15	120,77
Pajak Lainnya	24,96	62,87	151,84
Pajak Perdagangan Internasional	1.432,93	714,39	-50,15
Bea Masuk	690,56	574,54	-16,80
Bea Keluar	742,37	139,84	-81,16

Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

Sampai dengan triwulan III, pos Penerimaan Perpajakan tumbuh negatif 10,27 persen. Pertumbuhan negatif terjadi pada kedua pos Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak Dalam Negeri (minus 1,62 persen) dan Pajak Perdagangan Internasional (minus 50,15 persen) sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2 berikut.

Kinerja Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan (yoy). Namun demikian, terdapat pertumbuhan pada beberapa pos penerimaan Pajak Dalam



Negeri. Jika dilihat dari tiap-tiap pos, Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan *yoy* tertinggi (151,84 persen), kemudian diikuti oleh Cukai (120,77 persen) dan PPN (24,92 persen), sedangkan untuk pos lainnya mengalami pertumbuhan kontraktif yaitu PPh (minus 4,53 persen), bea masuk (minus 16,80 persen), PBB (minus 51,98 persen), dan bea keluar (minus 81,16 persen).

Pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai dampak penerimaan insidental, sedangkan Cukai mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai dampak realisasi Cukai pada KPUBC Batam sebesar 134,56 persen yang didominasi oleh cukai hasil tembakau sebesar Rp14,11 miliar. PPN mengalami pertumbuhan sebagai dampak aktivitas perekonomian yang mulai tumbuh kembali seperti semula.

Perlambatan kinerja Pajak Penghasilan (PPh) disebabkan oleh dua hal yaitu kebijakan pajak tidak berulang dan moderasi komoditas migas. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan perpajakan tidak berulang yang diselenggarakan pada tahun 2022. PPS menyebabkan tingginya realisasi PPh non-Migas tahun 2022 yang berlaku sebagai *benchmark* untuk mengukur kinerja perpajakan tahun 2023, sehingga pada 2023 kinerja perpajakan khususnya PPh melambat. Di sisi lain, moderasi komoditas minyak bumi dan gas alam berdampak pada PPh Migas nasional yang turut berkontraksi, meskipun demikian untuk regional Kepri terjadi peningkatan realisasi PPh Migas yang cukup signifikan (367,45 persen).

Pertumbuhan negatif realisasi perpajakan pada OM-SPAN yang juga sejalan dengan realisasi penerimaan neto Kanwil DJP Kepri periode s.d 30 September 2023 yaitu mencapai Rp7,11 triliun atau 83,66 persen dari target (turun 1,50 persen *yoy*). Berdasarkan jenis pajaknya, terjadi pertumbuhan pada beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 21 (21,46 persen *yoy*), PPh Pasal 25/29 Badan (11,06 persen *yoy*), dan PPN Dalam Negeri (37,49 persen *yoy*). Pertumbuhan realisasi PPh salah satunya disebabkan sejak Juli 2023 mulai diberlakukan PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan sehingga mulai semester II 2023 mulai diberlakukan pajak natura.

Realisasi Bea Masuk mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 16,80 persen (*yoy*), sedangkan Bea Keluar mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 81,16 persen (*yoy*). Pertumbuhan negatif realisasi Bea Keluar dikarenakan penurunan volume ekspor CPO dan turunannya.

Dari sisi PNBP, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU mencatatkan realisasi yang menggembirakan dengan pertumbuhan positif. PNBP Lainnya telah melampaui target dengan pertumbuhan sebesar 14,44 persen (*yoy*) dan Pendapatan BLU juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,89 persen (*yoy*). Dari sisi PNBP lainnya, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan (*yoy*) realisasi akun Pendapatan Lainnya, antara lain: Pendapatan Visa (187,61 persen), Pendapatan Paspor (53,94 persen), dan Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (6,21 persen). Pertumbuhan Pendapatan BLU ditopang oleh berubahnya status tiga satker menjadi BLU di lingkup Kepri pada tahun 2023, yaitu Poltek Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang.

Kontribusi Penerimaan Sektoral

Sampai dengan triwulan III 2023, dari kelima sektor dominan yang ada, secara kumulatif Industri Pengolahan menjadi sektor penyumbang penerimaan perpajakan terbesar yaitu 43,04 persen (Rp3.063,40 miliar), kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi

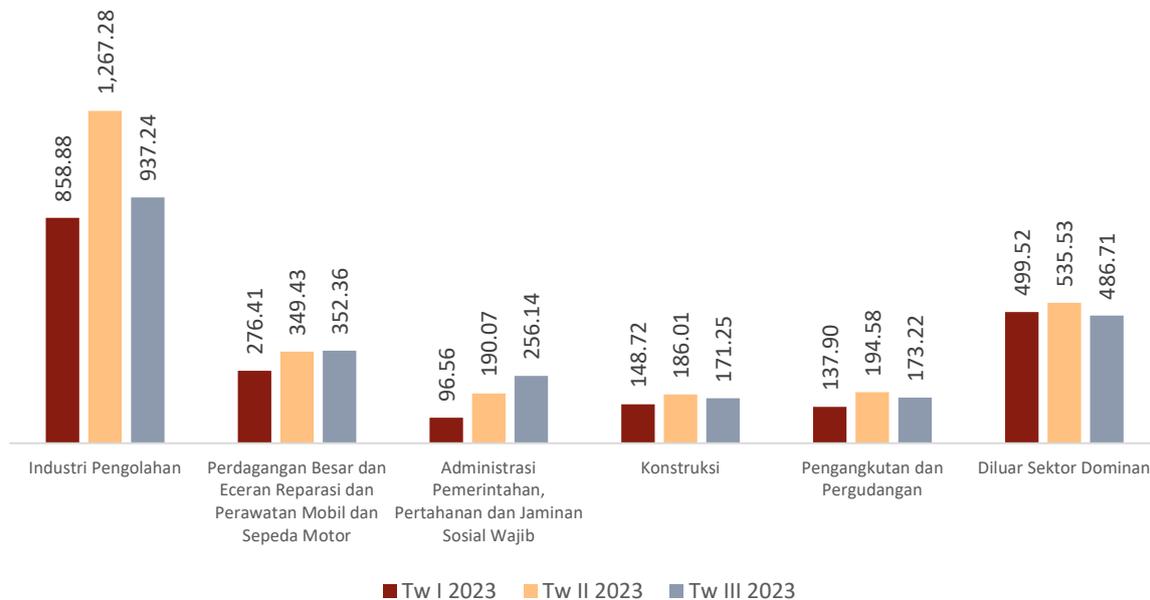


dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu 13,74 persen (Rp978,21 miliar), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,63 persen (Rp542,77 miliar).

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha mengalami pertumbuhan realisasi (yoy), diantaranya: Industri Pengolahan (5,88 persen), Perdagangan (minus 0,15 persen), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (35,26 persen), Konstruksi (10,83 persen), dan Transportasi dan Pergudangan (21,58 persen).

Secara q-to-q, pertumbuhan terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (34,76 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,84 persen), sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan minus yaitu Konstruksi (minus 7,94 persen), Di Luar Sektor Dominan (minus 9,12 persen), Pengangkutan dan Pergudangan (minus 10,98 persen), dan Industri Pengolahan (minus 26,04 Persen). Porsi realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan sektor dominan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5 – Penerimaan per Sektor Dominan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 2023 (Rp miliar)



Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2023 (data diolah)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan masing-masing pertumbuhan maupun perlambatan realisasi perpajakan per sektor, yaitu sebagai berikut.

- Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPh Non Migas yang meningkat sekitar Rp200 miliar khususnya PPh Final, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26;
- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPh Non Migas khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21;
- Sektor Administrasi Pemerintahan mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPN yang meningkat sekitar Rp130 miliar dari tahun sebelumnya;



- d. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPh Non Migas Khususnya pada PPh Pasal 21 yang memiliki selisih sekitar Rp80 miliar dengan PT SMOE berkontribusi sekitar Rp50 miliar lebih besar (yoy) pada setoran jenis PPh Pasal 21;
- e. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPh Non Migas khususnya pada setoran PPh Pasal 25/29 Badan sekitar Rp50 miliar dan PPh Pasal 21 sekitar Rp21 miliar; dan
- f. Penurunan signifikan pada Sektor Lainnya terjadi pada sektor Aktivitas Jasa Lainnya dan Sektor Pejabat Negara dan Karyawan, Pensiunan hal ini disebabkan oleh adanya Setoran PPS yang berasal dari sektor tersebut yang tidak berulang pada tahun ini .

Analisis Tax Ratio

Tax Ratio dalam arti luas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah perbandingan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPD SDA yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. *Tax Ratio* menunjukkan jumlah pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi *Tax Ratio*, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pajak dari pendapatan PDRB. Pertumbuhan PDRB sampai dengan triwulan III 2023 tidak diimbangi dengan pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dan PNBPD SDA. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi program PPS yang mampu mendongkrak realisasi Pendapatan Perpajakan tahun 2022.

Tax ratio nasional sampai dengan triwulan III 2023 (11,66 persen) mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan III 2022 (12,18 persen). Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Meskipun demikian, *tax ratio* sampai dengan triwulan III masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan *tax ratio* sampai dengan triwulan III 2021 (9,02 persen). Sedangkan *tax ratio* Kepri masih berada di angka 3,22 persen. Adapun perbandingan *tax ratio* Kepri, Regional Sumatera, dan Nasional sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 – Perbandingan Tax Ratio Kepri dengan Regional Sumatera dan Nasional

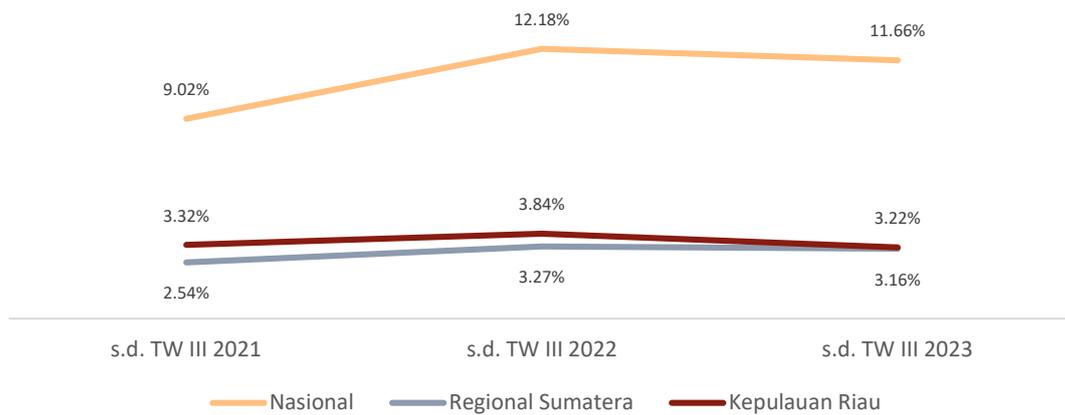
Wilayah	s.d TW III 2021			s.d TW III 2022			s.d TW III 2023		
	Pajak + PNBPD SDA (Rp T)	PDRB ADHB (Rp T)	Tax Ratio (%)	Pajak + PNBPD SDA (Rp T)	PDRB ADHB (Rp T)	Tax Ratio (%)	Pajak + PNBPD SDA (Rp T)	PDRB ADHB (Rp T)	Tax Ratio (%)
Nasional	1.129,88	12.521,74	9,02	1.722,27	14.143,49	12,18	1.777,47	15.243,56	11,66
Regional Sumatera	68,81	2.708,86	2,54	101,99	3.119,65	3,27	105,70	3.350,12	3,16
Kepri	6,73	202,54	3,32	8,67	225,81	3,84	7,85	243,92	3,22

Sumber: KFR Triwulan III 2021 dan 2022, ALCo Regional, ALCo Pusat, dan BPS 2023 (diolah)

Meskipun *Tax Ratio* Kepri masih terbilang rendah, hal ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan regional Sumatera yang hanya sebesar 3,16 persen pada triwulan III. Lebih lanjut apabila dilihat pada tren tiga tahun terakhir, kondisi *tax ratio* Kepri selalu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan *tax ratio* regional Kepri.



Grafik 2.6 – Perbandingan Tax Ratio Nasional, Regional Sumatera, dan Kepri



Sumber: KFR Triwulan III 2021 dan 2022, ALCo Regional, ALCo Pusat, dan BPS 2023 (diolah)

Sebagai tindak lanjut, kinerja Pendapatan Negara menunjukkan kondisi membaik. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak peniadaan program PPS terhadap kinerja perpajakan dan dampak perpindahan importasi propana dan butana dari Pertamina Tanjung Uban ke Pertamina Aceh pada Laporan KFR Tahunan 2023.

Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

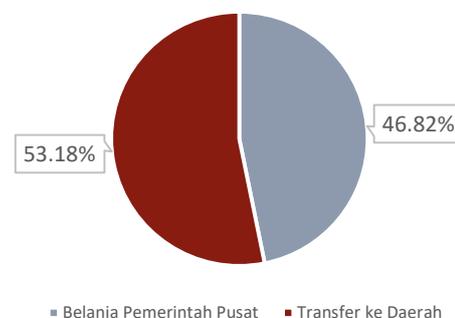
1. Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
2. Pada tahun 2023, terdapat tiga BLU baru di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.

2.1.2 Belanja Negara

Sampai dengan triwulan III 2023, Belanja Negara direalisasikan sebesar Rp10.958,03 miliar atau 66,63 persen yang terbagi ke dalam dua komponen yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Dari dua komponen tersebut, kontribusi terbesar ditopang oleh Transfer ke Daerah (53,18 persen), sedangkan Belanja Pemerintah Pusat memberi kontribusi sebesar 46,82 persen sebagaimana dalam Grafik 2.6.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5.130,29 miliar (60,42 persen), tetap terjaga meskipun masih berada di bawah 75 persen. Hal ini ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.508,69 miliar (71,15 persen), Belanja Barang

Grafik 2.7 - Porsi Realisasi Belanja Negara s.d. Triwulan iii 2023

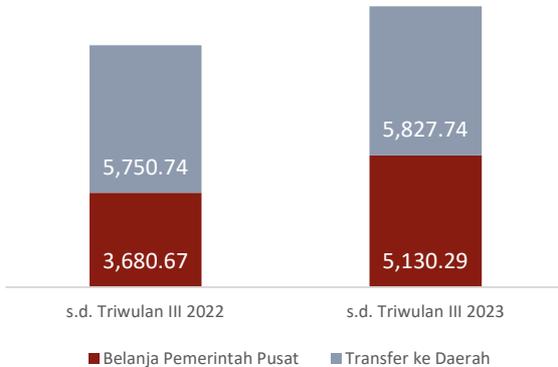


Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (diolah)



sebesar Rp2.500,19 miliar (65,96 persen), Belanja Modal sebesar Rp1.000,59 miliar (42,96 persen), Bantuan Sosial sebesar Rp2,93 miliar (63,77 persen), dan Belanja Lainnya sebesar Rp117,89 miliar (47,84 persen).

Grafik 2.8 - Perkembangan Realisasi Belanja Negara Triwulan III 2022 dan 2023 (Rp Miliar)



Sumber: GFS Tw III 2023 dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5.827,74 miliar (73,27 persen), menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan 1,34 persen (yoy). Realisasi TKD dibagi ke dalam lima pos, yaitu Dana Bagi Hasil sebesar Rp839,88 miliar (68,16 persen), Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.420,65 miliar (76,44 persen), Dana Transfer Khusus sebesar Rp1.329,19 miliar (67,60 persen), Dana Insentif Daerah sebesar Rp52,75 miliar (83,55 persen), dan Dana Desa sebesar Rp185,27 miliar (85,07 persen).

Analisis Growth Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 16,19 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan realisasi BPP sebesar 39,38 persen (yoy) dan TKD sebesar 1,34 persen (yoy). Seluruh pos BPP tumbuh positif (yoy), menunjukkan perbaikan kinerja penyerapan belanja APBN tingkat regional. Selama periode triwulan III 2023, Kanwil DJPb Kepri melakukan berbagai upaya yang terbukti efektif dalam melakukan percepatan penyerapan belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan monitoring progres penyerapan anggaran belanja penting & prioritas pada 12 K/L dengan alokasi pagu anggaran terbesar di wilayah Kepri melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III TA 2023.
2. Menyelenggarakan kegiatan *one on one meeting* dengan KPA satker beralokasi anggaran besar dalam rangka meningkatkan *engagement* & mendiskusikan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.
3. Pelaksanaan Kegiatan *One on One Meeting* dengan Satker dalam Rangka Pengawasan Belanja Pengendalian Inflasi Lingkup Kanwil DJPb Kepri pada tanggal 11 s.d. 12 September
4. Menyelenggarakan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gabungan Wilayah Kepri Semester I 2023 pada tanggal 27 Juli 2023

Dari sisi TKD, pertumbuhan realisasi TKD sebesar 1,34 persen menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi hingga merealisasikan belanja TKD. Percepatan pertumbuhan tergambar pada Dana Transfer Khusus (31,18 persen), dan Dana Desa (7,37 persen). Lebih lanjut, percepatan pertumbuhan Dana Transfer Khusus ditopang oleh kinerja DAK Fisik dengan pertumbuhan sebesar 46,42 persen dan DAK Non Fisik dengan pertumbuhan sebesar 25,21 persen. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan realisasi TKD terjadi pada Dana Insentif Daerah (minus 43,56 persen), Dana Bagi Hasil (minus 9,23 persen), dan Dana Alokasi Umum (3,54 persen).



Belanja Berdasarkan Fungsi

Tabel 2.4 – Realisasi Belanja Berdasarkan Sepuluh Fungsi s.d. Triwulan III 2023

Fungsi	Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	Realisasi (%)
Ekonomi	4.798,68	1.879,39	39,16
Pertahanan	1.533,34	966,79	63,05
Ketertiban dan Keamanan	1.282,89	922,94	71,94
Pelayanan Umum	672,57	435,27	64,72
Pendidikan	645,74	356,05	55,14
Perumahan dan Fasilitas Umum	286,55	189,18	66,02
Kesehatan	221,07	134,50	60,84
Lingkungan Hidup	97,46	65,27	66,97
Agama	90,31	68,94	76,34
Pariwisata dan Budaya	1,09	0,93	86,09

Sumber: MEBE dan OM-SPAN 2023 (data diolah)

Ditinjau dari fungsi pemerintahan, tiga fungsi dengan pagu Belanja Negara tertinggi terdapat pada fungsi Ekonomi (Rp4.798,68 miliar), Pertahanan (Rp1.533,34 miliar), dan Ketertiban dan Keamanan (Rp1.282,89 miliar). Adapun urutan realisasi Belanja terbesar sejalan dengan Pagu yaitu fungsi Ekonomi (Rp1.879,39 miliar), Pertahanan (Rp966,79 miliar), dan Ketertiban dan Keamanan (Rp922,94 miliar).

Jika ditinjau dari persentase realisasi terhadap Pagu, maka fungsi Pariwisata dan Budaya menjadi peringkat persentase realisasi terbesar (86,09 persen) disusul oleh Agama (76,34 persen) dan Ketertiban dan Keamanan (71,94 persen). Adapun rincian pagu dan realisasi masing-masing fungsi sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut.

Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga (K/L)

Terdapat sepuluh K/L dengan pagu belanja terbesar yang mencapai 89,03 persen dari total pagu seluruh satuan kerja lingkup Kepri. Sampai dengan triwulan III 2023, realisasi sepuluh K/L tersebut mencapai Rp4.338,14 miliar, atau sebanyak 86,43 persen dari total realisasi belanja K/L. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) merupakan Badan dengan Pagu Belanja terbesar yaitu Rp2.639,12 miliar dengan realisasi sebesar Rp948,25 miliar (35,93 persen). Kementerian/Lembaga dengan realisasi Belanja terbesar adalah Kementerian Pertahanan, yaitu dengan realisasi Belanja sebesar Rp966,79 miliar atau 63,05 persen. Dari sepuluh K/L besar tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi K/L dengan persentase realisasi terbesar, yaitu 75,50 persen dari Pagu sebesar Rp786,47 miliar (realisasi sebesar Rp593,78 miliar). Adapun rincian belanja sepuluh K/L terbesar sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 - Realisasi Belanja Sepuluh K/L Terbesar s.d. Triwulan III 2023

No.	Kementerian/Lembaga	Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	% Real
1	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2.639,12	948,25	35,93
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.674,03	636,03	37,99
3	Kementerian Pertahanan	1.533,34	966,79	63,05
4	Kepolisian Republik Indonesia	786,47	593,78	75,50
5	Kementerian Perhubungan	503,05	323,26	64,26
6	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi	388,84	187,71	48,27
7	Kementerian Agama	317,05	223,30	70,43
8	Kementerian Keuangan	293,18	182,50	62,25
9	Kementerian Hukum dan HAM RI	253,96	171,78	67,64
10	Kementerian Kesehatan	184,42	104,75	56,80
Jumlah		8.573,46	4.338,14	50,60
Pagu Belanja dan Realisasi Seluruh Satker Lingkup Kanwil DJPb Kepri		9.629,70	5.019,28	52,12

Sumber : MEBE dan OM-SPAN (diolah), 2023



Tabel 2.6 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 10 K/L Terbesar s.d. Triwulan III 2023

Uraian	Seluruh 40 K/L (Rp miliar)	10 K/L Terbesar (Rp miliar)	Proporsi (%)
Perbandingan Total Pagu	9.629,70	8.573,46	89,03
Perbandingan Total Realisasi	5.019,28	4.338,14	86,43

Sumber : MEBE dan OM-SPAN (diolah), 2023

Apabila Pagu 10 K/L terbesar dibandingkan dengan Pagu seluruh 40 K/L yang ada di Kepri, dapat diketahui bahwa Pagu 10 K/L terbesar sangat mendominasi dengan proporsi sebesar 89,03 persen. Hal ini sejalan dengan proporsi realisasi 10 K/L terbesar yang juga mendominasi seluruh 40 K/L yaitu sebesar 86,43 persen.

Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Sampai dengan triwulan III 2023, total realisasi anggaran belanja Prioritas Nasional (PN) di Kepri sebesar Rp1.274,08 miliar dari total pagu Rp2.497,40 miliar (51,02 persen) dengan realisasi capaian output sebesar 74,30 persen. **PN dengan Pagu dan Realisasi terbesar adalah PN 5** “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar” yaitu Rp857,43 miliar yang telah direalisasikan sebesar Rp415,72 miliar atau 48,48 persen dari Pagu. PN ini telah dapat meraih capaian output sebanyak 10.930 dan realisasi fisik sebanyak 3.997 atau 36,57 persen dari target. **PN dengan raih capaian output tertinggi adalah PN 6** “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim” dengan volume 1.050.816, realisasi fisik sebanyak 906.036, dan dengan persentase sebesar 86,22 persen. Berikut kami sajikan data realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 – Realisasi PN di Kepri s.d. 30 September 2023

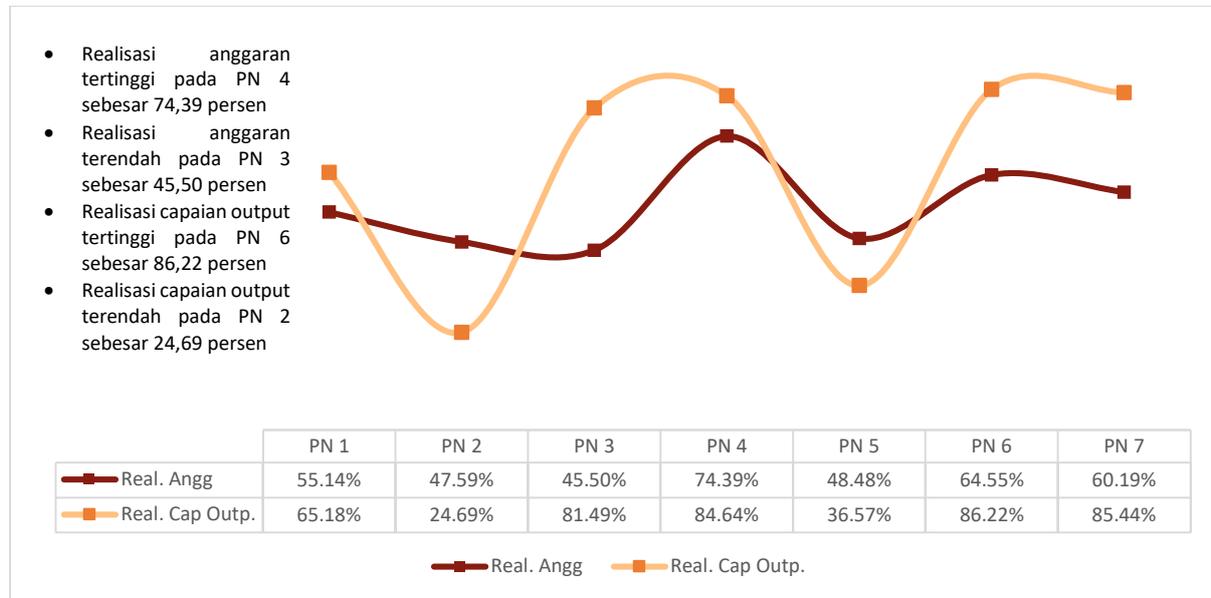
No	Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
		Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	%	Volume	Real. Fisik	%
1	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	139,30	76,80	55,14	825.482	538.066,53	65,18
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	644,39	306,67	47,59	116.332	28.718,96	24,69
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	313,76	142,76	45,50	136.130	110.935,54	81,49
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	34,63	25,76	74,39	9.171	7.762,60	84,64
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	857,43	415,72	48,48	10.930	3.997,00	36,57
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	15,00	9,68	64,55	1.050.816	906.036,00	86,22
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	492,90	296,69	60,19	9.189	7.850,91	85,44
Total		2.497,40	1.274,08	51,02	2.158.050	1.603.367,54	74,30

Sumber : MEBE (diolah), 2023



Realisasi anggaran masih belum sejalan dengan realisasi capaian output. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya jeda waktu antara realisasi proyek kegiatan dengan waktu pelaporan dan pertanggungjawabn anggaran, adanya gagal lelang, proyek yang kegiatan yang ditumpuk pada triwulan IV hingga ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan.

Grafik 2.9 – Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Output Belanja PN di Kepri s.d. Triwulan III 2023



Sumber : Mebe (diolah), 2023

PN 1 - Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pada PN 1 tercapai realisasi anggaran sebesar 55,14 persen dan capaian output sebesar 65,18 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Penyelenggaraan Pemukiman dan Bangunan Gedung (Rp38,60 miliar; pagu Rp67,97 miliar), dengan output yaitu satu unit prasarana bidang perumahan dan pemukiman dimana persentase capaian fisik masih 75 persen dikarenakan masih terdapat gap terkait pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses.

PN 2 - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pada PN 2 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 47,59 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 24,69 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan (Rp301,80 miliar; pagu Rp486,18 miliar), dengan output yaitu 16 km jalan dimana persentase capaian fisiik masih 12,08 km dan pertanggungjawaban keuangan masih dalam proses.

PN 3 - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Pada PN 3 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 45,50 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 81,49 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi (Rp24,45 miliar; pagu Rp82,84 miliar), dengan output yaitu satu unit prasarana bidang perguruan tinggi dimana persentase capaian fisiik masih 74,98 persen dikarenakan kegiatan amsih dalam tahap pelaksanaan.



PN 4 - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Pada PN 4 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 74,39 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 84,64 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Pembinaan Haji (Rp6,61 miliar; pagu Rp6,94 miliar), dengan output yaitu 216 orang yang dibina dimana persentase capaian fisik masih 89 persen.

PN 5 - Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pada PN 5 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 48,48 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 36,57 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Penyediaan Akses Rumah Layak Huni (Rp92,31 miliar; pagu Rp99,64 miliar), dengan output yaitu 2.524 unit Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana persentase capaian fisik masih 48,83 persen. Gap yang terjadi cukup tinggi dikarenakan progress keuangan lebih besar daripada progress fisik dan terdapat tiga lokasi yang akan mulai kontrak di bulan Oktober.

PN 6 - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pada PN 6 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 64,55 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 86,22 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Rehabilitasi Hutan (Rp6,04 miliar; pagu Rp8,20 miliar), dengan output yaitu 220 Ha kawasan dan telah tercapai 161 Ha (75,28 persen).

PN 7 - Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pada PN 7 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 60,19 persen dengan capaian output telah terealisasi sebesar 85,44 persen. Kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Laut (Rp99,51 miliar; pagu Rp179,68 miliar), dengan output yaitu 30 unit sarana dengan progress capaian output sebesar 52,43 persen dan pertanggung jawaban keuangan masih dalam proses.

Rekomendasi Kebijakan Belanja

1. Realisasi Belanja Modal triwulan III 2023 masih sangat kecil yaitu sebesar 42,96 persen, diharapkan seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk menyusun strategi agar dapat mengantisipasi gagal kontrak dan keterlambatan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal;
2. Realisasi TKD masih sangat rendah khususnya DAK Fisik sebesar 51,80 persen dan DBH sebesar 68,16 persen, sehingga diharapkan peran pemerintah daerah dalam mengawal penyaluran dan mempercepat penyerapan TKD ke depannya;

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Pada APBN regional Kepri tahun 2023, kebijakan defisit anggaran kembali diambil dengan besaran defisit sebanyak Rp4.952,78 miliar. Sampai dengan triwulan III 2023, realisasi anggaran mencatat defisit sebanyak Rp2.255,31 miliar. Defisit tersebut sebesar 45,54 persen dari anggaran



defisit yang ditetapkan. Realisasi defisit yang besar disumbang oleh besarnya realisasi belanja negara.

Meskipun realisasi Belanja masih sebesar 66,63 persen, namun defisit anggaran telah terealisasi sebesar Rp2.255,31 miliar dengan pertumbuhan yang sangat tinggi (yoy) yaitu 1.996,68 persen. Beberapa hal perlu diantisipasi, khususnya kinerja penerimaan pada triwulan IV agar mampu mencapai target dan mampu menopang Belanja sehingga defisit dapat terjadi sesuai Pagu yang direncanakan.

2.1.4 Analisis Prognosis APBN Regional

Kanwil DJPb Kepri melakukan prognosis terhadap pendapatan dan belanja dengan menggunakan *trend analysis*. Berdasarkan prognosis APBN s.d. triwulan III sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.8 berikut diperoleh deviasi pendapatan sebesar minus 6,05 persen dan deviasi belanja sebesar minus 12,15 persen.

Tabel 2.8 – Deviasi Realisasi APBN s.d. Triwulan III 2023 Lingkup Kepri

Uraian	Target/ Pagu	Prognosis s.d TW III		Realisasi s.d TW III		Deviasi s.d. TW III	
		Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%
Pendapatan Negara	11.492,97	9.263	80,60	8.702,72	75,72	-560,28	-6,05
Belanja Negara	16.445,75	12.473	75,84	10.958,03	66,63	-1.514,97	-12,15

Sumber: OM-SPAN (diolah dengan metode Trend Analysis), 2023

Hasil prognosis lebih lanjut, pendapatan hingga akhir tahun 2023 diproyeksikan dapat direalisasikan sebesar Rp12.186 miliar (103 persen) sedangkan belanja diproyeksikan dapat direalisasikan sebesar Rp14.351 miliar (87,26 persen). Adapun hasil proyeksi secara rinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9 – Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV 2023 Lingkup Kepri

Uraian	Target/ Pagu	Realisasi s.d TW III		Prognosis s.d TW IV	
		Rp M	%	Rp M	%
Pendapatan Negara	11.492,97	8.702,72	75,72	12,186	106,03
Belanja Negara	16.445,75	10.958,03	66,63	14,351	87,26

Sumber: OM-SPAN (diolah dengan metode Trend Analysis), 2023

Persentase deviasi antara prognosis Pendapatan dan Belanja Negara dengan realisasinya diharapkan tidak lebih dari 10 persen. Berdasarkan persentase deviasi sampai dengan triwulan III 2023 sebesar minus 6,05 persen untuk Pendapatan Negara dan minus 12,15 persen untuk Belanja Negara maka target deviasi kurang dari 10 persen dapat diusahakan.



2.2 Analisis Laporan Realisasi APBD

Sampai dengan 30 September 2023, APBD surplus sebesar Rp970,68 miliar. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp9.344,65 miliar atau meningkat 13,85 persen (yoy). Disisi lain, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp8.373,97 miliar atau meningkat 14,42 persen (yoy) sebagaimana tergambar pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2023 (Rp miliar)

Uraian	Realisasi s.d. Triwulan III TA 2022			Realisasi s.d. Triwulan III TA 2023			%Growth
	Target	Realisasi	% Real.	Target	Realisasi	% Real.	
Pendapatan Daerah	12.974,98	8.207,55	63,26	13.755,70	9.344,65	67,93	13,85
PAD	4.040,10	2.680,92	66,36	4.282,73	3.118,67	72,82	16,33
Pendapatan Transfer	8.896,02	5.508,18	61,92	9.441,48	6.208,02	65,75	12,71
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,85	18,46	47,50	31,49	17,96	57,03	(2,68)
Belanja Daerah	13.949,62	7.318,37	52,46	14.432,58	8.373,97	58,02	14,42
Belanja Operasi	10.427,71	6.086,83	58,37	10.698,79	6.546,27	61,19	7,55
Belanja Pegawai	4.729,34	3.187,44	67,40	5.042,39	3.436,57	68,15	7,82
Belanja Barang Dan Jasa	4.908,03	2.558,01	52,12	4.936,86	2.708,57	54,86	5,89
Belanja Bunga	2,50	0,00	0,00	13,14	6,75	51,39	N/A
Belanja Subsidi	2,12	0,64	30,14	2,45	1,81	73,90	183,54
Belanja Hibah	728,49	335,80	46,10	690,36	387,94	56,19	15,53
Belanja Bantuan Sosial	57,23	4,94	8,63	13,58	4,62	34,04	(6,35)
Belanja Modal	2.297,02	903,42	39,33	2.429,07	969,56	39,91	7,32
Belanja Modal	2.297,02	903,42	39,33	2.429,07	969,56	39,91	7,32
Belanja Tidak Terduga	25,87	3,17	12,24	93,05	8,33	8,96	163,25
Belanja Tidak Terduga	25,87	3,17	12,24	93,05	8,33	8,96	163,25
Transfer	1.199,01	324,95	27,10	1.211,66	849,80	70,14	161,51
Belanja Bagi Hasil	766,47	9,58	1,25	1.211,66	523,64	43,22	5367,34
Belanja Bantuan Keuangan	432,54	315,38	72,91	0,00	326,16	N/A	3,42
Surplus/(Defisit)	-974,64	889,19	-91,23	-676,87	970,68	-143,41	9,16
Pembiayaan	1.043,23	418,10	40,08	676,87	502,79	74,28	20,26
Penerimaan Pembiayaan	1.045,23	419,10	40,10	761,21	548,38	72,04	30,85
Pengeluaran Pembiayaan	2,00	1,00	50,00	84,34	45,59	54,05	4458,56
SILPA/SIKPA	68,59	1.307,29	1.905,90	0,00	1.473,47	N/A	N/A

Sumber: GFS Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2023 (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah Konsolidasi

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp9.344,65 miliar atau 67,93 persen dari Pagu dan mengalami peningkatan 13,85 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp6.208,02 miliar (66,43 persen dari Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp3.118,67 miliar (33,37 persen dari Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.



PAD dapat direalisasikan sebesar Rp3.118,67 miliar atau 72,82% dari target. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu 83,34 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 11,52 persen. Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,99 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling kecil yaitu sebesar 1,15 persen. Pajak Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp2,60 triliun, atau 75,96 persen dari Target. **Pajak Daerah dengan realisasi terbesar** adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp370,92 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp357,96 miliar, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp329 miliar. Namun demikian, jika melihat jenis Pajak Daerah milik Kota/Kabupaten dan mengeluarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak terdapat disemua Kota/Kab lingkup Kepri, maka Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp254,11 miliar, PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp236,23 miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp196,26 miliar.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai kontributor terbesar Pajak Daerah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar Rp207 miliar pada triwulan III 2020, Rp211 miliar pada triwulan III 2021, dan Rp235 miliar pada triwulan III 2022 sebagai mana tertera pada Grafik 2.10. PPJ adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun disediakan oleh pihak lain. Peningkatan PPJ disebabkan oleh banyaknya pengguna baru listrik dan peningkatan daya oleh pengguna serta tingginya tarif yang dikenakan yaitu sebesar 7 persen untuk rumah tangga dari tarif maksimal yang dapat ditetapkan oleh Pemda adalah 10 persen. Tarif ini bahkan lebih besar dari tarif PPJ Provinsi Riau sebesar 6 persen, Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3 s.d 4 persen untuk rumah tangga.

Grafik 2.10 – Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan s.d. Triwulan III 2023



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah lingkup Kepri, 2023 (diolah)

Retribusi Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp124,40 miliar atau 53,33 persen dari Target. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi Retribusi terbesar, yaitu Rp35,98 miliar. Kemudian diikuti oleh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan



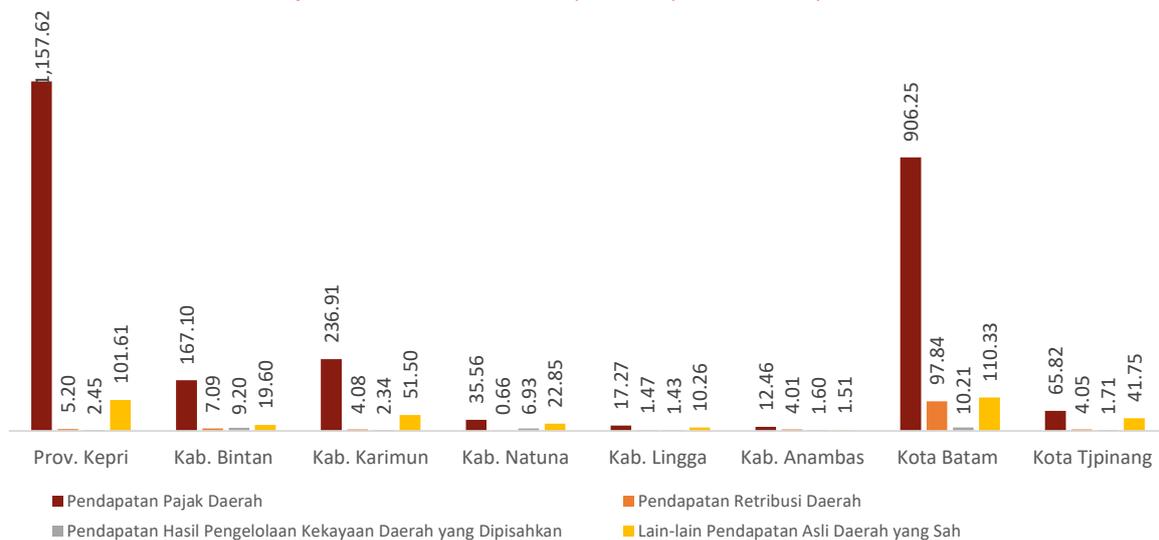
realisasi sebesar Rp29,14 miliar dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan realisasi sebesar Rp28,66 miliar. Kota Batam adalah kontributor terbesar bagi Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing karena Batam merupakan wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah industri dan investor asing.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp35,86 miliar atau 58,06 persen dari Target. Pendapatan tersebut merupakan hasil dari Bagian Laba yang dibagikan kepada pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Di lain sisi, tidak terdapat Penerimaan lainnya dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lingkup Kepri tidak melakukan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selain penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Merujuk pada Grafik 2.11, PAD dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp359,41 miliar atau 63,48 persen dari Target. Realisasi Pendapatan terbesar dari Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp295,01 miliar. Kemudian diikuti oleh Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp31,19 miliar, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp6,51 miliar.

Secara parsial, hanya Pajak Daerah yang dapat direalisasikan lebih dari 75 persen dari Target. Realisasi ketiga sumber PAD lainnya kurang dari 64 persen dari Target. Seharusnya pada akhir Triwulan III, setiap Pendapatan dari PAD paling sedikit dapat direalisasikan sebesar 75 persen dari Target. Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan untuk dapat merealisasikan setiap komponen PAD mencapai Target yang ditentukan.

Grafik 2.11 – Breakdown PAD per Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)



Sumber: GFS Semester I 2023 (diolah)

Analisis Growth Pendapatan Daerah

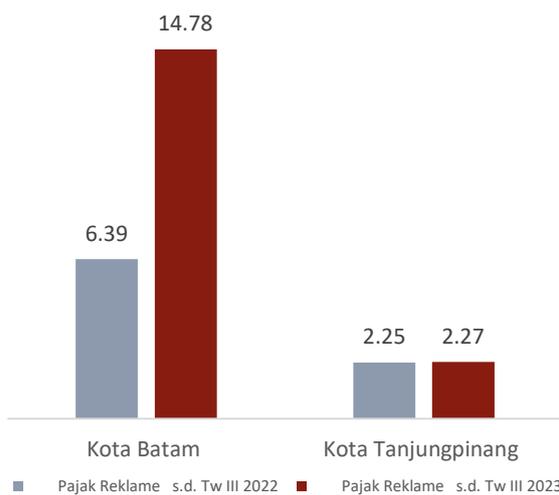
Realisasi Pendapatan Daerah tumbuh sebesar 13,85 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PAD yang tumbuh sebesar 16,33 persen dan Pendapatan Transfer yang tumbuh sebesar 0,13 persen. Pertumbuhan tersebut membuat PAD memberikan kontribusi sebesar 36,10 persen terhadap Pendapatan Daerah. Pada periode Triwulan III 2022, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 32,66 persen. Hal ini menunjukkan pada Triwulan III 2023 terdapat **peningkatan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah.**



Pertumbuhan PAD ditopang oleh meningkatnya Pajak Daerah sebesar Rp359,95 miliar atau 16,08 persen, Retribusi Daerah meningkat Rp46,77 miliar atau 60,26 persen, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp32,12 miliar atau 9,82 persen (yoy). Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga mendorong PAD tumbuh sebesar 16,33% persen (yoy). Namun demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh minus sebesar -2,96 persen.

Adapun peningkatan Pendapatan Pajak Daerah ditopang dari peningkatan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak BBNKB. Pajak Hotel meningkat sebesar Rp82,93 miliar atau 104,67 persen, Pajak Reklame sebesar Rp5,34 miliar atau sebesar 80,46 persen, Pajak Air Tanah meningkat sebesar Rp52,29 juta atau 87,25 persen, Pajak Hiburan meningkat sebesar Rp8,24 miliar atau 50,54 persen, dan Pajak Restoran meningkat sebesar Rp20,43 miliar atau 33,84 persen (yoy). Dengan demikian, peningkatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kepri telah kembali pulih.

Grafik 2.12 – Pajak Reklame Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (Rp Miliar)



Sumber: Bapenda Kota Tanjungpinang dan Bapenda Kota Batam, 2023 (diolah)

Lebih lanjut, sebagai mana tertera pada Grafik 2.12, peningkatan signifikan atas realisasi Pajak Reklame terjadi pada Kota Batam yaitu meningkat sebesar Rp8,39 miliar atau 131 persen. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan tarif Pajak Reklame pada September 2022 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2023. Hal ini dikarenakan penerapan tarif reklame masih menggunakan peraturan Walikota Batam tahun 2011 sehingga tarif reklame yang berlaku dinilai terlalu rendah bahkan lebih rendah dibandingkan tarif reklame Kota Tanjungpinang. Sehingga, dengan penerapan peraturan baru tersebut, tarif reklame meningkat hingga 60 persen.

Disisi lain, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meningkat tajam pada Triwulan I dan Triwulan II 2023, justru mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif pada triwulan III 2023 yaitu sebesar (-2,73 persen). Hal ini didukung dengan kebijakan pemda dalam memberikan diskon tarif PBB untuk percepatan pengumpulan pendapatan dari PBB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Agustus hingga Oktober 2022, Pemerintah Kota Batam memberikan keringanan 10 persen untuk pokok piutang PBB dari tahun 1994 hingga 2021. Oleh karena itu pendapatan PBB menjadi meningkat. Selain itu upaya penagihan aktif, menyampaikan informasi program keringanan melalui persatuan pengusaha, hingga mendatangi wajib pajak dan memberikan surat peringatan kewajiban WP. Hal ini berhasil meningkatkan penerimaan PBB pada periode Triwulan III 2022.



2. Pada Tahun 2023, Pemko Batam kembali memberikan diskon 10 persen bagi WP yang membayar pada Triwulan I 2023. Kemudian memberikan diskon 5 persen bagi WP yang membayar pada Triwulan II 2023. Oleh karena itu, terjadi peningkatan signifikan terhadap penerimaan PBB pada Triwulan I dan Triwulan II 2023. Namun demikian, dampaknya pendapatan PBB s.d triwulan III 2023 menjadi turun, karena WP telah membayar pada triwulan I dan triwulan II dan mendapatkan keringanan diskon 10 persen dari tagihan PBB. Walaupun pada triwulan III pendapatan PBB menurun, Pemko Batam mendapatkan keuntungan dari percepatan pembayaran PBB oleh WP pada Triwulan I dan Triwulan II. Pendapatan PBB tersebut dapat langsung digunakan oleh pemerintah kota untuk membiayai belanja.

Pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB, berupa potongan harga sebesar 50 persen bagi warga yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis atau dalam program daerah (Proda) dengan luas maksimal 600 M2. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan BPHTB sebesar Rp13,97 miliar atau sebesar 9 persen.

Disisi Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan retribusi dengan peningkatan tertinggi, yaitu meningkat sebesar Rp26,94 miliar atau 298,06 persen (yoy). Hal ini disebabkan mulai meningkatnya pembangunan konstruksi terutama di Kota Batam. Selain itu, pemerintah daerah menertibkan izin mendirikan bangunan atau sekarang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan-bangunan terutama bangunan bisnis seperti pasar, toko, ruko dll.

Pendapatan Retribusi dengan Peningkatan tertinggi kedua adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yaitu meningkat sebesar Rp20,98 miliar atau 272,99%. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tenaga kerja asing yang bekerja di lingkup Kepri. Kemudian peningkatan pendapatan Retribusi signifikan terdapat pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yaitu sebesar Rp2,30 miliar atau 71,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan keluar masuk penumpang atau wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Namun demikian, terdapat beberapa pendapatan Restribusi yang mengalami pertumbuhan minus dengan angka yang signifikan, seperti Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang turun sebesar Rp1,45 miliar atau -98,48 persen, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang turun sebesar Rp5,87 miliar atau -69,70 persen.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -2,96%. Hal ini disebabkan oleh turunnya realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp291 juta. Selain itu, pada periode Triwulan III 2023 tidak terdapat Pendapatan dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMN, yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp803 juta pada periode Triwulan II 2022.

Rekomendasi Pendapatan

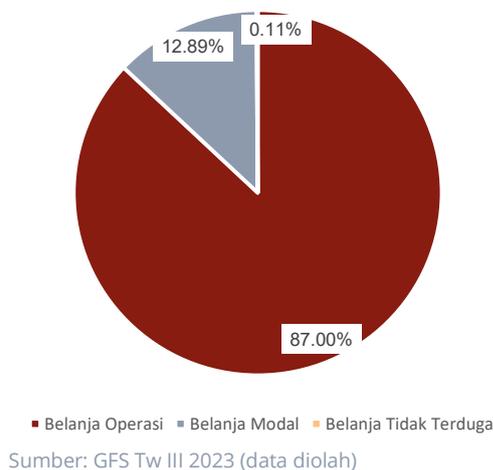
1. Pemerintah Daerah perlu memetakan, mengevaluasi, dan melakukan upaya percepatan pengumpulan pendapatan terhadap jenis Pendapatan dengan realisasi yang belum mencapai 75 persen dari Target dan Pendapatan dengan pertumbuhan negatif dibandingkan realisasi yoy.



2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar minus 2,96 persen. Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong dan mengevaluasi kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.
4. Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.
5. Melalui hasil FGD dengan pemerintah daerah lingkup Kepri, diketahui bahwa tiap pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait perpajakan untuk disahkan dan menjadi dasar pemungutan perpajakan, sesuai dengan undang-undang HKPD. Penetapan peraturan perpajakan dan retribusi menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat optimal. Pemerintah daerah agar terus secara intensif melakukan percepatan penyelesaian peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan, yang akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah masing-masing.

2.2.2 Belanja Daerah Konsolidasi

Grafik 2.13 – Porsi Belanja APBD di Kepri
s.d. Triwulan iii 2023



Belanja Daerah Konsolidasi dapat direalisasikan sebesar Rp8.373,97 miliar atau 58,02 persen dari Pagu dengan porsi sebagai mana Grafik 2.13.

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp6.546,27 miliar atau 61,19 persen dari Pagu. Belanja Subsidi merupakan Belanja Operasional dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu 73,90 persen sedangkan Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi Rupiah tertinggi yaitu sebesar Rp3.436,57 miliar.

Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp969,56 miliar atau 39,91 persen dari pagu. Belanja Modal dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp519,83 miliar atau 12,09% dari pagu. Berdasarkan persentase realisasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Modal dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu sebesar 33,08% dari pagu dengan nilai realisasi sebesar Rp21,37 miliar.

Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp8,33 miliar atau 8,96 persen dari pagu. Realisasi tersebut sangat rendah mengingat periode anggaran sudah melewati Triwulan III. Namun demikian, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majeure*, misalnya penanggulangan bencana alam dll.



Disisi lain, rendahnya realisasi Belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal *force majeure* lainnya.

Transfer terdiri dari Transfer/Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil ke Desa dapat direalisasikan sebesar Rp6,12 miliar atau hanya 0,51 persen dari Pagu. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp325,16 miliar. Transfer Bantuan Keuangan tidak mempunyai target di awal tahun.

Pertumbuhan Belanja Daerah

Belanja Daerah tumbuh 14,42 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 7,55 persen, Belanja Modal sebesar 7,32 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 163,25 persen, dan Transfer sebesar 161,51 persen.

Pada Belanja Operasional, pertumbuhan realisasi secara nominal tertinggi pada Belanja Pegawai, yaitu sebesar Rp249,13 miliar. Kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp150,56 miliar. Dilihat dari persentase pertumbuhan, Belanja Bunga menjadi Belanja dengan persentase pertumbuhan tertinggi karena pada periode Triwulan III 2022 tidak terdapat realisasi, sedangkan pada periode Triwulan III 2023 terdapat realisasi sebesar Rp6,75 miliar. Selain itu, Belanja Subsidi juga menjadi Belanja dengan persentase pertumbuhan tertinggi yaitu tumbuh sebesar 183,54 persen atau sebanyak Rp1,81 miliar.

Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan pertumbuhan sebesar Rp56,07 miliar atau 12,09 persen. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp13,61 miliar atau 6,34 persen. Ditinjau dari persentase pertumbuhan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menjadi belanja dengan persentase pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 33,08 persen atau sebesar Rp5,31 miliar. Namun demikian, terdapat pertumbuhan negatif pada beberapa Belanja Modal, yaitu Belanja Modal Tanah yang tumbuh negatif sebesar -62,86 persen atau Rp4,85 miliar, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tumbuh negative sebesar -2,36 persen atau Rp4,75 miliar.

Rekomendasi Belanja

1. Realisasi Belanja Daerah masih rendah, yaitu kurang dari 50 persen. Idealnya pada Triwulan III, realisasi Belanja Daerah telah mencapai 75 persen dari Pagu Belanja Daerah. Realisasi Belanja Modal masih dibawah 40 persen dari Pagu Belanja. Agar Belanja Daerah dapat memberikan dampak sebagai stimulus bagi perekonomian, pemerintah daerah agar melakukan upaya percepatan realisasi Belanja Daerah. Upaya percepatan juga perlu dilakukan untuk menghindari Belanja Daerah tidak terserap maksimal hingga akhir tahun.

2.2.3 Surplus/Defisit

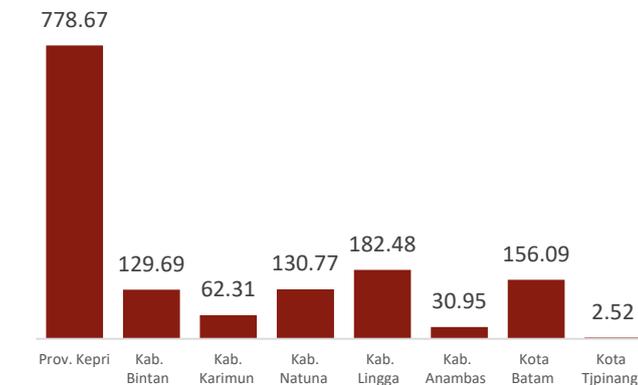
APBD 2023 dianggarkan defisit sebesar Rp3.012.89 miliar, namun demikian pada periode Triwulan III 2023 APBD mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp970,68 miliar. Surplus tersebut terjadi karena Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 72,82 persen namun realisasi Belanja Daerah masih rendah, hanya 48,37 persen. Seharusnya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kelebihan kas dari Pendapatan Daerah untuk melakukan penyerapan anggaran.



2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pemerintah Daerah telah menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp84,33 miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp761,21 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp84,34 miliar. Pada Periode triwulan III 2023, realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp548,38 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp45,59 miliar. Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota, 4 (empat) kabupaten/kota merealisasikan pembiayaan, dengan menggunakan SILPA. 3 (tiga) Kabupaten/kota lainnya tidak merealisasikan pembiayaan dalam bentuk apapun. Pemerintah Kepri juga merealisasikan pembiayaan namun dalam bentuk Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan dalam bentuk pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kepri.

Grafik 2.14 – Penggunaan SILPA per Kabupaten/Kota (Rp Miliar)



Sumber: GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Kepri, mayoritas belanja negara masih dibiayai oleh pendapatan transfer pemerintah pusat.



Tabel 2.11 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagai mana Tabel.2.11. IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

$$[IKF I = PAD/Total\ Pendapatan]$$

Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk Dana Bagi Hasil.

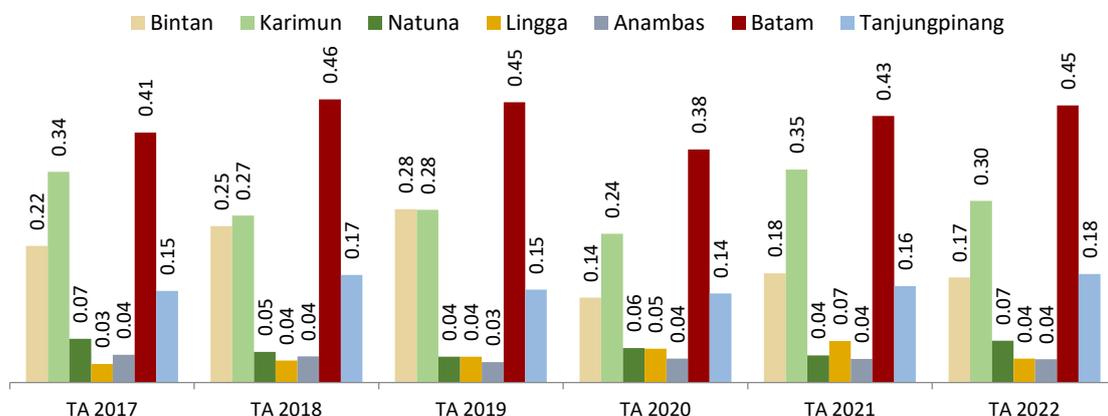
$$[IKF II = (PAD+DBH)/Total\ Pendapatan]$$

Kemudian, tingkat kemandirian tersebut digolongkan dalam beberapa kluster sebagaimana tabel 2.11. Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:

a. Indeks Kemandirian Fiskal I

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF I dari tahun 2017 s.d 2022 sebagaimana Grafik 2.15 menunjukkan bahwa Mayoritas Kabupaten/Kota di lingkup Kepri masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada kluster “Menuju Kemandirian”. Walaupun Kabupaten Karimun berada pada kluster “Belum Mandiri” pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan masih berada pada kluster “Belum Mandiri”. Kabupaten Bintan sempat masuk kategori “Menuju Kemandirian” pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada tahun 2020 hingga 2022.

Grafik 2.15 – Indeks Kemandirian Fiskal I Tahun 2017 s.d. Tahun 2022

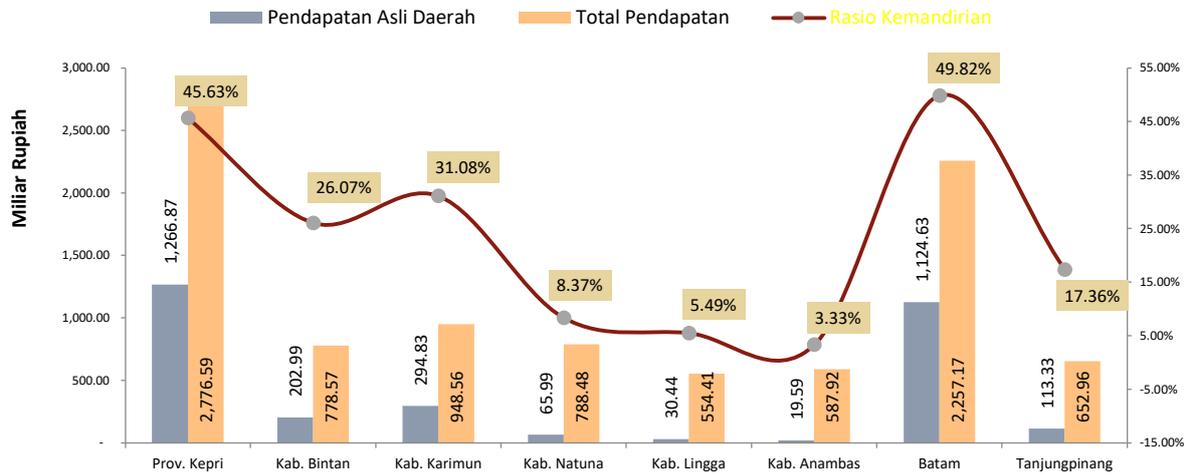


Sumber: GFS Provinsi Kepri, 2023 (data diolah)



Pada periode Triwulan III 2023 sebagai mana Grafik 2.16, IKF I Kepri berada di angka 45,63% atau pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”. Secara parsial, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun juga berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada klasifikasi “Belum Mandiri”. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (empat dari tujuh) pada Triwulan III 2023 berada pada klasifikasi “Belum Mandiri”.

Grafik 2.16 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I Tw III 2023

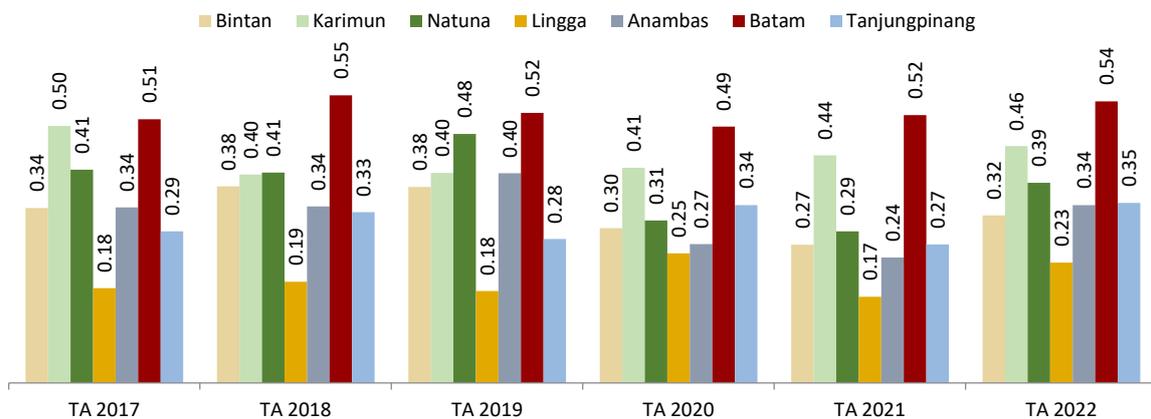


Sumber: GFS Provinsi Kepri Triwulan III, 2023 (data diolah)

b. Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF II dari tahun 2017 s.d 2022 sebagai mana Grafik 2.17 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada klaster “Mandiri”. Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada klaster menuju “Kemandirian”, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada klaster “Belum Mandiri”.

Grafik 2.17 – Indeks Kemandirian Fiskal II Tahun 2017 s.d. Tahun 2022



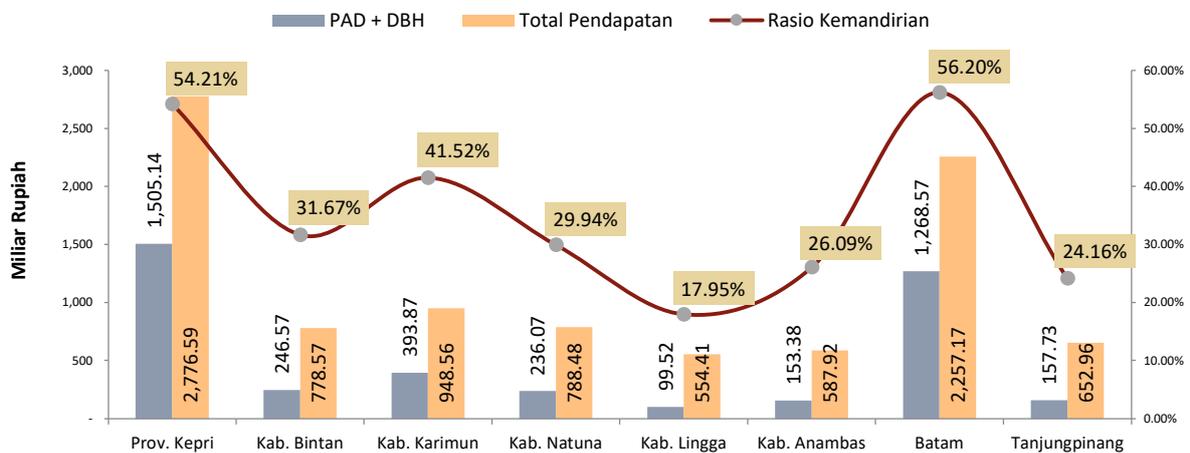
Sumber: GFS Provinsi Kepri Triwulan III, 2023 (data diolah)

Pada periode Triwulan III 2023 sebagai mana Grafik 2.18, IKF II Kepri berada di angka 54,21% atau pada klasifikasi “Mandiri”. Secara parsial hanya Kota Batam yang masuk klaster “Mandiri”. Empat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten



Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”. Dua Kota/Kabupaten lainnya masih yaitu Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Lingga berada pada kategori “belum mandiri”. Dari hasil IKF II periode periode Triwulan III 2023, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (empat dari tujuh) berada pada klasifikasi “Menuju Kemandirian”.

Grafik 2.18 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II Tw III Tahun 2023



Sumber: GFS Provinsi Kepri Triwulan III, 2023 (data diolah)

2.3. Analisis Anggaran Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah

2.3.1 Konsolidasi APBN dan APBD

Tabel 2.12 – Perkembangan I-Account APBN dan APBD di Kepri Triwulan III 2022 dan Triwulan III 2023

Uraian	Triwulan III TA 2022 (Rp M)	Triwulan III TA 2023 (Rp M)			% Growth
		Pusat	Daerah	Konsolidasi	
A Pendapatan	12.021,75	8.702,72	9.344,65	11.821,42	(1,67)
B Belanja Dan Transfer	11.240,14	10.958,03	8.373,97	13.106,06	16,60
C Surplus (A-B)	781,61	(2.255,31)	970,68	(1.284,64)	(264,36)
D Pembiayaan	418,10	-	502,79	502,79	20,26
E SiLPA/SiKPA (C+D)	1.199,72	(2.255,31)	1.473,47	(781,84)	(165,17)

Sumber: OM-SPAN dan GFS Triwulan III, 2023 (diolah)

Pada triwulan III 2022 sebagai mana Tabel 2.12, Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp12.021 miliar, Belanja dan Transfer Konsolidasi sebesar Rp11.240 miliar sehingga menghasilkan Surplus sebesar Rp781 juta. Pemerintah mengadakan Pembiayaan sebesar Rp418 juta. Oleh karena itu, pada akhir Triwulan III 2022 menghasilkan SILPA sebesar Rp1.199 miliar. Pada triwulan III 2022, Laporan Konsolidasi mencatat defisit sebesar Rp1.284,64 miliar. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan sebesar Rp11.821,42 miliar, lebih rendah dibandingkan Belanja sebesar Rp13.103 miliar. Kemudian pemerintah mengadakan Pembiayaan sebesar Rp503 juta sehingga mencatatkan SIKPA sebesar Rp781 juta. Pendapatan konsolidasi pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan kontraktif sebesar 1,67 persen (yoy), sedangkan Belanja dan Transfer konsolidasi tumbuh sebesar 16,60 persen (yoy). Pendapatan konsolidasi didominasi oleh pendapatan pusat sebesar Rp8.702 miliar. Belanja konsolidasi didominasi oleh Belanja Pusat sebesar Rp10.958 miliar. Pada postur pusat terdapat SiKPA sebesar Rp2.256 miliar sedangkan di daerah terdapat SiLPA sebesar Rp1.473 miliar.



2.3.2 Kontribusi Belanja Konsolidasi Pemerintah Terhadap PDRB

Tabel 2.13 – Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Kepri terhadap PDRB

Periode	Belanja (Rp miliar)	Growth Belanja (%)	PDRB ADHK (Rp miliar)	Growth PDRB ADHK (%)	Rasio Belanja thd. PDRB (%)
(a)	(b)		(c)		(d) = (b) / (c)
s.d. TW III 2021	11.941	-	44.390	-	26,90
s.d. TW III 2022	11.240	(5,87)	47.068	6,03	23,88
s.d. TW III 2023	13.106	16,60	49.383	4,92	26,53

Sumber: OM-SPAN dan BPS Kepri, 2023 (diolah)

Belanja Pemerintah konsolidasi Pada periode triwulan III 2021 sebesar Rp11.941 miliar. Belanja Pemerintah konsolidasi Pada triwulan III 2022 sebesar Rp11.240 miliar atau turun sebesar -5,87 persen (yoy). Pada Triwulan III 2023 Belanja Pemerintah konsolidasi sebesar Rp13.103 miliar atau kembali naik sebesar 16,57 persen (yoy) sebagai mana Tabel 2.13 PDRB ADHK tercatat sebesar Rp44.390 miliar pada periode s.d triwulan III 2021. Kemudian pada periode s.d TW III 2022 tercatat sebesar Rp47.068 miliar atau tumbuh sebesar 6,03% (yoy). Pada periode s.d TW III 2023, PDRB ADHK tercatat sebesar Rp49.363 atau tumbuh sebesar 4,92% yoy.

Rasio belanja konsolidasi pemerintah terhadap PDRB sampai dengan triwulan III 2021 adalah sebesar 26,90 persen. Rasio tersebut kemudian turun menjadi 23,88 persen pada periode s.d triwulan III 2022 yang disebabkan turunnya Belanja pemerintah (-5,87 persen) disisi lain PDRB ADHK meningkat sebesar 6,03 persen. Kemudian pada periode s.d triwulan III 2023, rasio tersebut kembali meningkat yaitu sebesar 26,53 persen yang disebabkan oleh peningkatan Belanja pemerintah (16,57persen) lebih tinggi dibandingkan peningkatan PDRB ADHK (4,92 persen).

2.3.3 Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita

Tabel 2.14 – Rasio Belanja Pemerintah di Kepri per Kapita

Periode	Belanja (Rp miliar)	Growth Belanja (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Growth jumlah penduduk (%)	Rasio Belanja per Kapita (Rp juta/jiwa)	Growth Rasio Belanja per Kapita (%)
(a)	(b)		(c)		(d) = (b) / (c)	
s.d. TW III 2021	11.941	-	2.118.239	-	5,64	-
s.d. TW III 2022	11.240	-5,87	2.179.820	2,91%	5,16	(8.53)
s.d. TW III 2023	13.106	16,60	2.248.484*	3,15%	5,83	13,04

*proyeksi dengan laju pertumbuhan penduduk 3,15 persen

Sumber: OM-SPAN dan BPS Kepri, 2023 (diolah)

Belanja Pemerintah konsolidasi pada periode Triwulan III 2021 sebesar Rp11.941 miliar. Belanja Pemerintah konsolidasi ada Triwulan III 2022 sebesar Rp11.240 miliar atau turun sebesar -5,87 persen (yoy). Pada Triwulan III 2023 Belanja Pemerintah konsolidasi sebesar Rp13.103 miliar atau kembali naik sebesar 16,57 persen (yoy).

Disisi lain, jumlah penduduk pada periode Triwulan III 2021 sebesar 2.118.239 jiwa. Pada Triwulan III 2021, jumlah penduduk menjadi 2.179.820 jiwa atau tumbuh sebesar 2,91%. Pada Triwulan III 2022, jumlah penduduk menjadi 2.248.484 jiwa atau kembali tumbuh sebesar 3,15%.

Pertumbuhan Belanja Pemerintah pada Triwulan III 2023 dapat mendorong pertumbuhan Rasio Belanja perkapita pada periode yang sama walaupun jumlah penduduk juga tumbuh. Rasio Belanja konsolidasi pemerintah per kapita sampai dengan triwulan III 2023 adalah sebesar Rp5,83 juta per jiwa, mengalami peningkatan sebesar 13,01% dibandingkan dengan periode sebelumnya yoy (Rp5,16 juta/jiwa). Peningkatan terjadi seiring dengan kenaikan belanja pemerintah.



BAB III



Kampung Wisata Sawah Poyotomo
Kab. Bintan

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Bidang RO Harmonis dengan Pagu terbesarnya yaitu berada pada subbidang Jalan (Rp1044,33 miliar) dan subbidang Tematik Penguatan Destinasi Wisata Prioritas (Rp47,89 miliar) dan Pagu yang terkait dalam DAK Fisik adalah sebesar Rp11,84 miliar

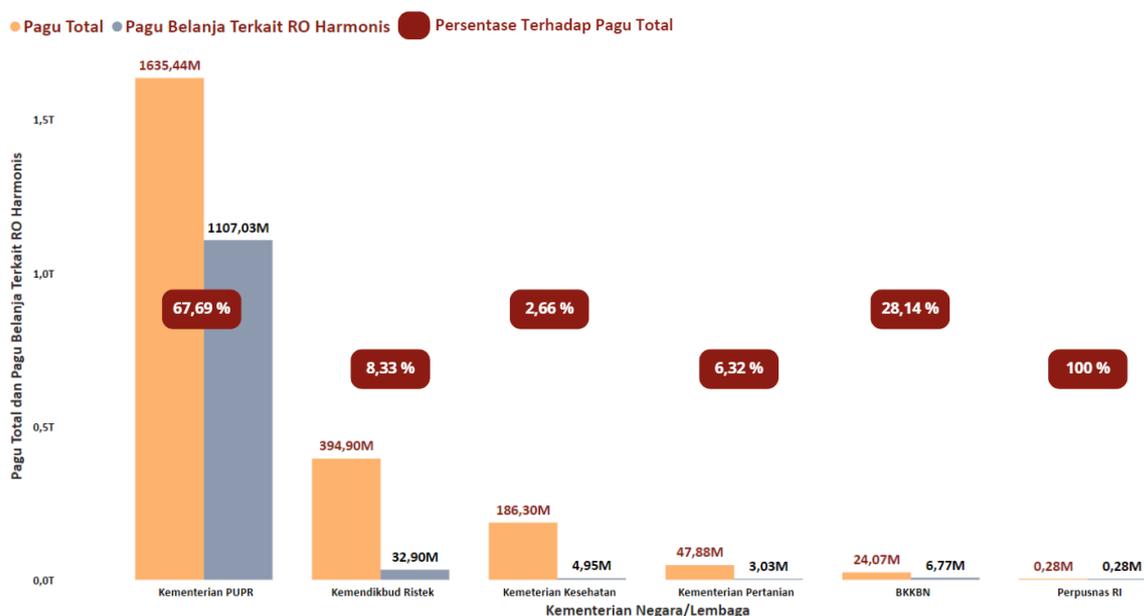


Pengembangan Ekonomi Daerah

3.1 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L - DAK Fisik di Tingkat Wilayah

RO Harmonis di tingkat wilayah Kepri tersebar pada enam K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keenam K/L ini masing-masing membidangi RO Harmonis sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya masing-masing: Kementerian PUPR memiliki belanja RO Harmonis pada bidang jalan; Perpustakaan Nasional dan Kemendikbud Ristek pada bidang pendidikan; serta Kementerian Kesehatan dan BKKBN pada bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Grafik 3.1- Pagu Total dan Pagu Belanja Terkait RO Harmonisasi (Rp miliar)

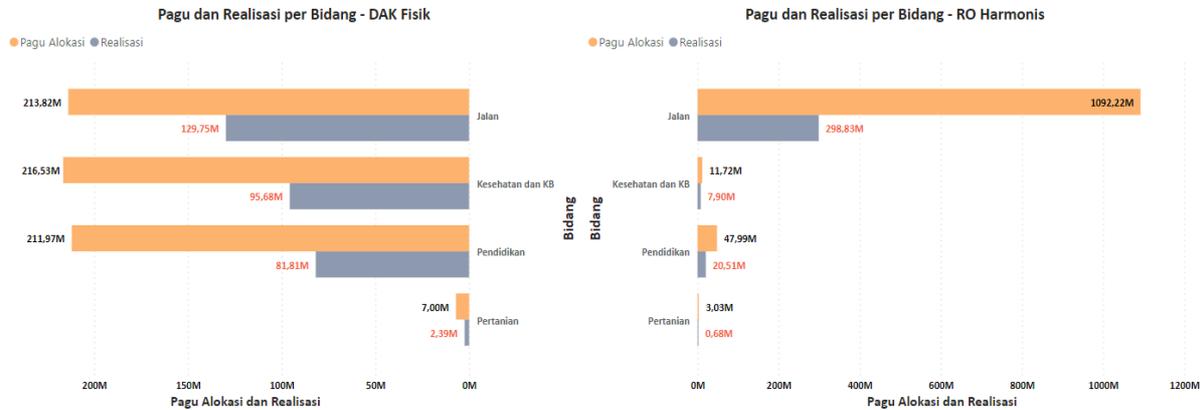


Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Kementerian PUPR memiliki alokasi belanja RO Harmonis sebesar Rp1.107,03 miliar (67,69 persen dari Pagu Kementerian PUPR di Kepri) dari keseluruhan Pagu Rp1.635.44 miliar. Pagu tersebut merupakan yang terbesar dalam RO Harmonis di Kepri. Pagu Harmonis yang terbesar kedua yaitu Kemendikbud Ristek dengan Alokasi sebesar Rp32,90 miliar dari total Rp394,90 miliar (8,33 persen dari Pagu Kemendikbud Ristek di Kepri). Pagu terbesar selanjutnya berasal dari BKKBN dengan Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp6,77 miliar dari total Rp24,07 miliar (28,14 persen dari total Pagu BKKBN di Kepri). Kemudian diikuti oleh Kementerian Kesehatan yang memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp4,95 miliar dari total Rp186,30 miliar (2,66 persen dari total Pagu Kementerian Kesehatan di Kepri). Kementerian Pertanian memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp3,03 miliar dari total Rp47,88 miliar (6,32 persen dari Pagu

Kementerian Pertanian di Kepri). Pagu Belanja terkait RO Harmonis terkecil dimiliki oleh Perpunas RI dengan Rp282,83 miliar dari total Rp282,83 miliar (100 persen dari total Pagu Perpunas RI di Kepri). Terlihat bahwasannya keseluruhan belanja Perpunas RI di Kepri terkait dengan RO Harmonis Dak Fisik pada bidang pendidikan.

Grafik 3.2- Perbandingan Pagu dan Realisasi RO Harmonis - DAK Fisik



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

Bandingkan dengan bidang pada DAK Fisik, Pagu terbesar yaitu pada bidang jalan dengan besaran Pagu Rp1.092,22 miliar (94,57 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis) yang berkaitan dengan DAK Fisik yang memiliki Pagu sebesar Rp213,82 miliar. Kemudian diikuti oleh bidang pendidikan sebesar Rp47,99 miliar (4,16 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis) yang berkaitan dengan DAK Fisik yang memiliki Pagu sebesar Rp211,97 miliar. Selanjutnya bidang kesehatan dan keluarga berencana memiliki Pagu sebesar Rp11,72 miliar (1,01 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis) yang berkaitan dengan DAK Fisik yang memiliki Pagu sebesar Rp216,53 miliar. Bidang pertanian memiliki Pagu sebesar Rp3,03 miliar (0,26 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis) terkait dengan DAK Fisik yang memiliki pagu sebesar Rp7,00 miliar.

Terlihat berdasarkan data bahwasanya Pagu Belanja terkait RO Harmonis yang terbesar di Kepri yaitu pada bidang jalan. Kondisi ini dimungkinkan karena besarnya nilai proyek pembangunan jalan di Kepri. Di mana, pada satu uraian output yaitu Dukungan Penanganan jalan Daerah saja telah memiliki Alokasi sebesar Rp549,45 miliar (50,30 persen dari total Pagu bidang jalan).

Namun besarnya Alokasi pada bidang jalan belum diikuti oleh besarnya realisasi anggaran yang dijalankan. Dari total alokasi sebesar Rp1.092,22 miliar hanya sebesar Rp298,83 miliar (27,36 persen dari Pagu) yang telah direalisasikan hingga triwulan III 2023. Kondisi ini terbilang kecil, mengingat tahun anggaran 2023 tersisa satu triwulan lagi.

3.1.1 Distribusi RO Harmonis Tingkat Wilayah

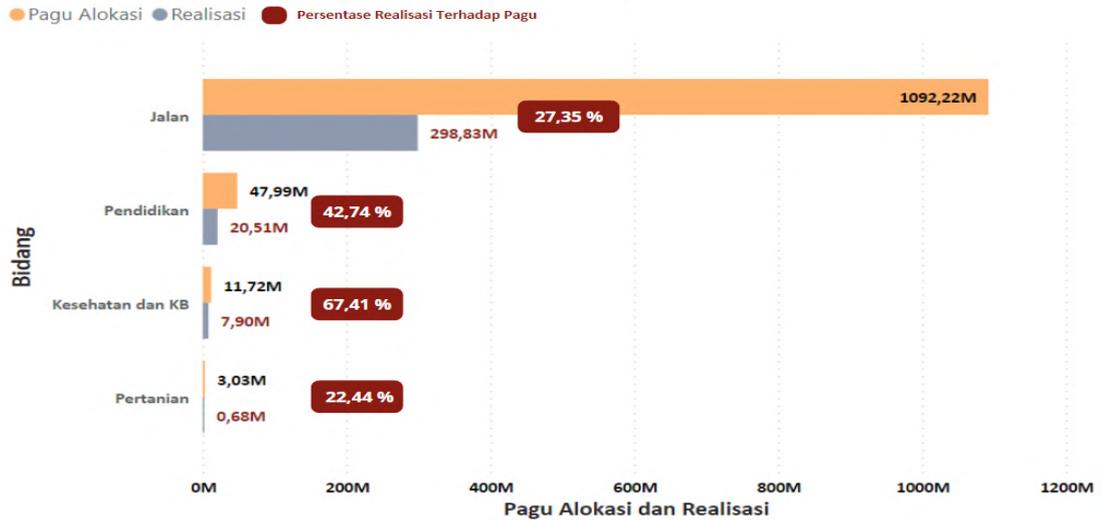
Dari data yang disajikan, terlihat bahwa bidang kesehatan dan keluarga berencana adalah salah satu bidang dengan persentase realisasi tertinggi, mencapai 67,36 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana dimana rata-rata per rincian *output* telah merealisasikan lebih dari 50,00 persen anggarannya, bahkan ada yang telah merealisasikan hingga 92,26 persen.

Sementara itu, bidang pendidikan memiliki persentase realisasi sebesar 42,73 persen, menunjukkan bahwa dari total anggaran yang cukup besar tersebut, masih terdapat ruang untuk peningkatan realisasi anggaran. Beberapa kendala yang ditemui dalam bidang pendidikan



berdasarkan hasil survei kepada satuan kerja-satuan kerja, yaitu karena terdapat blokir anggaran pada beberapa rincian output, lokasi kegiatan yang terluar, sehingga sulit untuk dijangkau dan mutasi dari pegawai PPK yang memerlukan waktu pergantian.

Grafik 3.3 – Pagu dan Realisasi per Bidang - RO Harmonis
Pagu dan Realisasi per Bidang - RO Harmonis



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Di sisi lain, bidang jalan memiliki persentase realisasi sebesar 27,36 persen, yang menandakan bahwa anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kendala yang ditemui diantaranya yaitu, DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Realisasi pada Pertanian yaitu sebesar Rp0,68 miliar (22,44 persen dari Pagu), realisasi ini terbilang kecil mengingat tahun anggaran 2023, tersisa satu triwulan lagi. Beberapa tantangan dalam bidang pertanian diantaranya, yaitu realisasi *output* tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan karena merupakan daerah hutan lindung, dan terbatasnya jumlah SDM di satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administratif.

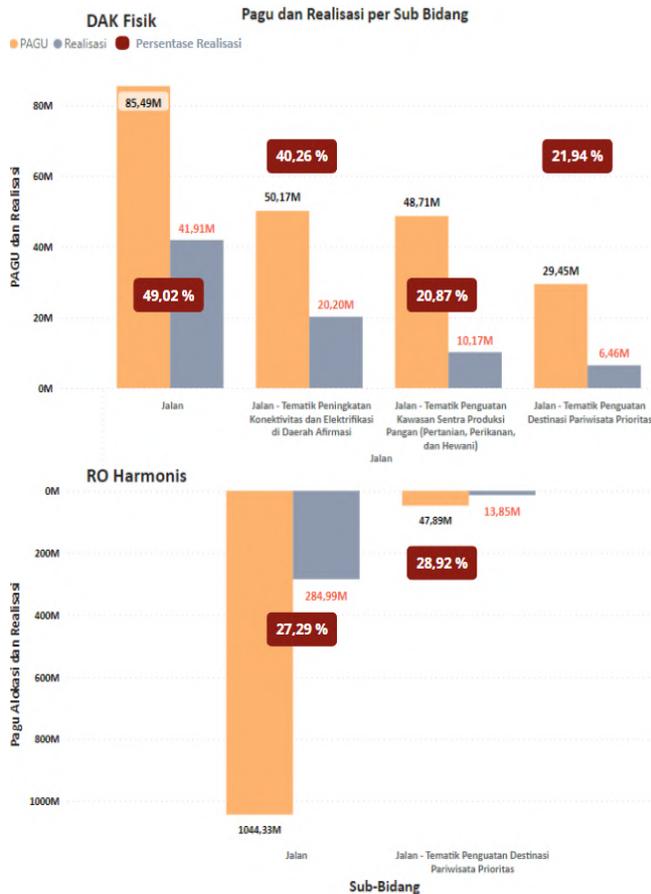
a. Rincian RO Harmonis per Subbidang

Jalan

Subbidang jalan dalam DAK Fisik terbagi ke dalam 4 subbidang, yaitu jalan, jalan Tematik Penguatan Konektivitas, jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, dan jalan Tematik Penguatan Kawasan Destinasi Pariwisata. subbidang dengan Pagu terbesar yaitu subbidang jalan sebesar Rp85,49 miliar, diikuti oleh subbidang Tematik Peningkatan Konektivitas sebesar Rp50,17 miliar, subbidang Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sebesar Rp48,71 miliar, dan dengan Pagu terkecil yaitu tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp29,45 miliar.



Grafik 3.4 – Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik – jalan



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

Sedangkan dalam RO Harmonis, pada bidang jalan hanya terkait pada dua subbidang, yaitu subbidang jalan dan tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas. Subbidang jalan memiliki Pagu terbesar yaitu Rp1.044,33 miliar (95,62 persen dari total Pagu), dan subbidang Tematik Penguatan Destinasi Wisata memiliki sebagian kecil Pagu, yaitu Rp47,86 miliar (4,38 persen dari total Pagu).

Realisasi DAK Fisik pada dua subbidang yang berkaitan dengan RO Harmonis, masing-masing yaitu sebesar Rp41,92 miliar (49,02 persen dari Pagu) pada subbidang jalan dan Rp6,46 miliar (21,94 persen dari Pagu) pada subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas. Terlihat pada DAK Fisik, subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas memiliki realisasi yang lebih kecil dibandingkan subbidang jalan, mengindikasikan tantangan yang lebih besar dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas.

Sedangkan dalam RO Harmonis, subbidang jalan telah direalisasikan sebesar Rp284,99 miliar (27,29 persen dari Pagu), sedangkan subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas telah direalisasikan sebesar Rp13,85 miliar (28,92 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang ditemui dalam subbidang jalan, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, dan pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau. Sedangkan pada subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, yaitu kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Pendidikan

Pada DAK Fisik bidang pendidikan terdapat beberapa subbidang, diantaranya yaitu subbidang SMP dengan Pagu sebesar Rp53,40 miliar, SMA dengan Pagu sebesar Rp50,61 miliar, SD dengan Pagu sebesar Rp49,27 miliar, SMK dengan Pagu sebesar Rp43,24 miliar, SLB dengan Pagu sebesar Rp12,15 miliar, dan PAUD dengan Pagu sebesar Rp3,31 miliar.



Adapun pada RO Harmonis terdapat beberapa subbidang yang dibagi sebagai berikut, yaitu subbidang SD, SMP, SMA, SMK, subbidang SD dan SMP, subbidang PAUD, dan subbidang perpustakaan. Dengan Pagu terbesar yaitu, subbidang SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp32,06 miliar (66,81 persen dari total Pagu), diikuti subbidang SD dan SMP sebesar Rp14,81 miliar (37,88 persen dari total Pagu), subbidang PAUD sebesar Rp0,84 miliar (1,74 persen dari total Pagu), subbidang perpustakaan sebesar Rp282,83 miliar (51,02 persen dari total Pagu) menunjukkan fokus pemerintah yang kuat dalam pengembangan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.

Bidang dengan persentase realisasi tertinggi pada DAK Fisik yaitu subbidang PAUD dengan realisasi sebesar Rp2,28 miliar (68,88 persen dari Pagu), diikuti subbidang SD sebesar Rp25,89 miliar (52,55 persen dari Pagu), subbidang SMP sebesar Rp24,50 miliar (45,88 persen dari Pagu), subbidang SMA sebesar Rp12,28 miliar (24,26 persen dari Pagu), dan yang terkecil dalam persentase yaitu subbidang SMK sebesar Rp8,22 miliar (19,01 persen dari Pagu) menunjukkan beberapa subbidang pada bidang pendidikan ini masih memiliki realisasi yang cukup rendah menjelang akhir tahun anggaran ini.

Sedangkan pada RO Harmonis, rata-rata subbidang telah merealisasikan anggarannya di atas 40 persen. Dengan persentase realisasi terbesar pada subbidang PAUD sebesar Rp0,48 miliar (57,33 persen dari Pagu), diikuti subbidang perpustakaan sebesar Rp0,14 miliar (51,02 persen dari Pagu), subbidang SD, SMP, SMA, SMK sebesar 14,27 persen dari Pagu, dan yang terkecil dalam persentase yaitu subbidang SD dan SMP sebesar Rp5,61 miliar (37,88 persen dari Pagu). Menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam realisasi di bidang pendidikan yang rata-rata telah merealisasikan anggarannya di atas 40 persen. Disamping itu terdapat beberapa tantangan diantaranya pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK, yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, lokasi kegiatan yang terluar dan ekstrim sehingga sulit dijangkau, serta mutasi dan ketersediaan SDM mengganggu proses realisasi anggaran pada subbidang ini.

Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pada bidang kesehatan dan keluarga berencana dalam DAK Fisik terdapat 4 subbidang, dengan masing-masing Pagu, yaitu subbidang Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp211,23 miliar, subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting sebesar Rp2,70 miliar, subbidang Keluarga Berencana sebesar Rp1,31 miliar, dan subbidang

Grafik 3.5 – Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik – Pendidikan

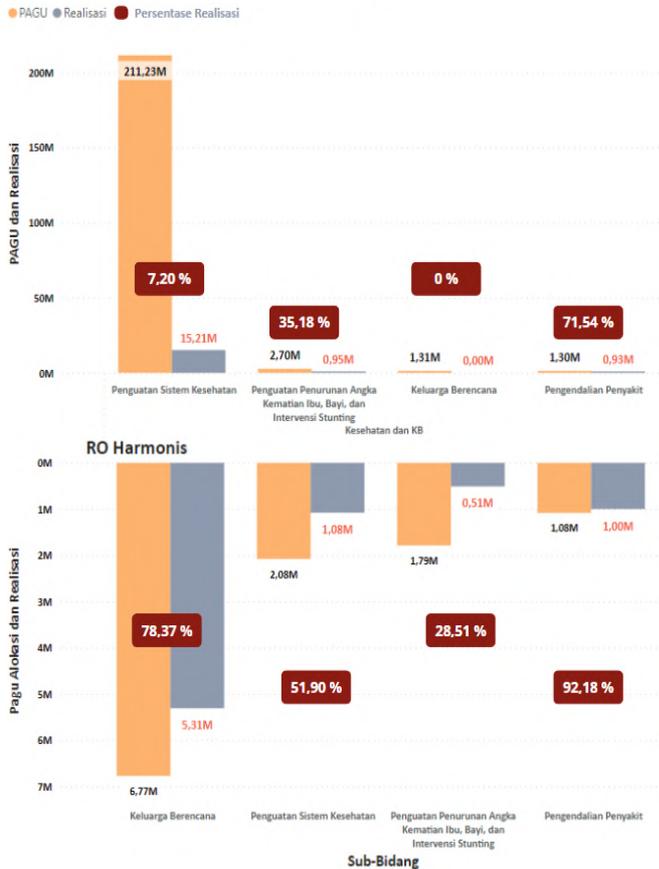


Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).



Pengendalian Penyakit Rp1,30 miliar. Perbedaan jumlah Pagu yang cukup besar pada Bidang ini mengindikasikan fokus yang besar pada subbidang Sistem Kesehatan.

Grafik 3.6 – Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik –Kesehatan dan KB



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

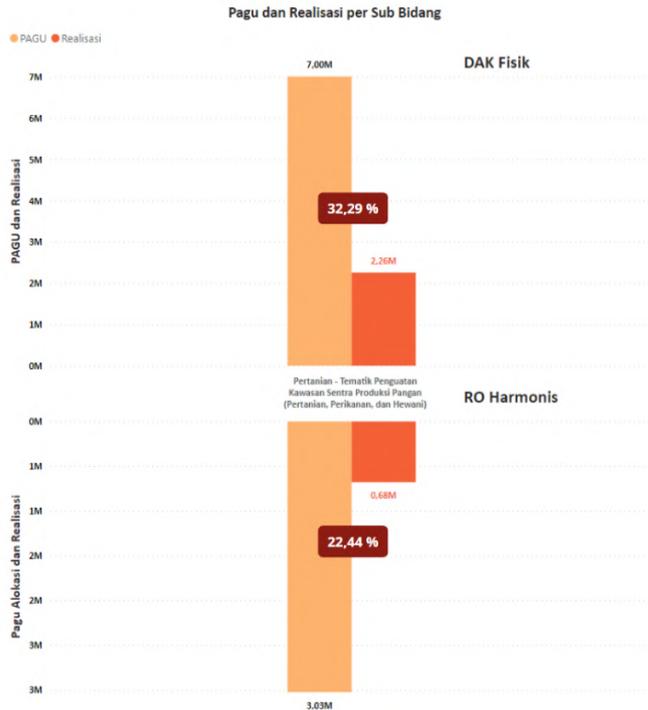
Sedangkan pada RO Harmonis subbidang dengan realisasi terbesar yaitu pada subbidang Pengendalian Penyakit sebesar Rp1,00 miliar (92,18 persen dari Pagu), diikuti subbidang Keluarga Berencana sebesar Rp5,31 miliar (78,37 persen dari Pagu), diikuti subbidang Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp1,08 miliar (51,90 persen dari Pagu), dan yang terkecil dalam persentase yaitu subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting Rp0,51 miliar (28,51 persen dari Pagu). Tantangan yang dihadapi pada subbidang Keluarga Berencana, yaitu kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada akhir November. Sedangkan pada subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting diantaranya, yaitu perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan terbatasnya jumlah SDM untuk pelaksanaan kegiatan.

Pertanian

Bidang Pertanian pada DAK Fisik dan RO Harmonis satuan kerja hanya memiliki satu subbidang yang sama, yaitu Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pada DAK Fisik, Pagu yang dialokasikan sebesar Rp7,00 miliar. Sedangkan pada RO Harmonis dialokasikan sebesar Rp3,03 miliar.



Grafik 3.7 – Perbandingan Pagu dan Realisasi per Subbidang RO Harmonis dan DAK Fisik – Pertanian

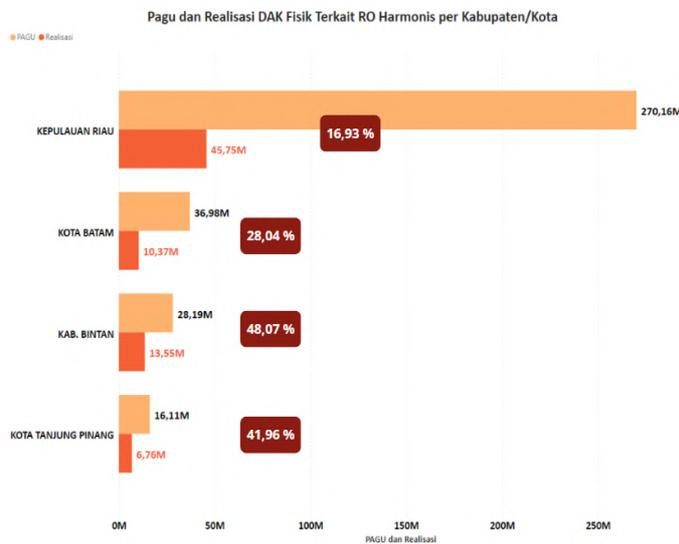


Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Adapun realisasi pada DAK Fisik mencapai Rp2,26 miliar (32,29 persen dari Pagu). Sedangkan pada RO Harmonis telah direalisasikan sebesar Rp0,68 miliar (22,44 persen dari Pagu). Dalam pelaksanaannya, realisasi RO Harmonis mendapatkan beberapa tantangan, sehingga pelaksanaan realisasi anggaran cukup terhambat. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan anggaran di bidang pertanian, yaitu realisasi *output* tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan karena merupakan daerah hutan lindung, dan terbatasnya jumlah SDM di satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administratif.

b. Rincian RO Harmonis Per Pemda

Grafik 3.8 – Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Pemda



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

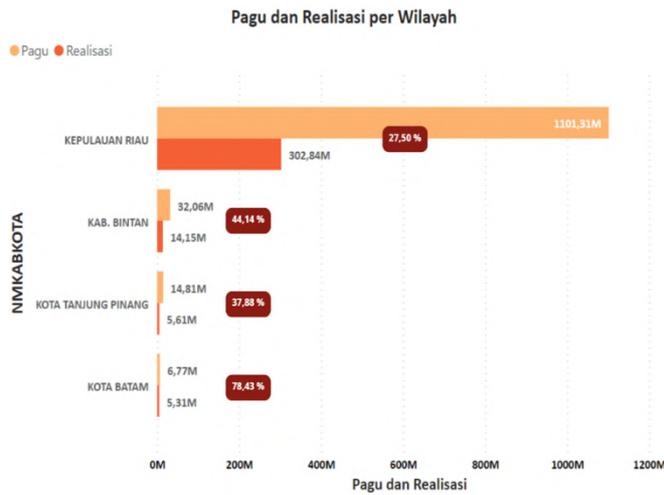
Sebagian besar DAK Fisik berada dalam lingkup wilayah Kepri, dengan total Pagu sebesar Rp270,16 miliar (76,87 persen dari total Pagu), diikuti Kota Batam dengan Pagu sebesar Rp36,98 miliar (10,52 persen dari Pagu), Kabupaten Bintan sebesar Rp28,19 miliar (8,02 persen dari Pagu), dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp16,11 miliar (5,58 persen dari Pagu).

Realisasi pada Kabupaten/Kota bidang DAK Fisik ini memiliki persentase terbesar yaitu pada Kabupaten Bintan sebesar Rp13,55 miliar (48,07 persen dari Pagu), diikuti Kota Tanjungpinang sebesar Rp6,76 miliar (41,96 persen dari Pagu), Kota Batam sebesar Rp10,37 miliar (28,04

persen dari Pagu), dan yang terkecil dalam lingkup Kepri sebesar Rp45,75 miliar (16,93 persen dari Pagu). Sangat disayangkan, lingkup Kepri yang memiliki Pagu terbesar hingga 75,87 persen dari total Pagu, baru dapat merealisasikan anggaran sebesar 16,93 persennya saja.



Grafik 3.9 – Pagu dan Realisasi Belanja terkait RO Harmonis per Pemda



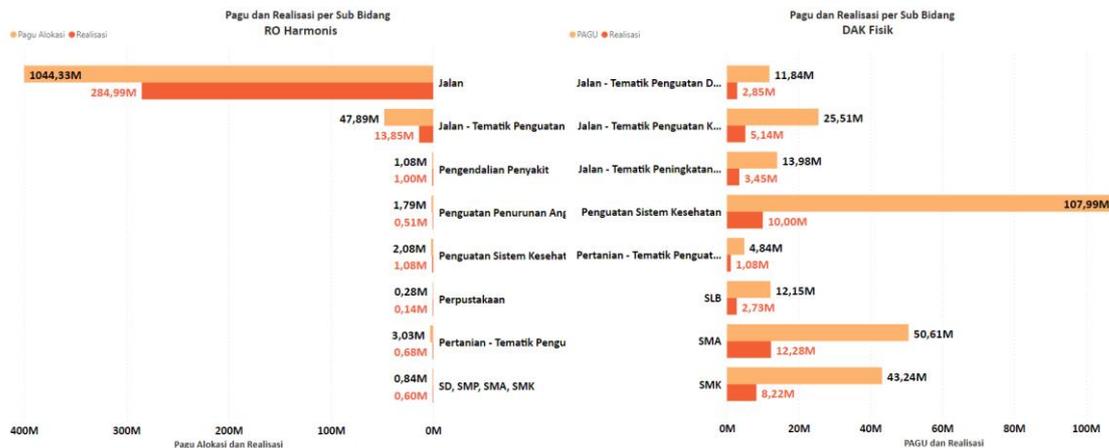
Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Begitu juga dengan RO Harmonis satuan kerja, pagu terbesar berada pada lingkup wilayah Kepri sebesar Rp1101,31 miliar (95,36 persen dari total Pagu), diikuti oleh Kabupaten Bintan sebesar Rp32,06 miliar (2,78 persen dari total Pagu), Kota Tanjungpinang sebesar Rp14,81 miliar (1,28 persen dari total Pagu), dan terkecil pada Kota Batam sebesar Rp6,77 miliar (0,59 persen dari total Pagu). Terlihat berdasarkan data sebagian besar RO Harmonis berada pada lingkup Kepri, dengan persentase Pagu sebesar 95,36 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis. Sebagian besar Pagu berasal dari Pagu subbidang

jalan, sebesar Rp1044,33 miliar (90,42 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis).

Kepri

Grafik 3.10 – Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Kepri



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

Dalam lingkup Kepri, 3 Pagu Belanja terkait RO Harmonis terbesar yaitu berada pada bidang jalan, subbidang jalan, sebesar Rp1044,33 miliar (94,83 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis lingkup Kepri), kemudian diikuti bidang jalan, subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp47,89 miliar (4,35 persen dari total Pagu Harmonis lingkup Kepri), merupakan program satuan kerja Balai Pelaksanaan jalan Nasional (PjN) Kepri, yang berkaitan dengan subbidang yang sama pada DAK Fisik Kepri dengan pagu Rp11,84 miliar, selanjutnya bidang pertanian, subbidang pertanian - tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sebesar Rp3,03 miliar (22,44 persen dari Pagu Harmonis lingkup Kepri) terkait dengan DAK Fisik Kepri pada subbidang yang sama dengan Pagu sebesar Rp4,84 miliar.

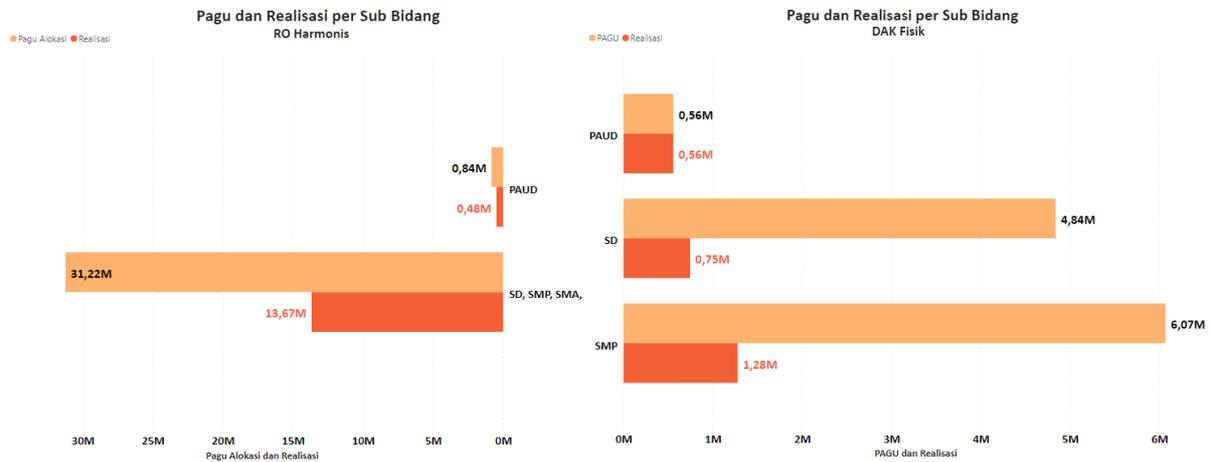
Berdasarkan data terlihat sebagian besar Pagu berada pada subbidang jalan, namun realisasinya masih terbilang cukup kecil, sebesar Rp284,96 miliar (27,29 persen dari Pagu). Kondisi ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, diantaranya yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang



terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, dan pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau. Sedangkan pada subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, yaitu kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Kabupaten Bintan

Grafik 3.11 - Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Bintan



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

Berdasarkan data dan grafik, RO Harmonis di Kabupaten Bintan sebagian besar berada pada Bidang Pendidikan, subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan Pagu sebesar Rp31,22 miliar (97,39 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis Kabupaten Bintan), merupakan program satuan kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPBM) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kepri yang berkaitan dengan subbidang SD dan subbidang SMP pada DAK Fisik Kabupaten Bintan dengan masing-masing Pagu sebesar Rp4,84 miliar dan Rp6,07 miliar, diikuti Bidang Pendidikan, subbidang PAUD sebesar Rp0,84 miliar (2,61 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis Kabupaten Bintan) yang berkaitan dengan DAK Fisik subbidang yang sama dengan Pagu sebesar Rp0,56 miliar.

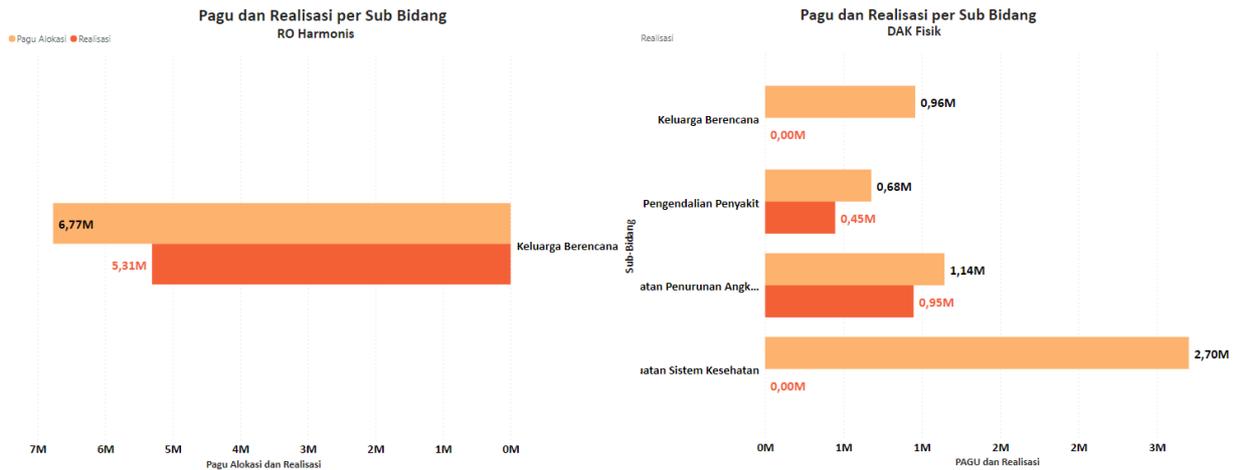
Dengan Pagu terbesar pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Bintan tersebut, besar realisasi yaitu Rp13,67 miliar (43,79 persen dari Pagu), sedangkan subbidang PAUD di Kabupaten Bintan telah direalisasikan sebesar Rp0,48 miliar (57,33 persen dari Pagu). Persentase realisasi pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Bintan sebesar 43,79 persen, dapat terbilang sudah cukup baik. Namun, realisasi anggaran tersebut masih menemui beberapa kendala dan hambatan, diantaranya yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, lokasi kegiatan yang terluar dan ekstrim sehingga sulit dijangkau, serta mutasi dan ketersediaan SDM mengganggu proses realisasi anggaran pada subbidang ini di Kabupaten Bintan.

Kota Batam

RO Harmonis di Kota Batam hanya terdapat pada satu subbidang, yaitu subbidang keluarga berencana, bidang kesehatan dan keluarga berencana, yang memiliki Pagu sebesar Rp6,77 miliar, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri. Subbidang ini terkait dengan subbidang yang sama pada DAK Fisik di Kota Batam dengan Pagu sebesar Rp0,96 miliar.



Grafik 3.12 – Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik - Batam



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

Realisasi RO Harmonis subbidang keluarga berencana di Kota Batam telah direalisasikan sebesar Rp5,30 miliar (78,37 persen dari Pagu), menunjukkan kinerja positif dan upaya yang baik dalam pelaksanaan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada akhir November.

Kota Tanjungpinang

Grafik 3.13 – Perbandingan Pagu dan Realisasi terkait RO Harmonis dan DAK Fisik – Tanjungpinang



Sumber: Omspan dan Sintesa, 2023 (diolah).

RO Harmonis di Kota Tanjungpinang terdapat pada subbidang SD dan SMP, dengan Pagu sebesar Rp14,81 miliar, merupakan program satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri yang berkaitan dengan DAK Fisik subbidang SD dan SMP, dengan Pagu masing-masing sebesar Rp4,61 miliar dan Rp1,36 miliar. Besar realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada subbidang ini adalah sebesar Rp5,61 miliar (37,88 persen dari Pagu).

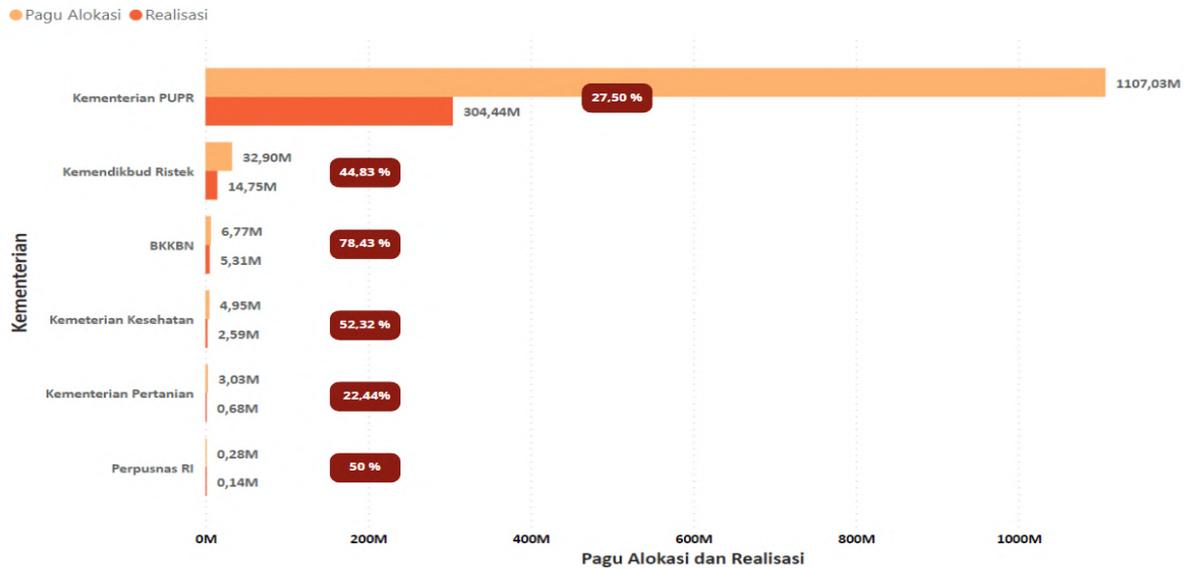
c. Per Kementerian Negara/Lembaga

K/L dengan Pagu terbesar dalam RO Harmonis bersama DAK Fisik, yaitu pada Kementerian PUPR, dengan pagu sebesar Rp1107,03 miliar (95,85 persen dari Pagu) yang berkaitan dengan bidang jalan dan pendidikan, diikuti oleh Kemendikbud Ristek sebesar Rp32,90 miliar (2,85 persen dari Pagu) yang berkaitan dengan bidang pendidikan, BKKBN dengan Pagu sebesar Rp6,77 miliar (0,59 persen dari Pagu) yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan keluarga berencana,



kemudian Kementerian Kesehatan dengan pagu sebesar Rp4,95 miliar (0,43 persen dari Pagu) yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan keluarga berencana, selanjutnya Kementerian Pertanian dengan pagu sebesar Rp3,02 miliar (0,26 persen dari Pagu) terkait dengan bidang pertanian dan Pagu terkecil pada Perpusnas RI dengan Pagu sebesar Rp0,28 miliar (0,02 persen dari Pagu) terkait dengan bidang pendidikan.

Grafik 3.14 – Pagu dan Realisasi Belanja Terkait RO Harmonisasi per Kementerian Lembaga



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Kementerian PUPR memiliki persentase Pagu terbesar, jauh dibandingkan K/L lain Kepri, namun disayangkan besar realisasi yang diberikan masih terbilang cukup kecil. Ada beberapa hambatan yang melatarbelakangi terkait kecilnya persentase realisasi bidang jalan yang ditangani oleh Kementerian PUPR, diantaranya yang ditemui yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.

Pada Kementerian Pertanian yang baru merealisasikan anggaran sebesar 22,44 persen dari total Pagu, ditemui beberapa kendala yang menghambat tersalurkannya anggaran. Beberapa kendala tersebut diantaranya, yaitu realisasi *output* tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan karena merupakan daerah hutan lindung, dan terbatasnya jumlah SDM di satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administratif.

Kemendikbud Ristek memiliki beberapa subbidang dalam RO Harmonis bidang pendidikan, yaitu terkait pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan Pagu sebesar Rp32,06 miliar (97,46 persen dari total Pagu Kemendikbud Ristek), telah direalisasikan sebesar Rp14,27 miliar (44,51 persen dari Pagu) dan subbidang PAUD dengan Pagu sebesar Rp0,84 miliar (2,54 persen dari total Pagu Kemendikbud Ristek), telah direalisasikan sebesar Rp0,48 miliar (57,33 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat blokir anggaran terhadap beberapa program, revisi anggaran, pengesahan DIPA baru dilaksanakan bulan Oktober, permasalahan administrasi dan kurang kooperatifnya pihak ketiga dalam



mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN, lokasi kegiatan di daerah terluar, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan baru sebagian tahap di jalan, program yang melibatkan banyak stakeholder sehingga memerlukan juknis lebih lanjut, adanya pergantian bendahara karena daya serap yang rendah, mutasi dan promosi pejabat PPK, ketersediaan SDM yang kurang, pelaporan output belum dilaksanakan dan kurangnya pemahaman terhadap terhadap aplikasi.

Selanjutnya BKKBN terdapat pada RO Harmonis bidang kesehatan dan keluarga berencana dengan subbidang keluarga berencana dengan Pagu sebesar Rp6,77 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp5,30 miliar (78,37 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dijumpai BKKBN dalam pelaksanaan anggaran RO Harmonis, yaitu kegiatan yang baru dilaksanakan minggu keempat November, serta pertanggungjawaban yang belum dilaporkan dan masih dikerjakan.

Kementerian Kesehatan memiliki beberapa subbidang dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana RO Harmonis bersama DAK Fisik, yaitu subbidang Penguatan sistem kesehatan dengan Pagu sebesar Rp2,08 miliar (42 persen dari total Pagu Kementerian Kesehatan), telah direalisasikan Rp1,08 miliar (51,90 miliar dari Pagu), subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dengan Pagu sebesar Rp1,79 miliar (36,11 persen dari total Pagu Kementerian Kesehatan), telah direalisasikan sebesar Rp0,51 miliar (28,51 persen dari Pagu) dan subbidang pengendalian penyakit dengan Pagu sebesar Rp1,08 miliar (21,89 persen total Pagu Kementerian Kesehatan), telah direalisasikan sebesar Rp0,10 miliar (92,18 dari Pagu). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan anggaran terkait RO Harmoni diantaranya, yaitu perubahan jadwal kegiatan sebagai akibat dari adanya revisi POK, terdapat kesalahan input capaian output, terbatasnya

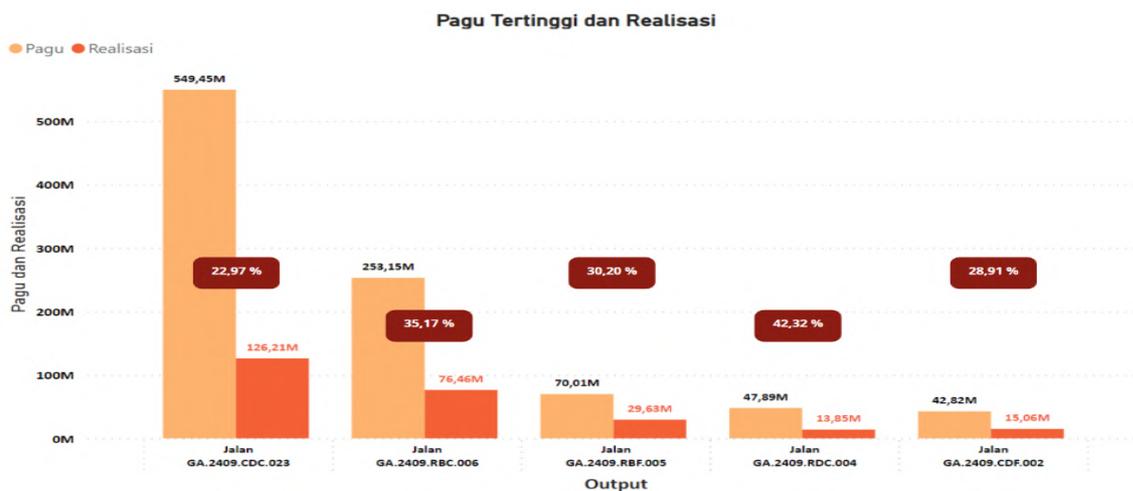
RO Harmonis yang terdapat pada Perpunas RI, berada pada subbidang perpustakaan, bidang pendidikan, dengan Pagu sebesar Rp282,83 miliar, yang telah direalisasikan sebesar Rp144,30 miliar (51,02 persen dari Pagu).

3.2 Kinerja Belanja K/L pada Belanja RO Harmonis

3.2.1 Progress Sampai Dengan Triwulan III 2023

a. Bidang jalan

Grafik 3.15 – Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - jalan



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Pagu terbesar pada bidang jalan, terdapat pada Rincian Output dengan kode COA (Chart of Account) GA.2409.CDC.023, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kepri, dengan uraian output berupa dukungan penanganan jalan daerah. Kegiatan ini memiliki Pagu Sebesar



Rp549,45 miliar (50,31 persen dari total Pagu bidang jalan). Realisasi rincian output ini baru direalisasikan sebesar Rp126,21 miliar (22,97 persen).

Selanjutnya kegiatan dengan Pagu terbesar kedua yaitu dengan kode COA GA.2409.RBC.006, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kepri, dengan uraian output berupa pembangunan jalan trans pada 18 pulau 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp253,15 miliar (23,18 persen dari total Pagu bidang jalan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp76,46 miliar (30,20 persen dari Pagu).

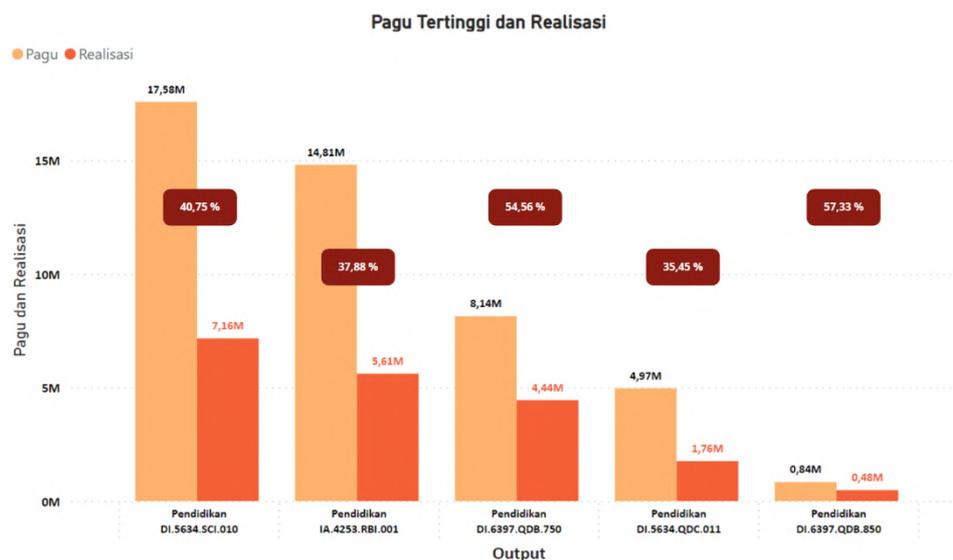
Kegiatan dengan Pagu terbesar ketiga yaitu dengan kode COA GA.2409.RBF.005, merupakan rincian output yang dilaksanakan di lingkup Kepri, yang memiliki uraian output berupa pembangunan jembatan trans pada 18 pulau 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp70,00 miliar (6,41 persen dari total Pagu bidang jalan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp29,63 miliar (6,41 persen dari Pagu).

Kemudian kegiatan dengan Pagu terbesar keempat pada bidang jalan yaitu dengan kode COA GA.2409.RDC.004, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kepri, dengan uraian output berupa jalan kawasan prioritas (ProPN). Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp47,89 miliar (4,38 persen dari total Pagu bidang jalan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp13,85 miliar (29,91 persen dari Pagu).

Kegiatan dengan Pagu terbesar kelima pada bidang jalan yaitu dengan kode COA GA.2409.CDF.002, kegiatan yang dilaksanakan pada lingkup Kepri, dengan uraian output berupa preservasi jembatan. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp42,82 miliar (3,92 persen dari total Pagu bidang jalan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp15,06 miliar (35,17 persen dari Pagu).

b. Bidang Pendidikan

Grafik 3.16 – Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Pendidikan



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Pada bidang pendidikan, kegiatan dengan Pagu terbesar adalah pada rincian output dengan kode DI.5634.SCI.010. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan dengan uraian output berupa guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp17,58 miliar (36,63 persen dari total Pagu bidang pendidikan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,16 miliar (40,75 persen dari Pagu).



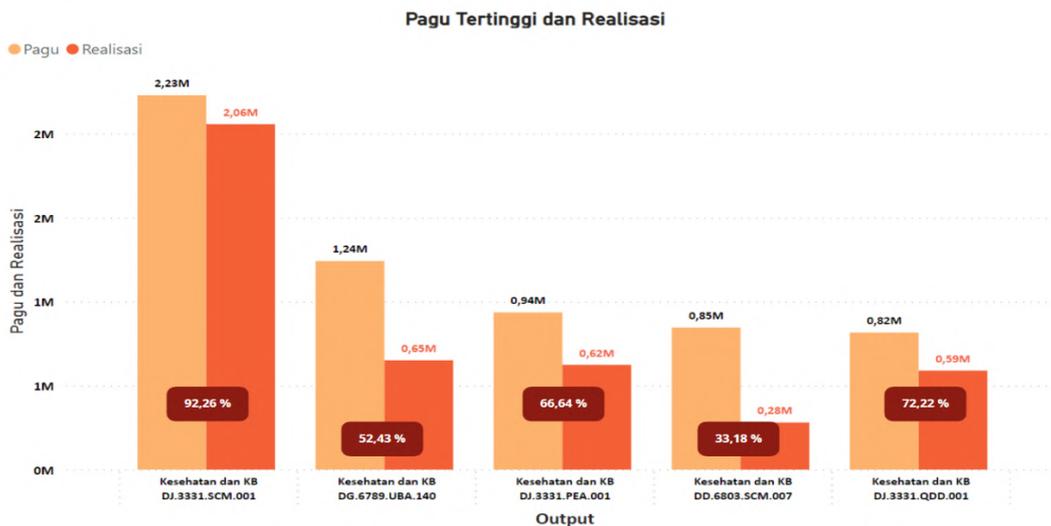
Selanjutnya pada bidang pendidikan, kegiatan dengan Pagu terbesar kedua terdapat pada rincian output dengan kode COA IA.4253.RBI.001. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dengan uraian output berupa rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp14,81 miliar (30,86 persen dari total Pagu bidang pendidikan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,61 miliar (37,88 persen dari Pagu).

Kegiatan dengan Pagu terbesar ketiga yaitu pada COA DI.6397.QDB.750, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan dengan uraian output berupa Satuan Dikdas dan Dikmen yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp8,14 miliar (16,96 persen dari total Pagu bidang pendidikan), dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,44 miliar (54,56 persen dari Pagu).

Pagu terbesar keempat pada bidang pendidikan terdapat pada COA DI.5634.QDC.011 dengan uraian output guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran dan dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp4,97 miliar (10,35 persen dari total Pagu bidang pendidikan), dengan realisasi anggaran seb.

c. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Grafik 3.17 – Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi – Kesehatan dan KB



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Pagu terbesar pada bidang kesehatan dan keluarga berencana, terdapat pada Rincian Output dengan kode COA (Chart of Account) DJ.3331.SCM.001, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kota Batam, dengan uraian output berupa pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini memiliki Pagu Sebesar Rp2,28 miliar (19,03 persen dari total Pagu bidang kesehatan dan keluarga berencana), dengan realisasi pada rincian output ini sebesar Rp2,06 miliar (22,97 persen dari Pagu).

Selanjutnya kegiatan dengan Pagu terbesar kedua yaitu dengan kode COA DG.6789.UBA.140, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kepri, dengan uraian output berupa dukungan peningkatan mutu, akreditasi, keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (Dekonsentrasi). Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp1,24 miliar (10,60 persen dari total Pagu bidang kesehatan dan keluarga berencana), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,65 miliar (52,43 persen dari Pagu).

Kegiatan dengan Pagu terbesar ketiga yaitu dengan kode COA DJ.3331.PEA.001, merupakan rincian output yang dilaksanakan di lingkup Kota Batam, yang memiliki uraian output



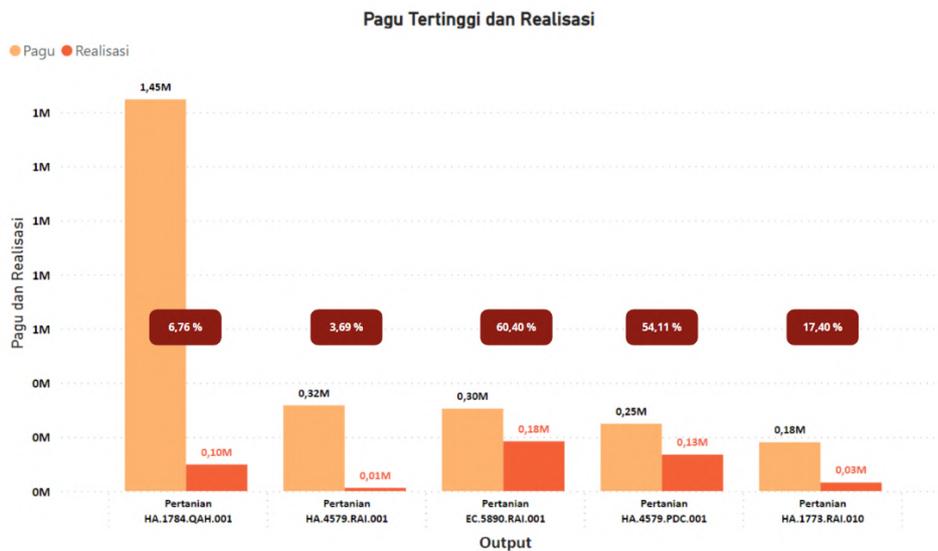
berupa penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan kab/kota. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,94 miliar (7,99 persen dari total Pagu bidang kesehatan dan keluarga berencana), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,62 miliar (66,64 persen dari Pagu).

Kemudian kegiatan dengan Pagu terbesar keempat pada bidang kesehatan dan keluarga berencana yaitu dengan kode DD.6803.SCM.007, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kepri, dengan uraian output berupa tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,85 miliar (7,22 persen dari total Pagu bidang kesehatan dan keluarga berencana), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,28 miliar (33,18 persen dari Pagu).

Kegiatan dengan Pagu terbesar keenam, namun memiliki realisasi sangat kecil pada bidang kesehatan dan keluarga berencana yaitu dengan kode DD.6803.SCM.006, kegiatan yang dilaksanakan pada lingkup Kepri, dengan uraian output berupa tenaga kesehatan/non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,70 miliar (5,93 persen dari total Pagu bidang kesehatan dan keluarga berencana), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,00 miliar (0,00 persen dari Pagu).

d. Bidang Pertanian

Grafik 3.18 – Pagu Tertinggi dan Realisasinya Belanja Terkait RO Harmonisasi - Pertanian



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Pada bidang pertanian Kegiatan dengan Pagu terbesar berupa pada rincian output dengan kode HA.1784.QAH.001, kegiatan yang dilaksanakan di Kepri ini memiliki uraian output pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp1,45 miliar (47,82 persen dari total Pagu bidang pertanian), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,10 miliar (6,76 persen dari Pagu).

Selanjutnya pada bidang pertanian, kegiatan yang memiliki Pagu terbesar kedua berupa pada rincian output dengan kode HA.4579.PDC.001, kegiatan ini dilaksanakan di Kepri, yang memiliki uraian output berupa area penyaluran benih padi. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,32 miliar (10,46 persen dari total Pagu bidang pertanian), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,01 miliar (3,69 persen dari Pagu).



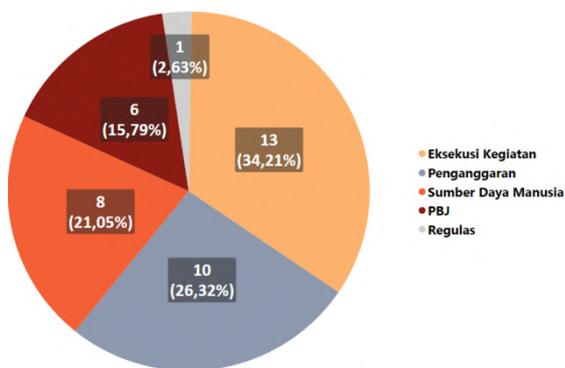
Kegiatan dengan Pagu terbesar ketiga yaitu COA EC.5890.RAI.001, kegiatan yang dilaksanakan di Kepri ini memiliki uraian output berupa kebun sumber benih tanaman perkebunan. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,30 miliar (10,05 persen dari total Pagu bidang pertanian), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,18 miliar (60,40 persen dari Pagu).

Pagu terbesar keempat pada bidang pertanian yaitu terdapat pada HA.4579.PDC.001 dengan uraian output sertifikat benih padi dan dilaksanakan di Kepri. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,25 miliar (8,23 persen dari total Pagu bidang pertanian), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,13 miliar (54,11 persen dari Pagu).

Kemudian Kegiatan dengan Pagu terbesar kelima yaitu HA.1773.RAI.010, kegiatan yang dilaksanakan di Kepri ini memiliki uraian output berupa area pengendalian OPT hortikultura. Kegiatan ini mempunyai Pagu sebesar Rp0,18 miliar (5,95 persen dari total Pagu bidang pertanian), dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,03 miliar (17,40 persen dari Pagu).

3.2.2 Identifikasi dan Analisis Masalah

Grafik 3.19 – Sebaran Kendala per Kategori



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Dari kelima bidang pada RO Harmonis, kendala yang paling banyak dialami, yaitu pada aspek eksekusi kegiatan dengan ditemukan sebanyak 13 kendala yang dialami oleh satuan kerja pada sampel yang telah diambil berdasarkan Pagu tertinggi dan realisasi rendah. Kemudian diikuti aspek penganggaran yang ditemukan sebanyak 10 kendala, sumber daya manusia sebanyak 8 kendala, Pengadaan sebanyak 6 kendala, dan Regulasi sebanyak 1 kendala.

Berdasarkan data yang tersaji terlihat satuan kerja-satuan kerja seringkali mengalami kendala pada saat eksekusi kegiatan. Kendala yang dialami yaitu berupa lokasi pelaksanaan kegiatan yang berada di daerah terluar dan sulit diakses, kondisi ekstrim di musim penghujan, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, banyaknya stakeholder yang terlibat dalam kegiatan, penolakan dari target kegiatan, dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berada pada kawasan tertentu.

Berdasarkan data yang tersaji terlihat satuan kerja-satuan kerja seringkali mengalami kendala pada saat eksekusi kegiatan. Kendala yang dialami yaitu berupa lokasi pelaksanaan kegiatan yang berada di daerah terluar dan sulit diakses, kondisi ekstrim di musim penghujan, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, banyaknya stakeholder yang terlibat dalam kegiatan, penolakan dari target kegiatan, dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berada pada kawasan tertentu.

Pada aspek penganggaran, beberapa kendala yang dialami oleh satuan kerja, yaitu terkait dengan DIPA yang baru terbit pada semester II, waktu penyelesaian yang baru bisa diluncurkan pada tahun 2024, kegiatan yang baru dapat dilaksanakan di bulan November, penyesuaian jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, terdapat blokir anggaran pada beberapa kegiatan, revisi anggaran, dan tidak dapat tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kendala yang dialami pada aspek sumber daya manusia (SDM), diantaranya yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki oleh satuan kerja, dan mutasi pegawai PPK yang membutuhkan waktu untuk pergantian.

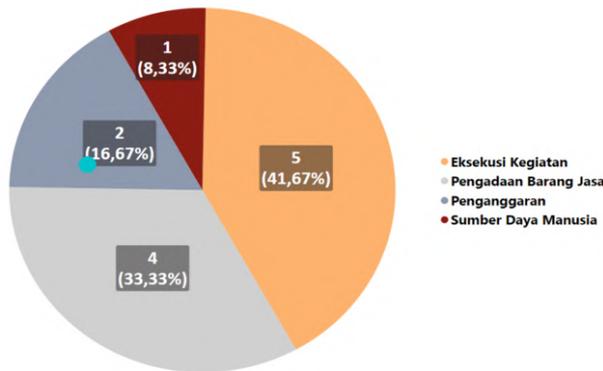
Dalam aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ) beberapa kendala yang ditemui, diantaranya yaitu penyedia barang dan jasa yang terbatas, kontrak kegiatan baru ditandatangani bulan Oktober, serta permasalahan administratif dan kurang kooperatifnya jasa konsultan dalam mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN.



Aspek regulasi memiliki satu kendala, yaitu terdapatnya perubahan regulasi baru, yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam eksekusi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.

Jalan

Grafik 3.20 – Sebaran Kendala per Kategori - jalan



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Dalam bidang jalan, kendala yang paling banyak muncul yaitu dalam aspek Eksekusi Kegiatan, sebanyak 5 kendala. Kemudian diikuti oleh aspek PBJ, sebanyak 4 kendala, penganggaran 2 kendala, dan SDM sebanyak 1 kendala.

Dalam bidang jalan ini, kendala dalam aspek eksekusi kegiatan diantaranya yaitu pelaksanaan yang dilakukan di daerah terluar Kepri seperti daerah-daerah di Kabupaten Natuna, cuaca ekstrim dan masuk musim penghujan. Sehingga kegiatan dalam Bidang Kegiatan menjadi terhambat dikarenakan

sulitnya eksekusi kegiatan dilaksanakan oleh pihak terkait.

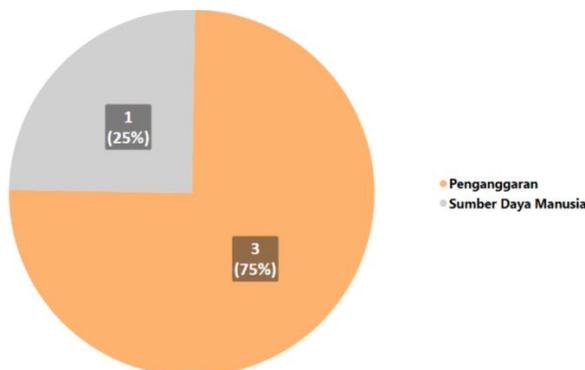
Kendala yang terjadi pada aspek PBJ diantaranya yaitu terbatasnya penyedia barang dan jasa, terutama pada daerah terluar seperti Kabupaten Natuna, dan kontrak kerja yang baru ditandatangani bulan Oktober.

Dalam aspek penganggaran kendala yang terjadi, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan akhir triwulan III 2023, sehingga baru pelaksanaan kegiatan menjadi semakin sempit, dan terdapat 5 paket pekerjaan yang baru dapat diluncurkan pada tahun 2024.

Dalam aspek SDM, terkait dengan DIPA yang terbit pada akhir triwulan III 2023, sehingga dengan waktu kegiatan yang semakin sempit, diperlukan penatausahaan SDM yang lebih baik pada satuan kerja.

Kesehatan dan Keluarga Berencana

Grafik 3.21 – Sebaran Kendala per Kategori – Kesehatan dan KB



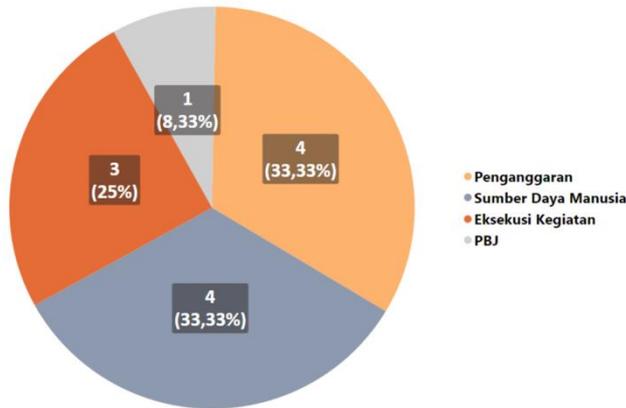
Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Kendala yang dijumpai pada bidang kesehatan dan keluarga berencana dan Keluarga berencana, yaitu terkait dengan aspek penganggaran dan SDM. Dalam aspek penganggaran kendala yang dijumpai, diantaranya yaitu timeline kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan November, dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat diperlukannya revisi POK dalam penyesuaian alokasi anggaran. Dalam aspek SDM kendala yang dialami yaitu terkait dengan terbatasnya jumlah mentor dan fasilitator yang tersedia, serta waktu pelatihan yang panjang, sementara mentor juga merupakan tenaga yang bekerja di bagian pelayanan.



Pendidikan

Grafik 3.22 – Sebaran Kendala per Kategori – Pendidikan



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Dalam bidang pendidikan kendala yang dialami paling banyak yaitu pada aspek SDM, sebanyak 4 kendala, diikuti oleh aspek penganggaran sebanyak 4 kendala, eksekusi kegiatan sebanyak 3 kendala, dan PBJ sebanyak 1 kendala.

Dalam aspek SDM terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu adanya pergantian bendahara dikarenakan daya serap yang sangat rendah, mutasi dan promosi pejabat PPK sehingga perlu waktu untuk pergantian, serta terbatasnya jumlah SDM pada satuan kerja dengan banyaknya pekerjaan.

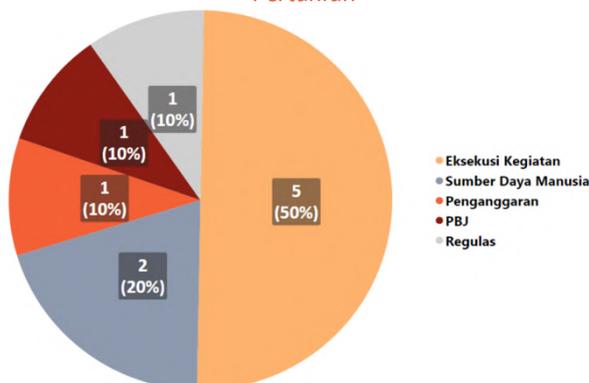
Kendala yang ditemui dalam aspek penganggaran, diantaranya yaitu terdapat blokir anggaran pada beberapa program, pengesahan DIPA pada bulan Oktober, dan terdapat revisi anggaran.

Kemudian kendala dalam eksekusi kegiatan, diantaranya yaitu lokasi kegiatan yang ekstrim sehingga perlu menyesuaikan jadwal kapal sebagai transportasi peserta, pelaksanaan yang terbagi menjadi beberapa tahap dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena diperlukan petunjuk teknis lebih lanjut, serta kegiatan yang melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu menunggu petunjuk teknis yang mengatur.

Dalam aspek PBJ, kendala yang ditemui pada bidang pendidikan yaitu, permasalahan administratif dan kurang kooperatifnya jasa konsultan dalam mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN.

Pertanian

Grafik 3.23 – Sebaran Kendala per Kategori – Pertanian



Sumber: Sintesa, 2023 (diolah).

Kendala yang paling banyak ditemui pada bidang pertanian, yaitu dalam aspek eksekusi kegiatan, sebanyak 5 kendala. Kemudian diikuti oleh aspek SDM sebanyak 2 kendala, penganggaran, Regulasi, dan PBJ dengan masing-masing 1 kendala.

Aspek eksekusi kegiatan mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu penolakan dari target kegiatan, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berada pada kawasan tertentu, mobilitas yang sulit pada daerah-daerah dengan pulau kecil dan anggaran mobilitas tidak tersedia, proses kegiatan yang memiliki alur cukup

panjang dan sulit dilaksanakannya kegiatan karena terbatasnya penyedia.

Dalam aspek SDM, kendala yang dialami yaitu terkait dengan keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki oleh satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi, sehingga terdapat keterlambatan atas proses pertanggungjawaban anggaran belanja.



Dalam aspek regulasi kendala yang ditemui yaitu disebabkan oleh adanya pengaturan/regulasi dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yang mewajibkan bahwa bantuan pestisida kepada petani harus bersifat nabati atau hayati (tidak mengandung banyak bahan kimia) Kemudian berdampak pada kendala PBJ yaitu proses pengadaan di Kepri masih terkendala karena belum terdapat banyak pilihan penyedia barang jasa yang memproduksi pestisida nabati/hayati.

Sedangkan dalam aspek penganggaran kendala yang terjadi, yaitu tidak dapat terlaksananya kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana, Berdasarkan informasi dari satuan kerja, penetapan target sebesar 39.910 dosis vaksin hewan dihitung berdasarkan populasi hewan ternak di Kepri. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, satuan kerja hanya sanggup menargetkan realisasi vaksin hewan sebanyak 6.580 dosis sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

3.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

3.3.1 Kesimpulan

- a. Wilayah Kepulauan Riau memiliki pagu terbesar dalam RO Harmonis, dengan Pagu sebesar Rp1044,33 miliar pada subbidang jalan. Namun Pagu yang besar tersebut belum dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu sebesar Rp284,96 miliar (27,29 persen dari Pagu). Beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, dan pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.
- b. Kabupaten Bintan, memiliki Pagu sebesar Rp34,06 miliar, telah direalisasikan Rp14,15 miliar (44,14 persen dari Pagu) yang berasal dari satuan kerja BGP dan BPMP lingkup Kemendikbud Ristek pada bidang pendidikan. Beberapa kendala yang dihadapi, yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, lokasi kegiatan yang terluar dan ekstrim sehingga sulit dijangkau, serta mutasi dan ketersediaan SDM mengganggu proses realisasi anggaran pada subbidang ini di Kabupaten Bintan.
- c. Kota Tanjungpinang memiliki total Pagu terbesar ketiga dalam RO Harmonis, dengan Pagu sebesar Rp14,81 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp5,61 miliar (37,88 persen dari Pagu) yang merupakan program dari satuan kerja BPPW Kepri, Kementerian PUPR pada bidang pendidikan.
- d. Kabupaten/Kota terakhir dengan Pagu terkecil, yaitu pada Kota Batam, dengan Pagu sebesar Rp6,77 miliar, dan telah direalisasikan Rp5,30 miliar (78,37 persen dari Pagu), merupakan program satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bidang kesehatan dan keluarga berencana. Meskipun telah menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat kendala yang teridentifikasi, yaitu kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada akhir November.
- e. Kementerian PUPR memiliki Pagu terbesar, yaitu Rp1107,03 miliar (95,85 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Namun realisasi yang dicapai masih terbilang kecil, yaitu sebesar Rp304,44 miliar (27,50 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.
- f. Kementerian Pertanian memiliki persentase realisasi terkecil, dengan Pagu sebesar Rp3,02 miliar (0,26 persen dari total Pagu), realisasi anggaran sebesar Rp0,68 miliar (22,44 persen



dari Pagu). Kendala yang teridentifikasi, yaitu realisasi *output* tidak dapat mencapai target, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan, dan terbatasnya jumlah SDM.

- g. Kemendikbud Ristek memiliki Pagu sebesar Rp32,90 miliar (2,85 persen dari Pagu), yang telah direalisasikan sebesar Rp14,90 miliar (44,83 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, pengesahan DIPA bulan Oktober, permasalahan dengan pihak ketiga, lokasi kegiatan di daerah terluar, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, menunggu juknis lebih lanjut, adanya pergantian bendahara, mutasi dan promosi pejabat PPK, ketersediaan SDM yang kurang.
- h. Kementerian Kesehatan dengan pagu sebesar Rp4,95 miliar (0,43 persen dari total Pagu), telah direalisasikan Rp2,59 miliar (52,32 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang ditemui, yaitu perubahan jadwal kegiatan sebagai akibat dari adanya revisi POK, terdapat kesalahan input capaian output, dan terbatasnya jumlah SDM.
- i. Pagu Belanja terkait RO Harmonis yang terdapat pada BKKBN adalah sebesar Rp6,77 miliar (0,59 persen dari total Pagu), telah direalisasikan Rp5,31 miliar (78,43 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dijumpai BKKBN dalam pelaksanaan anggaran RO Harmonis, yaitu kegiatan yang baru dilaksanakan minggu keempat November, serta pertanggungjawaban yang belum dilaporkan dan masih dikerjakan.

3.3.2 Rekomendasi

- a. Satuan Kerja pada lingkup KPPN Tanjungpinang, yaitu yang memiliki RO Harmonis di lingkup Kepri, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan agar dapat berkoordinasi dengan KPPN Tanjungpinang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh satuan kerja dalam lingkup KPPN Tanjungpinang diantaranya, sebagai berikut:
 1. KPPN Tanjungpinang melakukan pengawalan anggaran mulai dari proses perencanaan DIPA, terbitnya DIPA dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya KPPN ppsatuan kerja juga perlu memastikan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, hingga terlaksananya kegiatan. Melalui koordinasi, pengawalan penganggaran, dan pelaksanaan yang optimal, harapannya kegiatan tetap dapat dijalankan dengan efektif.
 2. Satuan Kerja BGP dan BPMP Provinsi Kepulauan Riau perlu bersikap proaktif menyampaikan kendala dalam proses penyelesaian blokir anggaran ke KPPN Tanjungpinang. KPPN Tanjungpinang juga perlu senantiasa mengingatkan satuan kerja agar segera menyelesaikan blokir anggaran, dengan mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif berkoordinasi hingga ke unit eselon I. Langkah selanjutnya satuan kerja perlu aktif berkoordinasi bersama KPPN Tanjungpinang dan Kanwil DJPb Kepri, terkait penganggaran yang efektif, sehingga meminimalisir revisi anggaran dikemudian hari, melalui sikap proaktif untuk bertanya dan memperbaiki tersebut, maka dapat meningkatkan kapasitas SDM satuan kerja dalam bidang penganggaran.
- b. Satuan kerja Perwakilan BKKBN Kepri perlu bersikap proaktif berkoordinasi bersama KPPN Batam dan Kanwil DJPb Kepri, sehubungan dengan kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran, sehingga kegiatan tidak mulai dilaksanakan menjelang akhir triwulan IV 2023. KPPN Batam juga perlu senantiasa memberikan arahan kepada satuan kerja Perwakilan



BKKBN Kepri agar dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan output dan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

- c. Kementerian PUPR memberikan penambahan pagu anggaran belanja barang pada satker Balai PJN di triwulan III 2023. Namun, Balai PJN mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi kegiatan atas penambahan Pagu tersebut, mengingat kondisi geografis Kepri merupakan wilayah kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada daerah terluar menjadi sulit dilaksanakan. Kementerian PUPR perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- d. Balai PJN Kepri yang mendapat tambahan anggaran di triwulan III 2023 perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline pekerjaan. Kedepannya perlu melakukan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah kepulauan, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang. Terkait permasalahan keterbatasan ketersediaan SDM, Balai PJN perlu mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi atau alat yang lebih efisien, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif.
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan pemberian vaksin hewan dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya vaksin bagi hewan ternak. Sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap vaksin bagi hewan ternak yang kemudian dapat mengumpulkan hewan ternak yang dilepas liarkan. Selanjutnya, kendala penyaluran benih padi yang terhambat karena proses yang panjang sertifikasi benih padi yang panjang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri perlu mengevaluasi bagaimana proses sertifikasi dapat berjalan dengan lebih efisien, melalui penyiapan benih padi yang unggul, persiapan dokumen sertifikasi, mengikuti alur dan prosedur yang tepat dan bekerjasama dengan pihak sertifikasi Kementerian Pertanian, sehingga alur sertifikasi benih padi dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam keterbatasan SDM, melalui pelatihan teknis SDM dengan memanfaatkan teknologi dan metode baru.
- f. Satuan kerja BGP dan BPMP Kepri perlu mempercepat penyelesaian blokir anggaran, dengan bersikap proaktif berkoordinasi ke tingkat wilayah, hingga Eselon 1. Selanjutnya terkait kendala revisi anggaran, satker perlu melakukan perbaikan dalam proses penganggaran, dengan mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja melalui sistem penganggaran berbasis kinerja. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terukur dalam output, *outcome* dan dukungan pendanaan yang diperlukan. Selanjutnya, kegiatan yang perlu memperhatikan petunjuk teknis lebih lanjut dapat dilakukan persiapan pada aspek-aspek tertentu yang dapat dipersiapkan terlebih dahulu. BGP dan BPMP juga perlu melakukan evaluasi dalam penetapan pihak ketiga pelaksana kegiatan, dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki. Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten. Sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat, dan



jumlah SDM yang diperlukan dalam sebuah kegiatan dapat diminimalisir dan dialihkan pada kegiatan lain.

- g. Dinas Kesehatan Kepri perlu memperbaiki proses penganggaran, serta membangun koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan, sehingga meminimalisir penyesuaian anggaran dan revisi. Kemudian secara berkelanjutan mengoptimalkan proses penganggaran, melalui sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. Sehingga, penyesuaian alokasi yang dapat berdampak pada mundurnya pelaksanaan kegiatan, dapat diminimalisir. Peningkatan kapasitas SDM juga dapat menjadi solusi, dengan memberikan pelatihan terkait proses penganggaran yang tepat dan optimal. Pelatihan lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan kebutuhan SDM dalam sebuah kegiatan dapat diminimalisir.
- h. Perwakilan BKKBN Kepri merencanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* pada minggu ke-4 Bulan November yang berakibat realisasi anggaran dan dampak (outcome) kegiatan tersebut menjadi terlambat. Kegiatan tersebut penting untuk menurunkan angka *stunting*. Oleh karena itu, agar output dan outcome atas kegiatan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebaiknya kegiatan tersebut direncanakan ke dalam kegiatan prioritas untuk dilaksanakan di awal tahun anggaran. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait penganggaran perlu dilaksanakan oleh satuan kerja, sehingga kualitas penganggaran menjadi lebih optimal.



BAB IV



Gurun Pasir Telaga Biru
Kab. Bintan

ANALISIS TEMATIK

Hasil dari CVI 1 dan CVI 2 menunjukkan hampir seluruh Kab/Kota memiliki tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang tinggi, kecuali Kota Batam. Dari sisi ketimpangan fiskal horizontal menunjukkan nilai Indeks Williamson yang fluktuatif namun tren menurun terjadi pada Indeks Entropi Theil Kepri dari tahun 2018-2023.





Analisis Tematik

4.1 Analisis Ketimpangan Fiskal Vertikal

4.1.1. Analisis Variabel Pembentuk Koefisien Ketimpangan Fiskal

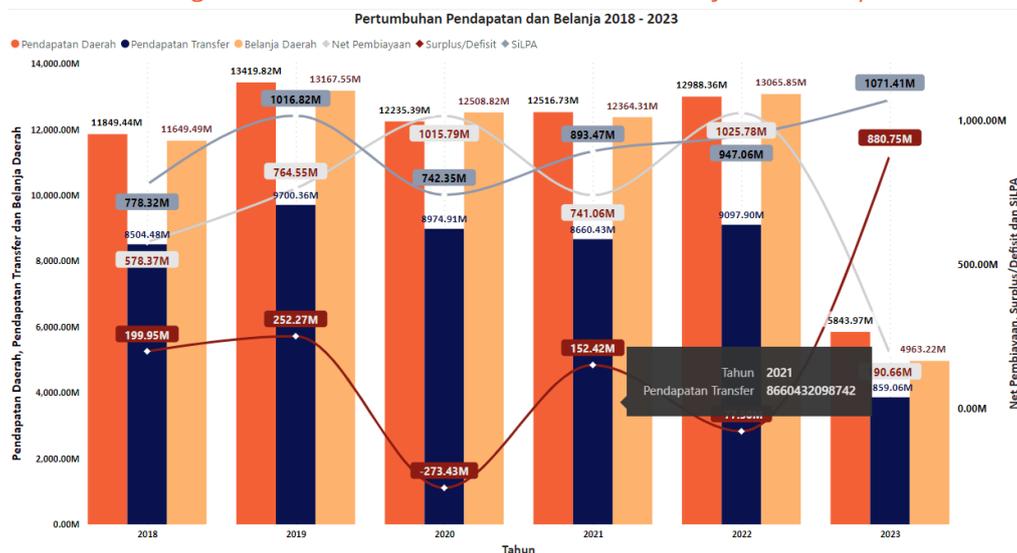
Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Kepri Secara Kumulatif Tahun 2018 sd. Semester 1 2023

Tabel 4.1 - Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Wilayah Prov. Kepri Secara Akumulatif (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Belanja Daerah	Surplus/Defisit	Pembiayaan Daerah Netto	SILPA
2018	11.849,44	8.504,48	11.649,49	199,95	578,37	778,32
2019	13.419,82	9.700,36	13.167,55	252,27	764,55	1.016,82
2020	12.235,39	8.974,91	12.508,82	(273,43)	1.015,79	742,35
2021	12.516,73	8.660,43	12.364,31	152,42	741,06	893,47
2022	12.988,36	9.097,90	13.065,85	(77,50)	1.025,78	947,06
2023	5.843,97	3.859,06	4.963,22	880,75	190,66	1.071,41

Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Grafik 4.1 - Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Wilayah Prov. Kepri Secara Akumulatif



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Pendapatan Daerah Pemda Kepri secara kumulatif dari tahun 2018 s.d. Semester I 2023 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, walaupun terjadi pelemahan di tahun 2020 sebesar 8,83 persen seiring dengan penurunan Pendapatan Transfer. Sampai dengan akhir bulan Juni 2023, realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp5.843,97 miliar atau telah mencapai 42,48 persen dari Target pada APBD 2023. Capaian tersebut lebih tinggi Rp747,49 miliar (yoy) dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi

Pendapatan Daerah tumbuh 14,67 persen (*yoy*), meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.859,06 miliar (66% dari Pendapatan Daerah) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.984,91 miliar (34% dari Pendapatan Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Belanja Daerah juga mengalami tren yang fluktuatif di mana terdapat kontraksi di tahun 2020 dan di tahun 2021 berturut-turut sebesar 5 persen dan 1,15 persen. Realisasi Belanja sampai dengan Semester I 2023 mencapai Rp4.963,22 miliar (34,39 persen dari pagu) atau tumbuh sebesar 14,97 persen (*yoy*). Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar Rp4.044,83 miliar, Belanja Modal sebesar Rp388,89 miliar, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2,6 miliar. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Pegawai Rp2.304,25 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp1.554,95 miliar, Belanja Bunga Rp4,56 miliar, Belanja Subsidi Rp1,42 miliar, Belanja Hibah Rp179 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp2,25 miliar, Belanja Modal Tanah Rp1,39 miliar, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp74 miliar, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp73 miliar, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp229,61 miliar, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp11,56 miliar, Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,2 miliar, dan Belanja Tak Terduga Rp2,6 miliar. Sedangkan untuk Transfer Dana Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp337 miliar, Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp1 miliar, dan Transfer Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Rp186,15 miliar. Realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer masih sangat rendah, mengingat Semester I telah terlewati.

APBD Konsolidasi menunjukkan tren Surplus kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2022 di mana terdapat Defisit berturut-turut sebesar Rp273,43 miliar dan Rp77,5 miliar. Pembiayaan Daerah mengalami tren fluktuatif dengan kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2022 berturut-turut sebesar Rp1.015,79 miliar dan Rp1.025,78 miliar. SILPA menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan pada tahun 2019 dan tahun 2023 yaitu berturut-turut sebesar Rp1.016,82 miliar dan Rp1.071,41 miliar, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan SILPA dengan jumlah terendah selama 6 tahun yaitu sebesar Rp742,35 miliar. Sampai dengan semester 1 2023, jumlah Surplus sebesar Rp880,75 miliar, Pembiayaan Daerah Netto sejumlah Rp 190,66 miliar dan SILPA sebesar Rp1.071,41 miliar.

4.1.2 Analisis Perkembangan Koefisien Ketimpangan Fiskal Vertikal

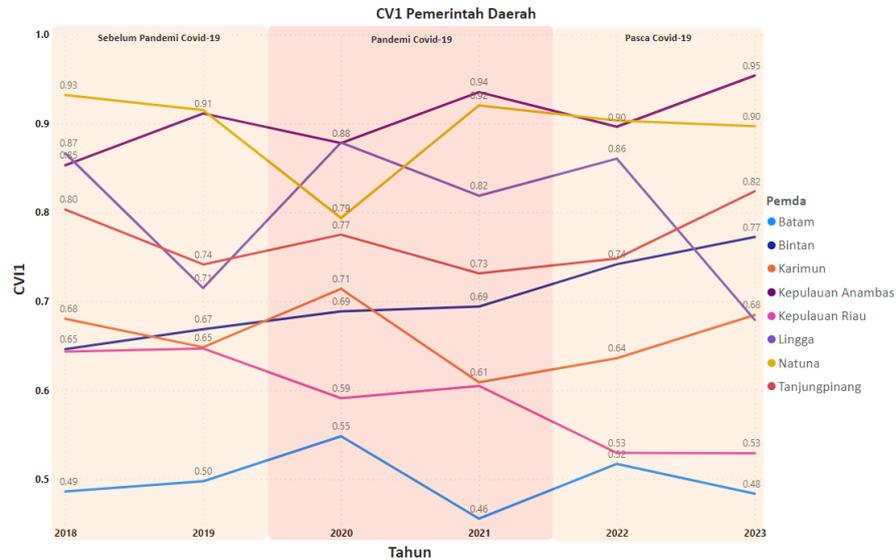
Apabila indeks CVI 1 atau CVI 2 rendah maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah rendah. Sebaliknya, apabila indeks CVI 1 atau CVI 2 tinggi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal setiap daerah lingkup Provinsi Kepri digambarkan dalam Grafik dengan menggunakan hasil pengukuran indeks CVI 1 dan CVI 2. Grafik menunjukkan Kabupaten dan Kota dengan indeks CVI 1 dan CVI 2 tinggi sebagai Kabupaten dan Kota yang memiliki tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang tinggi dan sebaliknya. CVI 1 mengukur *share* Pendapatan Transfer atas Belanja Pemerintah di daerah tersebut, sedangkan CVI 2 mengukur *share* Belanja Pemerintah Daerah yang tidak *tercover* oleh Pendapatan Asli Daerah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *share* Pendapatan Transfer dan semakin tinggi *share* Belanja



Pemerintah Daerah yang tidak dapat dicover oleh Pendapatan Asli Daerah maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal dari suatu Kabupaten dan Kota akan semakin tinggi dan sebaliknya.

Grafik 4.2 - Hasil Perhitungan CVI 1 Pemda Lingkup Wilayah Prov. Kepri Tahun 2018-2023



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan tren CVI 1, dalam kondisi sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018, terdapat empat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang cukup tinggi yaitu Kab. Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang. sedangkan Kota dengan tingkat ketimpangan fiskal vertikal terendah adalah Kota Batam. Kabupaten Natuna memiliki indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 0,93, diikuti oleh Kab. Lingga sebesar 0,87 dan Kab. Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang berturut-turut sebesar 0,85 dan 0,8. Kota Batam memiliki indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 terendah dibanding Kabupaten dan Kota lainnya di wilayah Provinsi Kepri yaitu sebesar 0,49.

Selanjutnya, pada periode pandemi COVID-19, hampir seluruh Kabupaten dan Kota menunjukkan tren peningkatan ketimpangan fiskal vertikal kecuali Provinsi Kepri, Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas. Pada saat terjadi pandemi COVID-19, Kab. Lingga merupakan salah satu daerah yang mengalami kenaikan indeks CVI 1 yang semula 0,71 menjadi 0,88. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan Pendapatan Transfer Kab. Lingga menjadi sebesar Rp892,37 miliar dan penurunan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp913,8 miliar. Pembiayaan Kab. Lingga pada tahun 2019 sebesar Rp130,47 miliar turun menjadi Rp54,69 miliar pada tahun selanjutnya. Sehingga kenaikan Pendapatan Transfer dan penurunan Belanja Daerah berakibat kepada kenaikan indeks CVI 1 Kab. Lingga pada saat pandemi COVID-19.

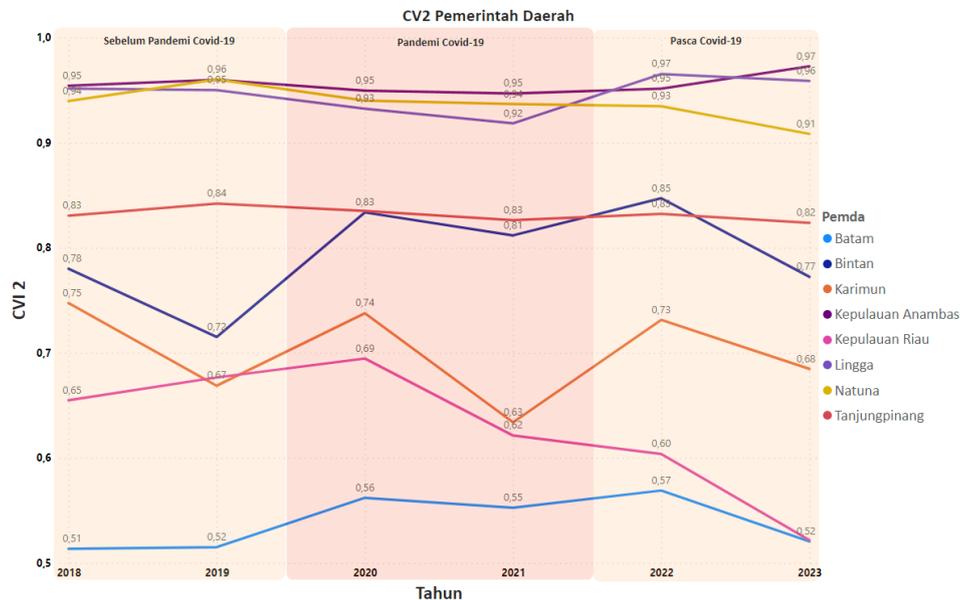
Di sisi lain, pada saat pandemi COVID-19, Kab. Natuna mengalami penurunan indeks CVI 1 menjadi 0,88. Pada tahun 2019, Pendapatan Transfer Kab. Natuna meningkat drastis sebesar Rp1.294,55 miliar dan menurun kembali di tahun selanjutnya menjadi Rp861,41 miliar. Namun demikian, Belanja Daerah Kab. Natuna tetap tinggi di tahun 2020, meskipun Pendapatan Transferya menurun, yaitu sebesar Rp1.069,46 miliar, dengan didukung oleh Pembiayaan yang cukup tinggi sebesar Rp159,07 miliar. Dengan demikian, dengan adanya penurunan Pendapatan Transfer yang drastis dan jumlah Belanja Daerah terjaga sehingga terjadi penurunan CVI 1 di Kab. Natuna pada masa pandemi COVID-19.

Pasca pandemi COVID-19, hampir seluruh Kabupaten dan Kota mengalami kenaikan tingkat ketimpangan fiskal vertikal kecuali Kab. Kepulauan Anambas dan Kab. Natuna. Sepanjang



periode, Kab. Kepulauan Anambas dan Kab. Natuna menunjukkan tren yang konsisten sebagai kabupaten dengan tingkat ketimpangan fiskal vertikal tertinggi (hampir mendekati angka satu), diikuti dengan Kab. Lingga dan Kota Tanjungpinang. Kota Batam juga konsisten sebagai kota dengan tingkat ketimpangan fiskal terendah di Prov. Kepri.

Grafik 4.3 - Hasil Perhitungan CVI 2 Pemda Lingkup Wilayah Prov. Kepri Tahun 2018-2023



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Tren yang ditunjukkan oleh grafik indeks ketimpangan fiskal CVI 2 menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten yang berada di posisi teratas dalam grafik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiga kabupaten tersebut memiliki tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang paling tinggi, yaitu berturut turut Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Pada periode sebelum pandemi COVID-19, indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga adalah sama, yaitu 0,95 dan Kabupaten Natuna adalah 0,94. Diikuti oleh kota Tanjungpinang dengan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 sebesar 0,83, Kabupaten Bintan sebesar 0,78 dan Kabupaten Karimun sebesar 0,75. Kota Batam juga menunjukkan tren yang sama seperti dalam pengukuran indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 di mana Kota Batam juga konsisten menjadi kota dengan indeks ketimpangan fiskal vertikal terendah untuk CVI 2 di lingkup wilayah Provinsi Kepri dengan indeks sebesar 0,51 pada periode awal sebelum pandemi.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa indeks ketimpangan fiskal CVI 2 Pemda di Kepri mengalami peningkatan selama periode pandemi COVID-19. Dimana pada tahun 2019, indeks CVI 2 rata-rata sebesar 0,73. Kemudian pada tahun 2020 indeks CVI 2 rata-rata meningkat menjadi 0,75. Meskipun terlihat adanya perbaikan di tahun 2021 yang turun menjadi 0,72, namun disayangkan pada periode setelah Pandemi COVID-19 yaitu tahun 2022, indeks CVI 2 rata-rata kembali meningkat menjadi 0,77. Selanjutnya pada semester II 2023, telah terlihat upaya pemulihan, dimana rata-rata CVI 2 Kepri telah kembali turun, menjadi 0,70.

Kabupaten Karimun menunjukkan tren yang sangat fluktuatif sepanjang periode. Pada tahun 2018, indeks CVI 2 sebesar 0,75 dan menurun menjadi 0,67 di tahun berikutnya. Pada era pandemi COVID-19, indeks CVI 2 meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,74 sebelum menurun menjadi 0,63 di tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,73. Pendapatan Transfer menunjukkan tren yang juga fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2019,



meningkat kembali di tahun 2020, kembali menurun di tahun 2021, dan meningkat kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2019, Pendapatan Transfer meningkat menjadi Rp895,55 miliar sebelum turun menjadi Rp821,17 miliar di tahun selanjutnya.

Belanja Daerah mengalami kontraksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang awalnya pada tahun 2018 sebesar Rp1.355,3 miliar menjadi Rp1.211,12 miliar pada tahun 2021. Belanja Daerah kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp1.370,77 miliar. Pembiayaan menurun pada tahun 2019, di tahun sebelumnya jumlahnya mencapai Rp92,52 miliar menjadi Rp26,25 miliar dan sedikit bertambah di tahun 2020 dan tahun 2021. Jumlah pembiayaan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp137,37 miliar. Fluktuasi pada Pendapatan Transfer dan Belanja Daerah menyebabkan pergerakan pada indeks CVI 2.

Pasca pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2022, sebagian besar Kabupaten dan Kota mengalami peningkatan dalam tingkat ketimpangan fiskal vertikal kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang, namun ketiganya tetap menunjukkan tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan fiskal vertikal Kabupaten dan Kota lingkup wilayah Provinsi Kepri, baik CVI 1 maupun CVI 2, keduanya menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten dan Kota memiliki tingkat ketimpangan fiskal vertikal yang tinggi, kecuali Kota Batam dengan rentang indeks CVI 1 dan CVI 2 yang tidak pernah menyentuh angka 0,6. Kota Batam memiliki Pendapatan Asli Daerah yang mencapai proporsi 50 persen dari total Pendapatan Daerahnya.

4.2 Analisis Ketimpangan Fiskal Horizontal

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pembentuk Indeks Williamson dan Indeks *Entropi Theil*

a. Perkembangan PDRB ADHK Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Tabel 4.2 - Perkembangan PDRB ADHK Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karimun	9.016,34	9.456,92	9.117,12	9.332,77	9.741,85	-
Bintan	13.886,09	14.512,07	13.902,16	13.933,49	14.551,76	-
Natuna	15.036,09	15.299,36	14.642,75	14.645,40	14.661,78	-
Lingga	2.790,12	2.934,66	2.914,60	2.971,55	3.082,79	-
Kepulauan Anambas	12.063,35	12.047,35	11.104,45	11.108,49	11.118,23	-
Batam	102.718,60	108.800,35	106.029,65	111.068,95	118.665,2	-
Tanjungpinang	13.979,22	14.436,94	13.938,24	14.020,21	14.597,57	-
Total PDRB Kepri	169.489,81	177.487,65	171.648,97	177.080,86	186.419,1	-

(dalam juta Rupiah)

Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

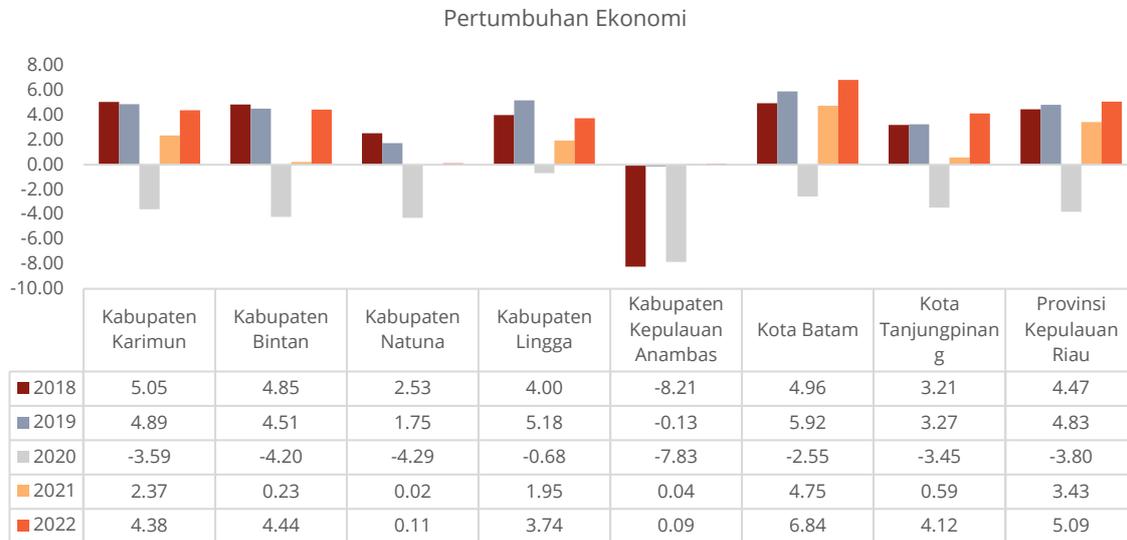
Perkembangan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2018-2022 untuk seluruh wilayah Provinsi Kepri secara keseluruhan bergerak tumbuh positif, kecuali pada Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat kembali ke level PDRB pra pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Provinsi Kepri mengalami penurunan PDRB ADHK rata-rata 3,80%. Namun pada tahun 2022, total PDRB di wilayah Kepri sudah melebihi capaian PDRB pra pandemi (2019) dengan pertumbuhan sebesar 1,40%. Kota Batam merupakan daerah dengan PDRB ADHK tertinggi dengan rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar



Rp109.456.554,14 Juta, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar Rp2.938.743,54 Juta.

b. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Grafik 4.4 - Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

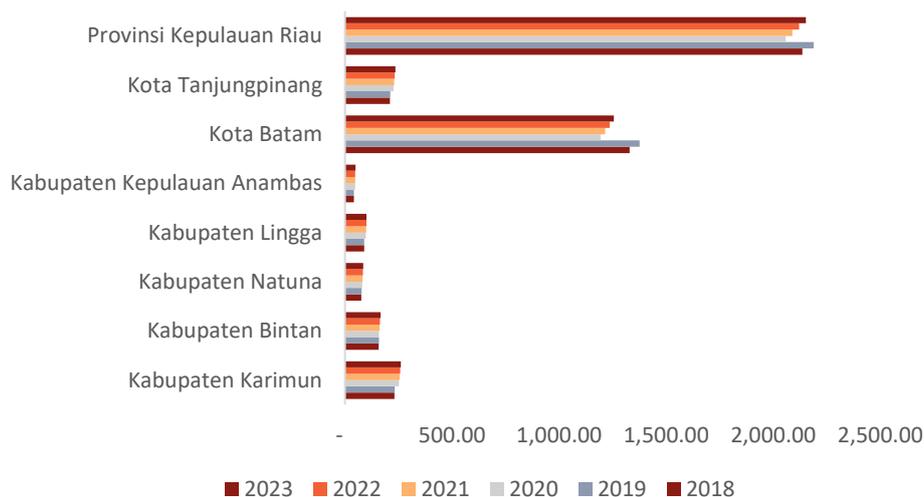


Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepri telah bertumbuh positif dan mulai kembali ke kinerja pra pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, pada Provinsi Kepri telah terjadi pertumbuhan sebesar 5,09% pada tahun 2022. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 0,09%. Namun pertumbuhan ini cukup baik apabila dibandingkan dengan tahun 2018-2020 di mana terjadi pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun-tahun tersebut.

c. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Grafik 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Pada perkembangan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kepri, terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 2.136,52 ribu jiwa menjadi 2.121,48 ribu jiwa pada tahun 2022. hal ini terjadi karena pada masa pandemi COVID-19 banyak penduduk yang merantau dari daerah lain pulang kembali ke daerah masing-masing. Pengurangan terbesar terjadi di Kota



Batam sebesar 182,05 ribu jiwa (2019 – 2020). Pada era sebelum pandemi COVID-19, yaitu tahun 2018, Kota Batam merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Provinsi Kepri dengan jumlah penduduk sebesar 1.329.773 jiwa dari jumlah total penduduk 2.136.521 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 41.927 jiwa. Selanjutnya, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga juga memiliki jumlah penduduk yang rendah, berturut-turut sebesar 76.968 jiwa dan 89.501 jiwa.

d. Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kab. dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Tabel 4.3 - Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kab. Dan Kota di Wilayah Provinsi Kepri

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	39,007.30	40,306.70	36,056.42	35,971.09	36,599.14
Bintan	87,927.25	90,019.69	87,223.78	85,712.39	87,777.00
Natuna	195,355.09	194,149.33	180,061.12	175,680.15	171,591.20
Lingga	31,174.20	32,576.60	29,589.22	29,520.34	29,972.77
Kepulauan Anambas	287,722.77	282,934.38	235,179.04	227,927.17	221,055.99
Batam	77,245.21	76,586.31	88,970.46	90,292.84	93,480.38
Tanjungpinang	66,796.74	67,574.41	61,397.32	60,077.95	60,860.25
Provinsi Kepulauan Riau	81,206.20	81,138.52	85,012.58	85,425.89	87,238.26

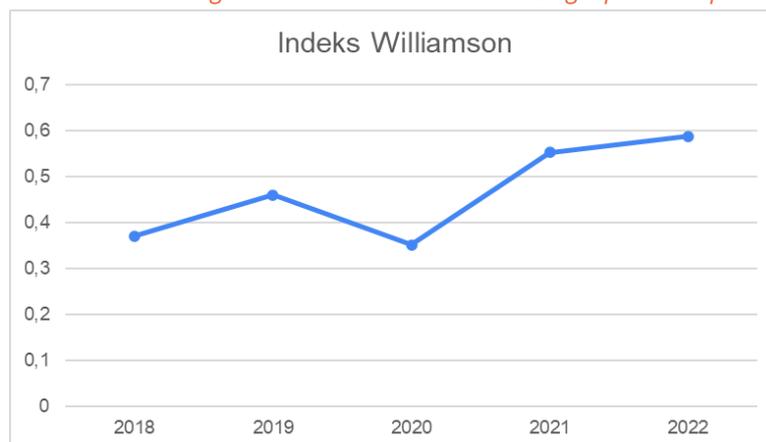
Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan PDRB per Kapita, maka wilayah dengan nilai PDRB per Kapita tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PDRB per Kapita rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah Rp250,963,87 ribu disusul dengan Kab. Natuna dengan rata-rata Rp183.367,38 ribu. Sedangkan wilayah dengan PDRB per Kapita ADHK 2010 terendah adalah Kab. Lingga dengan rata-rata sebesar Rp30.566,62 ribu.

4.2.2. Analisis Perkembangan Hasil Perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil

a. Analisis Hasil Perhitungan Indeks Williamson

Grafik 4.6 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Pemda Lingkup Prov. Kepri Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Indeks Williamson dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita per kabupaten dan kota, PDRB per kapita per provinsi, serta jumlah penduduk per kabupaten dan kota serta provinsi. Grafik menunjukkan bahwa indeks Williamson mengalami tren peningkatan dari tahun 2018-2022 meskipun sempat terjadi penurunan indeks pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan fiskal horizontal di Provinsi Kepri semakin tinggi. Berdasarkan hasil



pengukuran indeks Williamson, pada periode sebelum pandemi COVID-19 yaitu tahun 2018, tingkat ketimpangan fiskal horizontal di wilayah Provinsi Kepri sebesar 0,37. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan indeks Williamson menjadi 0,46. Ketika memasuki era pandemi COVID-19, pada tahun 2020 terjadi penurunan indeks Williamson menjadi 0,35. Pada tahun 2021, kembali terjadi kenaikan indeks Williamson menjadi 0,55 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,59.

b. Analisis Hasil Perhitungan Indeks *Entropi Theil*

Tabel 4.4 - Perkembangan Indeks *Entropi Theil*

Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	1,22	1,41	1,16	1,08	1,09
Bintan	4,61	5,27	4,62	4,63	4,63
Natuna	3,02	3,43	2,97	2,78	2,71
Lingga	1,40	1,60	1,41	1,19	1,14
Kepulauan Anambas	3,06	2,13	2,89	2,56	2,50
Batam	1,11	1,31	1,16	1,74	1,84
Tanjungpinang	2,74	1,87	2,54	2,27	2,25
Provinsi Kepri	17,17	17,01	16,75	16,24	16,16

Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Indeks *Entropi Theil* merupakan metode pengukuran ketimpangan fiskal horizontal yang mengukur ketimpangan di dalam dan antar wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat diketahui tingkat ketimpangan fiskal horizontal antar daerah di wilayah Provinsi Kepri. Berdasarkan hasil pengukuran indeks *Entropi Theil*, pada era sebelum pandemi COVID-19 yaitu tahun 2018, diketahui bahwa kota dengan tingkat ketimpangan fiskal horizontal terendah di wilayah Provinsi Kepri adalah Kota Batam dengan nilai indeks 1,11. Kota Batam merupakan kota dengan jumlah penduduk dan PDRB tertinggi di wilayah Provinsi Kepri. Sedangkan kabupaten dengan tingkat ketimpangan fiskal horizontal tertinggi adalah Kabupaten Bintan dengan nilai indeks mencapai 4,61.

Selanjutnya, pada tahun 2019, terjadi kenaikan tingkat ketimpangan fiskal horizontal di hampir seluruh kabupaten dan kota lingkup wilayah Kepri kecuali pada Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang. Indeks *Entropi Theil* pada Kabupaten Kepulauan Anambas yang semula sebesar 3,05 turun menjadi 2,13 pada tahun 2019 dan indeks *Entropi Theil* Kota Tanjungpinang juga turun dari awalnya sebesar 2,74 menjadi 1,86 pada tahun 2019. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang juga merupakan kabupaten dan kota yang mengalami penurunan jumlah PDRB di tahun 2019.

Pada era pandemi COVID-19, yaitu tahun 2020, hampir seluruh kabupaten dan kota lingkup wilayah Kepri mengalami penurunan tingkat ketimpangan fiskal horizontal kecuali pada Kab. Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan jumlah PDRB pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan PDRB yang cukup tinggi dengan penurunan jumlah penduduk cukup signifikan di Kota Batam. Hal ini menyebabkan Kota Batam menjadi satu-satunya kota dengan peningkatan indeks *Entropi Theil* di tahun 2021.



4.3. Analisis Peluang, Tantangan, Strategi Kebijakan Pusat-Daerah Dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal Daerah dan Implementasi UU HKPD

4.3.1 Analisis Tren Tingkat Transfer ke Daerah (TKD) dan Tingkat Ketimpangan Fiskal dan Horizontal

a. Tren Besaran Total Transfer ke Daerah (TKD) yang Diterima

Tabel 4.5 - Tren Perkembangan TKD Tahun 2018-Semester I 2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepri	2.278,00	2.626,46	2.317,19	2.406,60	2.241,14	898,96
Bintan	841,83	927,01	971,49	870,16	962,76	373,90
Karimun	940,03	842,62	895,56	821,18	917,74	427,95
Natuna	910,23	1.294,55	861,41	906,39	922,60	387,76
Kepulauan Anambas	795,04	1.073,86	772,38	799,05	781,69	360,70
Lingga	799,09	845,16	892,37	838,05	880,00	331,19
Batam	1.179,62	1.277,89	1.433,00	1.275,53	1.554,06	726,28
Tanjungpinang	760,63	812,82	831,52	743,47	837,91	352,31
Total Provinsi	8.504,48	9.700,36	8.974,91	8.660,43	9.097,90	3.859,06

(dalam miliar Rupiah)

Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

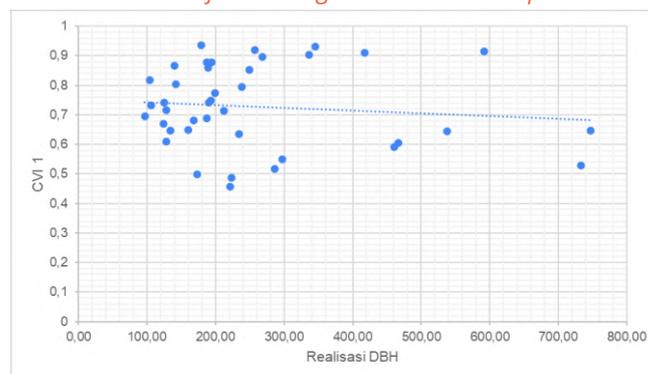
Dana Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Kepri memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan semester 1 2023. Hampir seluruh daerah mengalami peningkatan dana Transfer ke Daerah pada tahun 2019 kecuali Kabupaten Karimun. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah dana Transfer Ke Daerah yang signifikan pada Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang pada tahun sebelumnya mendapatkan dana transfer berturut-turut sejumlah Rp910,23 miliar dan Rp795,04 miliar meningkat menjadi Rp 1.294,55 miliar dan Rp1.073,86 miliar. Kota Batam juga mengalami peningkatan pendapatan transfer yang awalnya pada tahun 2018 sebesar Rp1.179,62 miliar menjadi Rp1.554,06 miliar pada tahun 2022. Kota Batam menunjukkan tren peningkatan pendapatan transfer dari tahun ke tahun, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021.

b. Tren Tingkat Ketimpangan Fiskal Vertikal

Untuk melihat pengaruh antara realisasi transfer ke daerah dengan ketimpangan fiskal vertikal, dilakukan analisis dengan menggunakan grafik *scatter plot* dan uji korelasi *Pearson*.

● Analisis Pengaruh DBH terhadap CVI 1

Grafik 4.7 Pengaruh DBH Terhadap CVI 1



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).



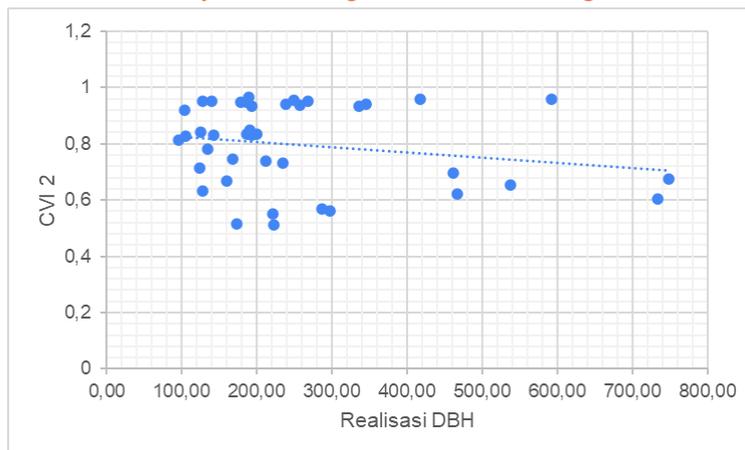
Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang relatif kecil antara besar realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI1. Di mana semakin besar realisasi DBH, maka semakin kecil indeks CVI 1. Hubungan antara besarnya realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal vertikal adalah linier. Artinya, titik-titik pada grafik *scatterplot* mengikuti pola garis lurus. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat dikatakan bahwa besar realisasi DBH merupakan faktor yang dapat mengurangi ketimpangan fiskal vertikal.

Kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam menyalurkan DBH kepada daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah. Dengan meningkatnya realisasi DBH, maka daerah-daerah akan memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu daerah-daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat mendorong daerah-daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena daerah-daerah akan memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya PAD, maka daerah-daerah akan menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

● Analisis Pengaruh DBH Terhadap CVI 2

Grafik 4.8 Hubungan Realisasi DBH dengan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

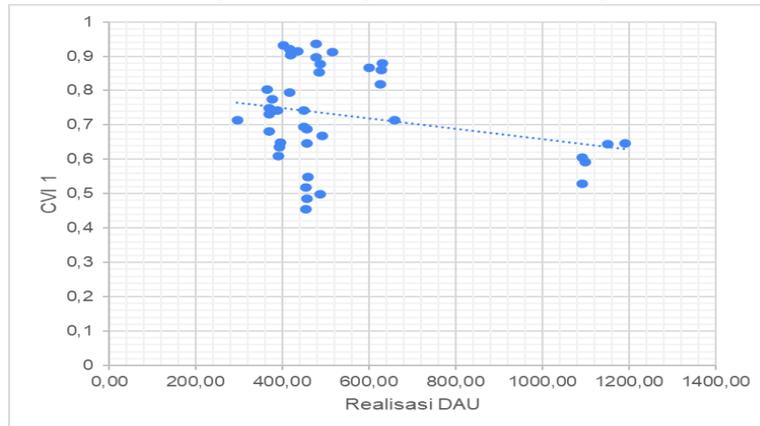
Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang relatif kecil antara besar realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2. Semakin besar realisasi DBH, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2.

Realisasi DBH merupakan salah satu instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah. Dengan meningkatnya realisasi DBH, maka daerah-daerah akan memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu daerah-daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.



● Analisis Pengaruh DAU terhadap CVI 1

Grafik 4.9 Hubungan Realisasi DAU dengan CVI 1



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

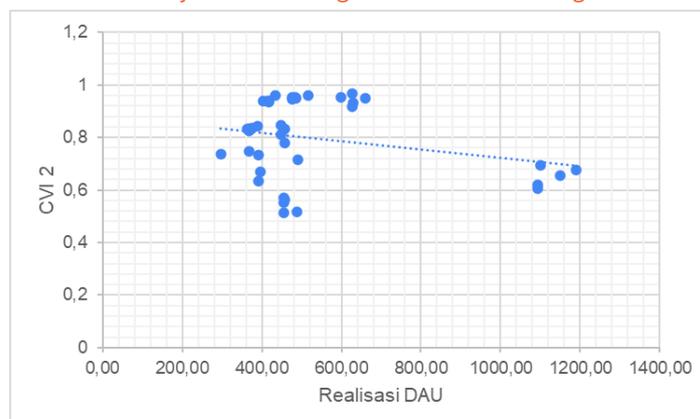
Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara besar realisasi DAU dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1. Semakin besar realisasi DAU, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1.

Secara khusus, berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua kelompok data yang terpisah dengan jelas. Kelompok pertama terdiri dari daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 yang relatif tinggi. Kelompok kedua terdiri dari daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 yang relatif rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah. Di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah, realisasi DAU merupakan sumber daya keuangan yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi, realisasi DAU hampir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1. Hal ini karena daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi sudah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah, contohnya melalui PAD.

● Analisis Pengaruh DAU Terhadap CVI 2

Grafik 4.10 Hubungan Realisasi DAU dengan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).



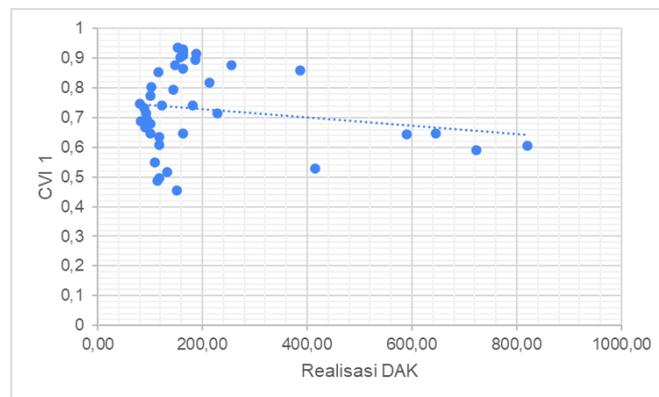
Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara besar realisasi DAU dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2. Semakin besar realisasi DAU, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2.

Secara lebih mendalam, sama dengan interpretasi pada CVI 1, berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut, terlihat terdapat dua kelompok data yang terpisah dengan jelas. Kelompok pertama terdiri dari daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 yang relatif tinggi. Kelompok kedua terdiri dari daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 yang relatif rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah. Di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif rendah, realisasi DAU merupakan sumber daya keuangan yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi, realisasi DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2. Hal ini karena daerah-daerah dengan realisasi DAU yang relatif tinggi sudah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah, contohnya berasal dari PAD.

● Analisis Pengaruh DAK terhadap CVI 1

Grafik 4.11 Hubungan Realisasi DAK dengan CVI 1



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang relatif kecil antara besar realisasi DAK dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1. Semakin besar realisasi DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1.

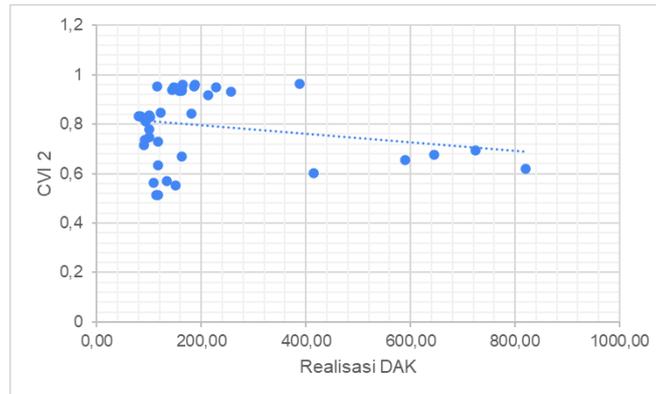
Secara lebih mendalam, sama dengan analisis sebelumnya pada DAU, terlihat adanya 2 kelompok data yang terbagi dengan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi DAK memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif rendah. Di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif rendah, realisasi DAK merupakan sumber daya keuangan yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif tinggi, realisasi DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1. Hal ini karena daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif tinggi sudah



memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah.

● Analisis Pengaruh DAK Terhadap CVI 2

Grafik 4.12 Pengaruh DAK Terhadap CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan data yang digambarkan dalam grafik *scatterplot* diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang relatif kecil antara besar realisasi DAK dan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2. Semakin besar realisasi DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2.

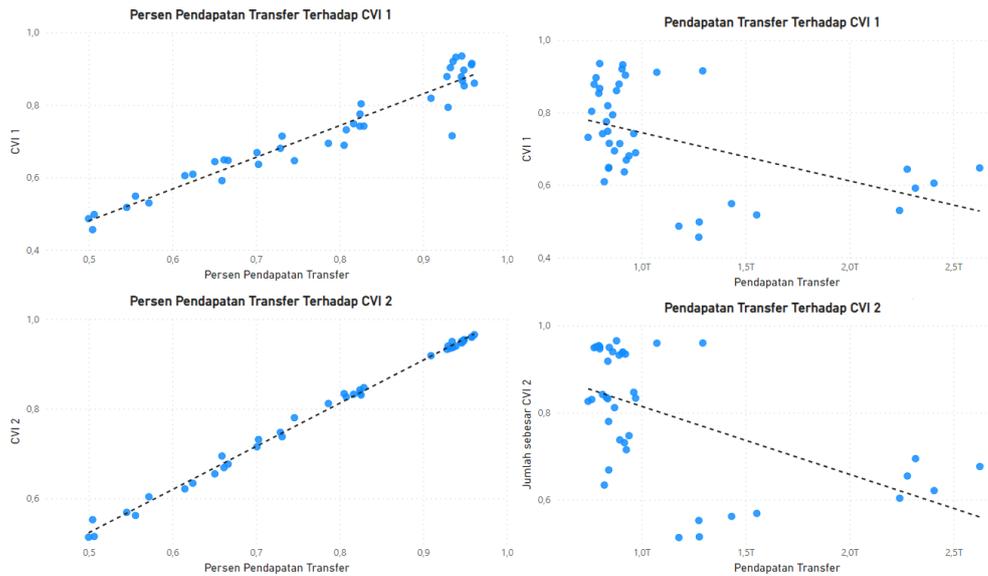
Secara khusus, sama dengan analisis sebelumnya pada CVI 1, dapat terlihat adanya 2 kelompok data yang terbagi dengan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi DAK memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2 di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif rendah. Di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif rendah, realisasi DAK merupakan sumber daya keuangan yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif tinggi, realisasi DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 2. Hal ini karena daerah-daerah dengan realisasi DAK yang relatif tinggi sudah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah.

Analisis *share* Pendapatan Transfer per Total Pendapatan Terhadap Ketimpangan Fiskal Vertikal

Untuk memperkaya analisis kami dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan pengaruh TKD terhadap ketimpangan fiskal vertikal di Kepri, kami memberikan analisis menggunakan *share* Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan, yang disajikan dalam grafik *scatterplot* berikut:



Grafik 4.13 Share Dana Transfer ke Daerah dan Pendapatan Terhadap CVI 1 dan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

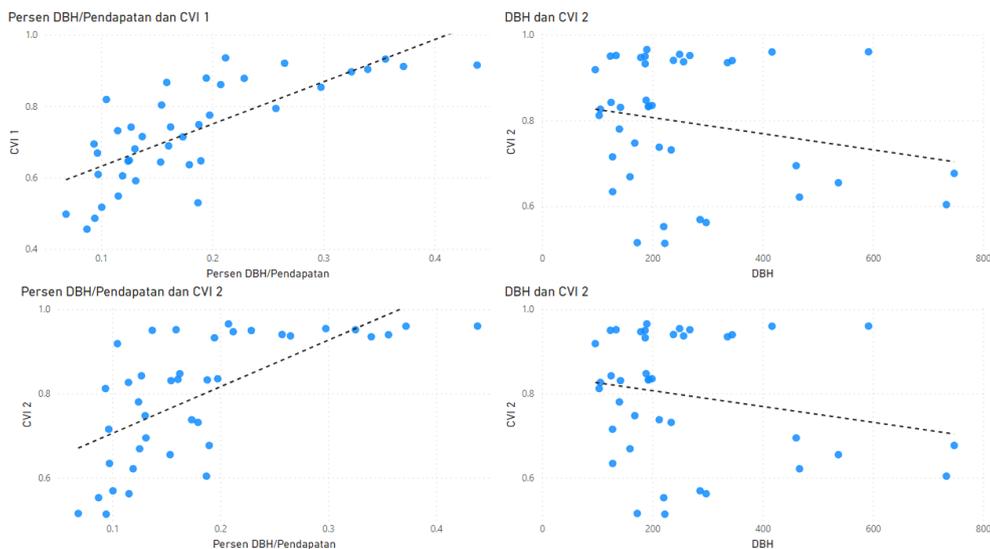
Berdasarkan grafik *scatter plot* di atas, terlihat bahwa besaran Pendapatan Transfer memiliki hubungan negatif dengan CVI, berdasarkan data yang terdapat di Provinsi Kepri, terlihat bahwa semakin besar Dana Transfer Ke Daerah, nilai CVI 1 dan CVI 2 cenderung lebih kecil.

Namun dalam hal *share* Pendapatan Transfer per Total Pendapatan, dapat disimpulkan berdasarkan *scatter plot* bahwa semakin tinggi persentase Pendapatan Transfer, maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, seiring dengan besarnya jumlah dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah, harus diimbangi dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketimpangan fiskal vertikal tidak semakin tinggi.

Apabila tingginya pendapatan transfer tidak diimbangi oleh tingginya PAD, maka akan meningkatkan tingginya persentase Pendapatan Transfer, yang dilain sisi akan meningkatkan ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditunjukkan oleh meningkatnya, indeks CVI1 dan CVI 2.

1. Pengaruh *share* DBH per Total Pendapatan terhadap CVI1 dan CVI2

Grafik 4.14 Share DBH per Total Pendapatan terhadap CVI 1 dan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).



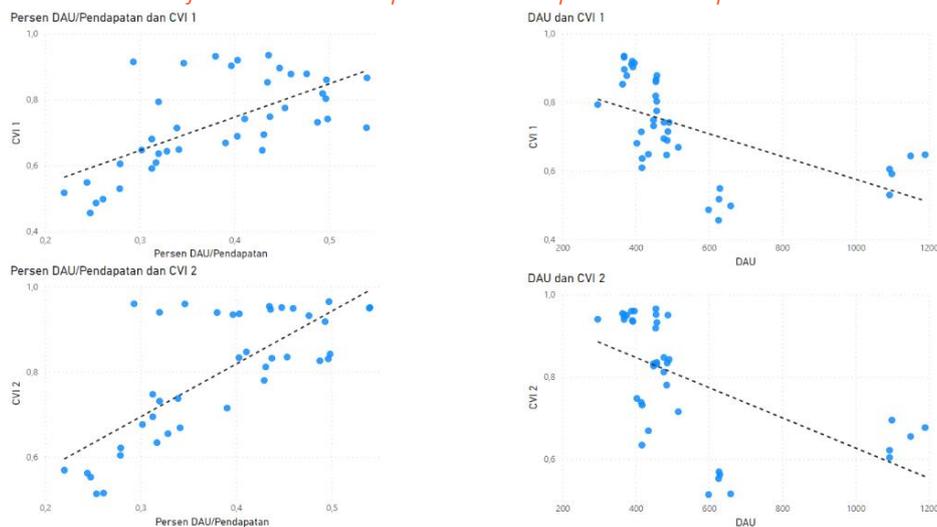
Berdasarkan grafik *scatter plot* di atas, terlihat bahwa besaran DBH memiliki hubungan negatif yang relatif kecil terhadap CVI dan CVI 2, berdasarkan data yang terdapat di Provinsi Kepri, dapat disimpulkan bahwa semakin besar DBH, nilai CVI 1 dan CVI 2 cenderung lebih kecil.

Di sisi lain, dalam *share* DBH per Total Pendapatan terlihat dari grafik *scatter plot* bahwa semakin tinggi persentase DBH dibagi Pendapatan, maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, seiring dengan besarnya jumlah DBH yang diterima Pemerintah Daerah, harus diimbangi dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketimpangan fiskal vertikal tidak semakin tinggi.

Apabila tingginya DBH tidak diimbangi oleh tingginya PAD, maka akan meningkatkan tingginya persentase DBH, yang dilain sisi akan meningkatkan ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditunjukkan oleh meningkatnya, indeks CVI1 dan CVI 2.

2. Pengaruh share DAU per Total Pendapatan terhadap CV1 dan CVI2

Grafik 4.15 Share DAU per Total Pendapatan Terhadap CVI 1 dan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan grafik *scatter plot* di atas, terlihat bahwa besaran Dana Alokasi Umum memiliki hubungan negatif dengan CVI 1 dan CVI 2, berdasarkan data yang terdapat di Provinsi Kepri, terlihat bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum, nilai CVI 1 dan CVI 2 cenderung lebih kecil.

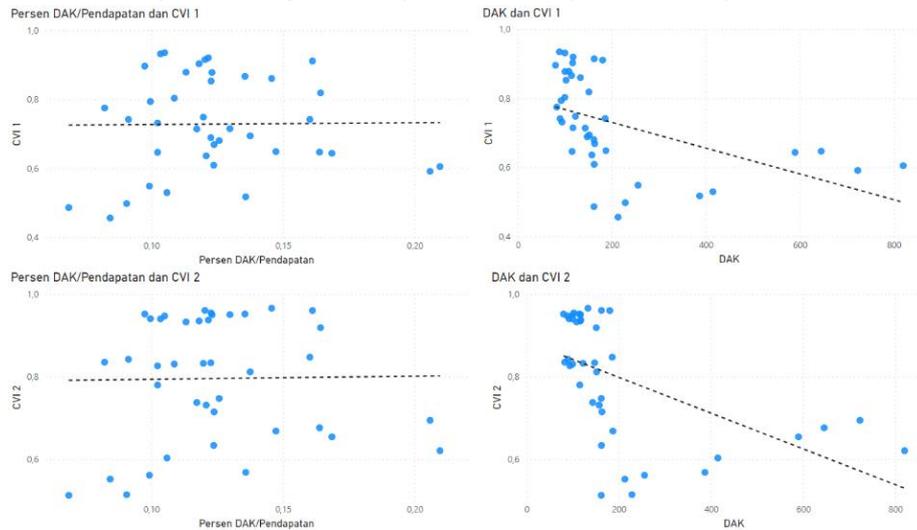
Dalam hal persentase, terlihat dari grafik *scatter plot* bahwa semakin tinggi *share* DAU per Total Pendapatan, maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, seiring dengan besarnya jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah, harus diimbangi dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketimpangan fiskal vertikal tidak semakin tinggi.

Apabila tingginya pendapatan transfer tidak diimbangi oleh tingginya PAD, maka akan meningkatkan tingginya persentase DAU, yang dilain sisi akan meningkatkan ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditunjukkan oleh meningkatnya, indeks CVI1 dan CVI 2.



3. Pengaruh DAK terhadap CV1 dan CV2

Grafik 4.16 Pengaruh DAK per Total Pendapatan terhadap CVI 1 dan CVI 2



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan grafik *scatter plot* di atas, terlihat bahwa besaran DAK memiliki hubungan negatif terhadap CVI dan CVI 2, berdasarkan data yang terdapat di Provinsi Kepri, dapat disimpulkan semakin besar DAK, nilai CVI 1 dan CVI 2 cenderung lebih kecil. Dengan demikian, semakin besar DAK, maka ketimpangan vertikal akan semakin mengecil.

Disisi lain, terlihat dari grafik *scatter plot* bahwa semakin tinggi *share* DAK per Total Pendapatan terhadap CVI 1 dan CVI 2 memiliki hubungan positif yang relatif sangat kecil. Dapat disimpulkan, seiring dengan meningkatnya *share* pendapatan transfer DAK, maka terjadi sedikit peningkatan dalam ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

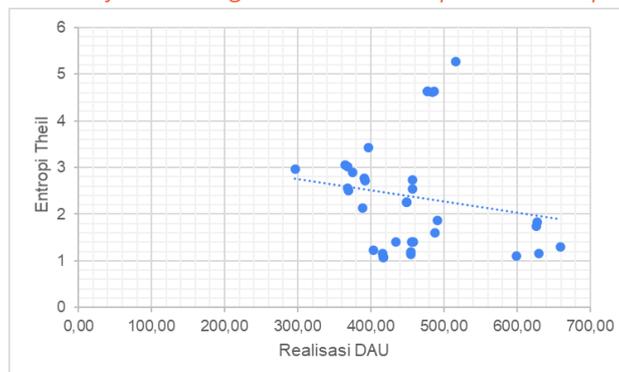
Dengan begitu, apabila tingginya pendapatan DAK tidak diimbangi oleh tingginya PAD, maka akan tidak memberikan dampak yang signifikan pada ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terlihat tidak begitu signifikan. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menilai pengaruh DAK terhadap ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c. Analisis Pengaruh TKD terhadap Ketimpangan Fiskal Horizontal

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang disalurkan untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal horizontal.

● Analisis Pengaruh DAU Terhadap Indeks Entropi Theil

Grafik 4.17 Pengaruh DAU Terhadap Indeks Entropi Theil



Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).



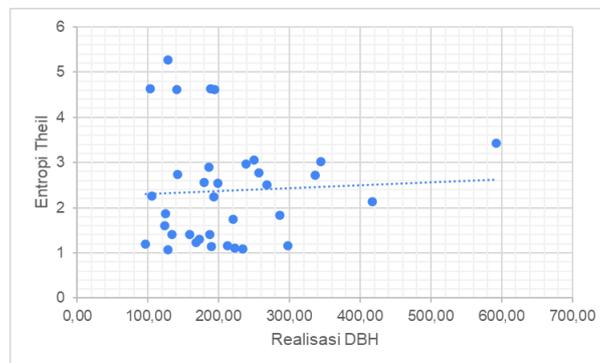
Berdasarkan grafik *scatterplot* yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara realisasi DAU dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Semakin besar realisasi DAU, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Maka dari itu, semakin besar realisasi DAU, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin kecil.

Realisasi DAU merupakan salah satu instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah. Dengan meningkatnya realisasi DAU, maka daerah-daerah akan memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu daerah-daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat mendorong daerah-daerah untuk meningkatkan PDRB per kapita. Hal ini karena daerah-daerah akan memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya PDRB per kapita, maka kesenjangan antardaerah dapat berkurang.

● Analisis Pengaruh Penyaluran DBH terhadap Indeks Entropi Theil

Grafik 4.18 Hubungan Realisasi DBH dengan Indeks Entropi Theil



Sumber: GFS 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

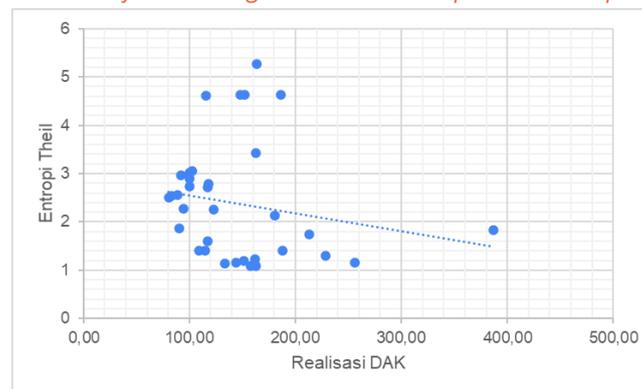
Berdasarkan grafik *scatterplot* yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang relatif kecil antara besar realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Hal ini berarti bahwa semakin besar realisasi DBH, maka semakin besar pula indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Dengan demikian, semakin besar realisasi DBH, maka semakin besar indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin besar.

Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik *scatterplot*, terlihat DBH menjadi salah satu faktor dalam peningkatan indeks *Entropi Theil*. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut, bagaimana DBH dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatnya ketimpangan fiskal horizontal di Kepulauan Riau.



● Analisis Pengaruh Penyaluran DAK Terhadap Indeks Entropi Theil

Grafik 4.19 Pengaruh DAK Terhadap Indeks Entropi Theil



Sumber: BPS Kepri 2018 s.d. 2023, 2023 (diolah).

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara besar realisasi DAK dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Hal ini berarti bahwa semakin besar realisasi DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Dengan demikian, semakin besar realisasi DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin kecil.

4.3.2 Analisis Kesiapan Daerah dalam Mendukung Upaya Penurunan Ketimpangan Fiskal

a. Analisis Kesiapan, Progres Implementasi, dan Tantangan Daerah dalam Implementasi Pemanfaatan Pembiayaan Utang Daerah

Berdasarkan hasil FGD dengan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah lingkup Provinsi Kepri pada tanggal 14 Oktober 2023, Pemerintah Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepri yang telah melakukan implementasi pembiayaan pinjaman daerah adalah hanya Pemerintah Daerah Provinsi Kepri dan dapat dilaporkan progress mengenai kesiapan daerah dalam mendukung upaya penurunan ketimpangan fiskal melalui pemanfaatan pembiayaan utang daerah sebagai berikut:

1. Identifikasi Progres Kesiapan Daerah Terkait Regulasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kepri telah menerbitkan beberapa peraturan daerah yang diperlukan untuk dapat melakukan pembiayaan utang daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Prov. Kepri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Perda Prov. Kepri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Prov. Kepri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pergub Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Perda Prov. Kepri Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pergub Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Identifikasi Implementasi/Realisasi Pembiayaan Utang Daerah

Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan Pernyataan Efektif Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Daerah Atas Nama Pemerintah Provinsi Kepri dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk



membiayai 7 (tujuh) Paket Strategis yaitu pembangunan *fly over* Basuki Rahmat-Dompok Simpang Ramayana Kota Tanjung Pinang, pembangunan pedestrian dan penataan median Jalan Bandara R.H. Fisabilillah, pembangunan jalan lingkar pesisir Kota Tanjungpinang (lanjutan), penataan jalan kawasan ibukota Provinsi Kepri di Dompok Kota Tanjungpinang, penataan Kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan di Kabupaten Karimun dan pembangunan integrasi Dermaga Pelantar I dan Pelantar II (Segmen Pelantar I dan Segmen Pelantar II) Tanjungpinang.

Tujuh paket pekerjaan tersebut dibiayai dengan total pagu pembiayaan sejumlah Rp162.087.178.360,- dengan jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan (availability period) 6 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada fasilitas pembiayaan yang dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri melakukan perubahan masa penarikan fasilitas pembiayaan (availability period) pada Akta 18, sehingga awalnya bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023 menjadi September 2022 sampai dengan Desember 2023.

Telah dilakukan pencairan pembiayaan sebesar Rp142.781.194.269,- pada paket pekerjaan Akta 15, 16, 17, 18 yang telah dibayarkan kepada penyedia pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan pencairan pembayaran atas beberapa Akta dengan nominal yang berbeda. Pertama, terdapat rincian pencairan Akta 15 pada tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp6.340.833.831,- yang terdiri atas pencairan pembangunan *fly over* Basuki Rahmat - Dompok Simpang Ramayana kota Tanjungpinang dengan jumlah Rp4.084.783.010,-, pencairan pembangunan integrasi Dermaga Pelantar I dan Pelantar II Tanjungpinang (Segmen Pelantar I dan Segmen Pelantar II) pada Paket Pekerjaan Segmen Pelantar I sejumlah Rp2.256.050.821,-. Yang kedua, terdapat pencairan Akta 17 atas Paket Pekerjaan Penataan Kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang sejumlah Rp2.048.857.049,- pada tanggal 27 Maret 2022. Yang terakhir, terdapat pencairan Akta 18 sepanjang tahun 2023 per tanggal 2 Oktober 2023 dengan total realisasi pembayaran sebesar Rp5.864.727.922,-.

3. Identifikasi Tantangan dalam Implementasi Pemanfaatan Pembiayaan Utang Daerah

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam melakukan penerapan pembiayaan utang daerah. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam pembiayaan utang daerah adalah terkait persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah, kerangka acuan kegiatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan, dan rencana Keuangan Pinjaman Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepri menghadapi kendala dalam memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri karena sempat terjadi perbedaan persepsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait sumber dana yang dikelola oleh PT SMI berasal dari Pemerintah Pusat atau tidak. Pihak Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa apabila



sumber dana bukan berasal dari Pemerintah Pusat, maka tidak diperlukan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tantangan yang kedua terjadi pada saat proses pelaksanaan paket strategis yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung *Workshop* BLK Karimun tahun anggaran 2022 di mana PT MIRA selaku penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atas ketentuan yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja/kontrak. Akibat wanprestasi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak melalui surat nomor 640/971/PUPP.4/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan realisasi pekerjaan sebesar 33,2% dan realisasi pembayaran sebesar Rp2.035.145.630,- pada tahun 2022 dan sejumlah Rp361.048.362,- pada tahun 2023.

Tantangan ketiga yang juga terjadi pada masa implementasi adalah terjadinya probabilitas defisit anggaran pada tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp80.000.000.000,- yang menimbulkan risiko gagal bayar menjadi lebih tinggi.

4. Identifikasi Strategi Implementasi

1. Dalam mengimplementasikan pembiayaan utang daerah, pihak DPPKAD menyiapkan berbagai strategi agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
2. Aktif melakukan rapat, konsultasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, PT SMI dan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi bahwa dana yang disalurkan melalui Pinjaman Pembiayaan PT SMI adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat sehingga diperlukan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu syarat Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Menteri Keuangan.
3. Memastikan dan menyiapkan seluruh berkas administratif dan data dukung terkait yang diperlukan sebagai syarat Pinjaman Daerah.
4. Sehubungan dengan salah satu kendala yaitu pihak ketiga yang wanprestasi dalam salah satu paket pekerjaan pembangunan, dilakukan perubahan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) Akta 18 Perjanjian Pembiayaan yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Maret 2023. Ketentuan tersebut mengubah jangka waktu Penarikan Fasilitas Pembiayaan (Availability Period) yang semula dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 menjadi bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.
5. Selain perubahan akta perjanjian, dilakukan juga upaya lain yaitu proses pengadaan kembali untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung *Workshop* BLK Karimun.
6. Dalam rangka menangani tantangan probabilitas defisit anggaran yang mengakibatkan risiko gagal bayar menjadi lebih besar, dilakukan penyesuaian dalam hal penganggaran dan memprioritaskan belanja wajib untuk penyelesaian Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah sesuai dengan kondisi riil dan melakukan koordinasi dengan pihak penyedia terkait jadwal pencairan yang telah mendekati batas definitif.
7. Telah dilakukan analisis upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber yang belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, salah satunya melalui investasi jangka pendek.



b. Analisis Kesiapan, Progres Implementasi, dan Tantangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Abadi Daerah

Sampai dengan pada saat penyusunan KFR ini dilaksanakan, belum terdapat Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kepri yang telah mengimplementasikan pengelolaan Dana Abadi Daerah. Suatu daerah dapat mengelola Dana Abadi Daerah apabila memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, SILPA daerah tinggi dan kinerja layanan yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Prov. Kepri termasuk ke dalam provinsi dengan kategori Kapasitas Fiskal yang rendah. Namun demikian, tiga Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri yaitu Kab. Natuna, Kab. Karimun dan Kota Batam termasuk ke dalam daerah dengan kategori kapasitas fiskal yang tinggi sehingga ketiga daerah tersebut dari segi kapasitas fiskal telah terpenuhi untuk dapat mengelola Dana Abadi Daerah. Sedangkan untuk Kab. Kepulauan Anambas dan Kab. Lingga tergolong ke dalam daerah dengan Kapasitas Fiskal yang sedang. Untuk Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan termasuk daerah dengan Kapasitas Fiskal yang rendah. Selanjutnya, dari sisi SILPA daerah, seluruh Pemerintah Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepri masih belum memiliki SILPA yang cukup tinggi untuk dapat mengelola Dana Abadi Daerah.

c. Analisis Kesiapan, Progres Implementasi, dan Tantangan Daerah dalam Pemanfaatan Sinergi Pendanaan Antara APBD dan Non APBD

Sampai dengan pada saat penyusunan KFR ini dilaksanakan, belum terdapat Pemerintah Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepri yang telah mengimplementasikan pemanfaatan sinergi pendanaan APBD maupun non APBD. Pemda lingkup wilayah Provinsi Kepri dapat mengoptimalkan sinergi pendanaan baik yang bersumber dari APBD seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemanfaatan dana Transfer ke Daerah dan Pembiayaan Utang Daerah, maupun melalui sinergi pendanaan non APBD seperti kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD dalam penyediaan infrastruktur, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Daerah, maupun harmonisasi antara Belanja Pemerintah Daerah dengan Belanja Kementerian/Lembaga.



BAB V



Gedung Gonggong
Kota Tanjungpinang

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI





Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

● Indikator Makro Ekonomi

1. Perekonomian Kepri triwulan III 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp82,10 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,36 triliun. Kemudian, sejalan dengan perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 4,94 persen (*yoy*), perekonomian Kepri juga tumbuh sebesar 4,88 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut cenderung melambat, seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian global tahun 2023 diproyeksikan melambat dari tahun 2022. Angka tersebut juga tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 6,03 persen (*yoy*).
2. Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan III 2023 lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Sumatera yakni sebesar 4,50 persen (*yoy*) dan PDRB Kepri berada pada urutan keempat dari struktur perekonomian Sumatera dengan *share* sebesar 5,08 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian terbaik Kepri sampai dengan triwulan III 2023 dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,47 persen (*ctc*) yang menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Regional Sumatera.
3. Berdasarkan pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Regional Kepri, yaitu Rp37.385,02 miliar (45,54 persen). PMTB juga mengalami pertumbuhan *year on year* sebesar 10,12 persen (*yoy*). Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di Kepri secara *year on year* di triwulan III 2023.
4. Berdasarkan lapangan usaha, terdapat 3 sektor yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian di Kepri, yaitu Industri Pengolahan Rp19.766,51 miliar (39,44 persen), Konstruksi Rp9.863,89 miliar (20,83 persen), dan Pertambangan dan Penggalan Rp5.701,74 miliar (11,64 persen).
5. Tekanan inflasi bulan September 2023 dari gabungan 2 kota di Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) tercatat sebesar 2,05 persen (*yoy*) dan 0,16 persen (*mtm*) dengan IHK sebesar 114,66 (*yoy*). Tekanan inflasi ini lebih rendah 6,79 persen (*yoy*) dan juga lebih rendah dibandingkan tingkat Inflasi Nasional sebesar 2,28 persen (*yoy*). Inflasi di Kepri bulan September 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas beras 0,18 persen, bensin 0,06 persen, Biaya Pulsa Ponsel 0,01 persen, Uang Kuliah Akademi 0,01 persen, dan Rokok Kretek Filter sebesar 0,01 persen.

6. Neraca perdagangan luar negeri Kepri pada bulan September tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US\$134,43 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan September sebesar US\$1.526,19 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan September sebesar US\$1.391,76 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 41,26 persen (yoy).
7. Angka kemiskinan di Kepri pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya. Secara *year on year*, Jumlah Penduduk Miskin di Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen poin, menurun ±9,18 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kepri.
8. TPT pada bulan Agustus 2023 mencapai angka 6,80 persen atau turun 1,43 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022 (yoy). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Agustus 2023 TPT lebih didominasi oleh Perempuan dengan nilai TPT 6,22 persen poin dan kemudian nilai TPT Laki-Laki sebesar 5,95 persen poin. Kepri menjadi Provinsi ke-2 dengan tingkat penurunan TPT tertinggi secara Nasional yang menunjukkan sinyal positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Kepri.
9. Tumbuhnya seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di Kepri, terutama PMTB yang tumbuh sebesar 10,12 persen (yoy) khususnya pada sektor industri pengolahan turut meningkatkan perluasan lapangan kerja baru. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kesanggupan pihak swasta akan tenaga kerja dan berkontribusi atas penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kepri.
10. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepri yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,388 Meningkat 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran melebar pada periode Maret 2023. Namun, bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Rasio Gini tercatat menurun sebesar 0,002 point (yoy).
11. NTP Kepri pada September 2023 sebesar 104,26 dan menunjukkan adanya pertumbuhan negatif sebesar 0,45 persen (yoy). Angka NTP Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional (113,46). hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian. Nilai tersebut telah melebihi target NTP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,91 persen.
12. NTN Kepri bulan September 2023 sebesar 109,22. Angka NTN tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,38 persen (yoy) dan berada di atas angka NTN Nasional (105,64). Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis Kepri yang merupakan Kepulauan dan memiliki keanekaragaman biota laut yang menjadi salah satu keunggulan daerah. Namun demikian, Capaian tersebut masih berada di bawah sasaran NTN pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 115,5.
13. Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi". Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka IPM Kepri pada tahun 2023 sebesar 79,08 atau tumbuh sebesar 0,76 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang



berhasil menjadi provinsi dengan tingkat IPM tertinggi ketiga Nasional dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

● Analisis Fiskal Regional

1. Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp8.072,72 miliar (75,72 persen dari Target) dengan pertumbuhan sebesar minus 6,66 persen (*yoy*). Namun bila mengesampingkan pajak yang diperoleh karenan kebijakan PPS pada tahun 2022, maka kinerja Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan yang positif. Pendapatan tersebut hanya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan sebesar 84,20 persen (Rp4.933 miliar) dan PNBPN sebesar 15,80 persen (Rp925 miliar).
2. Dari sisi Penerimaan Perpajakan, pos Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi (151,84 persen), kemudian diikuti oleh Cukai (120,77 persen) dan PPN (24,92 persen), sedangkan untuk pos lainnya mengalami pertumbuhan kontraktif yaitu PPh (minus 4,53 persen), bea masuk (minus 16,80 persen), PBB (minus 51,98 persen), dan bea keluar (minus 81,16 persen).
3. Dari sisi PNBPN, pos PNBPN Lainnya telah melampaui target dengan pertumbuhan sebesar 14,44 persen (*yoy*) dan Pendapatan BLU juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,89 persen (*yoy*).
4. Dari sisi sektoral, sektor penyumbang perpajakan terbesar berturut-turut adalah Industri Pengolahan sebesar 43,04 persen (Rp3.063,40 miliar), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,74 persen (Rp978,21 miliar), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,63 persen (Rp542,77 miliar).
5. *Tax ratio* Kepri s.d. triwulan III sebesar 3,22 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan *tax ratio* regional Sumatera sebesar 3,16 persen.
6. Belanja Negara dapat direalisasikan sebesar Rp10.958,03 miliar atau 66,63 persen dari Pagu, terbagi atas TKD dan BPP. Realisasi BPP sebesar Rp5.130,29 miliar (60,42 persen) disumbang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.508,69 miliar (71,15 persen), Belanja Barang sebesar Rp2.500,19 miliar (65,96 persen), Belanja Modal sebesar Rp1.000,59 miliar (42,96 persen), Bantuan Sosial sebesar Rp2,93 miliar (63,77 persen), dan Belanja Lainnya sebesar Rp117,89 miliar (2,30 persen). Adapun realisasi TKD sebesar Rp5.827,74 miliar (73,27 persen), disumbang oleh DBH sebesar Rp839,88 miliar (68,16 persen), DAU sebesar Rp3.420,65 miliar (76,44 persen), DAK sebesar Rp1.329,19 miliar (67,60 persen), DID sebesar Rp52,75 miliar (83,55 persen), dan Dana Desa sebesar Rp185,27 miliar (85,07 persen).
7. Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 16,19 persen (*yoy*) sejalan dengan pertumbuhan realisasi BPP sebesar 39,38 persen (*yoy*) dan TKD sebesar 1,34 persen (*yoy*). Seluruh pos BPP tumbuh positif (*yoy*), menunjukkan perbaikan kinerja penyerapan belanja APBN tingkat regional.
8. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp9.344,65 miliar atau 67,93 persen dari Pagu dan mengalami peningkatan 13,85 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Daerah



masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp6.208,02 miliar (66,43 persen) dibandingkan PAD sebesar Rp3.118,67 miliar (33,37 persen).

9. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD dengan realisasi sebesar Rp2,60 triliun, atau 75,96 persen dari Target. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp370,92 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp357,96 miliar, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp329 miliar.
10. Belanja Daerah Konsolidasi dapat direalisasikan sebesar Rp8.373,97 miliar atau 58,02 persen dari Pagu. Belanja Daerah tumbuh 14,42 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 7,55 persen, Belanja Modal sebesar 7,32 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 163,25 persen, dan Transfer sebesar 161,51 persen.

● Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Sektor konstruksi di Kepri memiliki pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023, dengan menjadi kontributor terbesar kedua, dan memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga (*yoy*). Berdasarkan ASI, realisasi pengadaan semen triwulan III 2023 meningkat 17,94 persen (*yoy*). Kondisi ini tidak terlepas dari banyaknya proyek pembangunan jalan di Kepri, dimana terdapat 5 kegiatan prioritas nasional dan 17 kegiatan prioritas BP Batam. Pembangunan jalan di Kepri dilaksanakan oleh Balai PJN, dengan Pagu terkait RO harmonis sebesar Rp1.076,91 miliar. Dukungan fiskal terlihat memberikan dorongan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi di Kepri, salah satunya melalui proyek pembangunan jalan.
2. Wilayah Kepulauan Riau memiliki pagu terbesar dalam RO Harmonis, dengan Pagu sebesar Rp1.044,33 miliar pada subbidang jalan. Namun Pagu yang besar tersebut belum dapat direalisasikan dengan optimal, yaitu sebesar Rp284,96 miliar (27,29 persen dari Pagu). Beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III 2023, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, dan pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.
3. Kementerian PUPR memiliki Pagu terbesar, yaitu Rp1.107,03 miliar (95,85 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Namun realisasi yang dicapai masih terbilang kecil, yaitu sebesar Rp304,44 miliar (27,50 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya DIPA yang baru terbit pada semester II dan triwulan III, penyedia PBJ yang terbatas, paket pekerjaan yang baru dilaksanakan pada bulan November, pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit dijangkau, kontrak yang baru ditandatangani pada bulan Oktober, serta cuaca ekstrim di musim penghujan.
4. Kementerian Pertanian memiliki persentase realisasi terkecil, dengan Pagu sebesar Rp3,02 miliar (0,26 persen dari total Pagu), realisasi anggaran sebesar Rp0,68 miliar (22,44 persen dari Pagu). Kendala yang teridentifikasi, yaitu realisasi output tidak dapat mencapai target, penolakan vaksin hewan dari Dinas terkait di beberapa daerah, terdapatnya perubahan regulasi, kesulitan mencari penyedia, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan, dan terbatasnya jumlah SDM.



5. Kemendikbud Ristek memiliki Pagu sebesar Rp32,90 miliar (2,85 persen dari Pagu), yang telah direalisasikan sebesar Rp14,90 miliar (44,83 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat blokir anggaran, revisi anggaran, pengesahan DIPA bulan Oktober, permasalahan dengan pihak ketiga, lokasi kegiatan di daerah terluar, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, menunggu juknis lebih lanjut, adanya pergantian bendahara, mutasi dan promosi pejabat PPK, ketersediaan SDM yang kurang.
6. Kementerian Kesehatan dengan pagu sebesar Rp4,95 miliar (0,43 persen dari total Pagu), telah direalisasikan Rp2,59 miliar (52,32 persen dari Pagu). Beberapa kendala yang ditemui, yaitu perubahan jadwal kegiatan sebagai akibat dari adanya revisi POK, terdapat kesalahan input capaian output, dan terbatasnya jumlah SDM.
7. Pagu Belanja terkait RO Harmonis yang terdapat pada BKKBN adalah sebesar Rp6,77 miliar, telah direalisasikan Rp5,31 miliar (78,43 persen dari Pagu). Salah satu kegiatan RO Harmonis adalah kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang direncanakan akan dilaksanakan minggu keempat November. Kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional, pelaksanaan di akhir tahun dinilai akan kurang memberikan dampak terhadap penurunan *stunting*. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada di akhir tahun lebih berisiko gagal dilaksanakan, misalnya adanya kebijakan pemotongan anggaran.

● Analisis Tematik

1. Pendapatan Daerah menunjukkan tren peningkatan dari setiap tahun walaupun sempat terjadi pelemahan di tahun 2020 seiring dengan penurunan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Belanja Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dengan penurunan jumlah di tahun 2020 dan 2021 serta realisasinya masih rendah. SILPA menunjukkan tren peningkatan meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2020.
2. PDRB ADHK 2010 untuk seluruh wilayah Provinsi Kepri bergerak tumbuh positif kecuali Kab. Natuna dan Kepulauan Anambas yang belum dapat kembali pada kondisi pra *COVID-19*. Pertumbuhan ekonomi juga telah bertumbuh positif dan kembali ke kinerja pra *COVID-19*. Terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2018-2023 dengan pengurangan jumlah penduduk terbesar pada Kota Batam.
3. Dana Transfer ke Daerah Pemda wilayah Prov. Kepri memiliki tren yang fluktuatif, namun hampir seluruh kabupaten dan kota mengalami peningkatan dana transfer pada tahun 2019 kecuali Kab. Karimun. Terjadi peningkatan dana transfer yang cukup signifikan bagi Kab. Natuna dan Kepulauan Anambas pada tahun 2019.
4. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, hampir seluruh kabupaten dan kota lingkup Prov. Kepri memiliki tingkat ketimpangan fiskal yang tinggi kecuali Kota Batam.
5. Terdapat hubungan yang negatif antara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 dan CVI 2. Semakin besar realisasi DBH, DAU dan DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal vertikal CVI 1 dan CVI 2.



6. Semakin tinggi persentase DBH/DAU/DAK dibagi Pendapatan, maka tingkat ketimpangan fiskal vertikal akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, seiring dengan besarnya jumlah DBH /DAU/DAK yang diterima Pemerintah Daerah, harus diimbangi dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketimpangan fiskal vertikal tidak semakin tinggi.
7. Terdapat hubungan yang negatif antara realisasi DAU/DAK dan indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*. Maka dari itu, semakin besar realisasi DAU/DAK, maka semakin kecil indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin kecil.
8. Terdapat hubungan positif yang relatif kecil antara besar realisasi DBH dan indeks ketimpangan fiskal horizontal Entropi Theil. Dengan demikian, semakin besar realisasi DBH, maka semakin besar indeks ketimpangan fiskal horizontal *Entropi Theil*, yang berarti bahwa kesenjangan fiskal antardaerah semakin besar.
9. Pemerintah Prov. Kepri adalah satu-satunya Pemda lingkup Prov. Kepri yang telah melakukan Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di antaranya pembangunan *fly over* dan jalan lingkar pesisir. Belum terdapat Pemda di wilayah Prov. Kepri yang telah mengimplementasikan Dana Abadi Daerah dan sinergi pendanaan non APBD.

5.2 Rekomendasi

● Kepada Pemerintah Pusat

1. Realisasi Belanja Pusat khususnya Belanja Modal masih sangat rendah, diharapkan seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk menyusun strategi agar dapat mengantisipasi gagal kontrak dan keterlambatan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal;
2. Terhadap RO harmonis, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Kementerian PUPR memberikan penambahan pagu anggaran belanja barang pada satker Balai PJN di triwulan III 2023. Hal ini menyulitkan Balai PJN untuk melakukan eksekusi kegiatan atas penambahan Pagu tersebut. Kementerian PUPR perlu melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran, mengingat kondisi geografis Kepri merupakan wilayah kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada daerah terluar menjadi sulit dilaksanakan. Kementerian PUPR perlu melakukan penyesuaian terhadap pemberian anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun dengan kondisi-kondisi tersebut.
 - b. Balai PJN Kepri yang mendapat tambahan anggaran di triwulan III 2023 perlu melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline pekerjaan. Kedepannya perlu melakukan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah kepulauan, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpinang. Terkait permasalahan keterbatasan ketersediaan SDM, Balai PJN perlu mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi atau alat yang lebih efisien, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif.



- c. Beberapa anggaran belum dapat direalisasikan karena terdapat 1) blokir anggaran dan 2) belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Blokir anggaran terjadi pada satker BGP dan BPMP Kepri. Satker tersebut perlu mempercepat penyelesaian blokir anggaran dengan proaktif berkoordinasi ke tingkat wilayah hingga Eselon I, dan KPPN. Terkait kegiatan yang menunggu petunjuk teknis, satker dapat melakukan persiapan pada aspek-aspek tertentu yang dapat dilakukan tanpa petunjuk teknis.
 - d. Perwakilan BKKBN Kepri merencanakan kegiatan percepatan penurunan stunting pada minggu ke-4 Bulan November yang berakibat realisasi anggaran dan dampak (*outcome*) kegiatan tersebut menjadi terlambat. Kegiatan tersebut penting untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, agar *output* dan *outcome* atas kegiatan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebaiknya kegiatan tersebut direncanakan ke dalam kegiatan prioritas untuk dilaksanakan di awal tahun anggaran.
3. UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemda untuk melakukan perluasan skema pembiayaan daerah melalui pembiayaan utang daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan sinergi pendanaan APBD dan non APBD. Namun demikian, peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU HKPD untuk pelaksanaan perluasan skema pembiayaan daerah, belum ditetapkan. Pemerintah pusat perlu melakukan percepatan penetapan PP tersebut agar pemda dapat melaksanakan perluasan skema pembiayaan daerah.
 4. Untuk mengatasi ketimpangan vertikal di daerah, pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah, melalui analisis kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

● Kepada Pemerintah Daerah

1. Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
2. Dalam menurunkan TPT di Kepri, Pemda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun SMK dan Politeknik dengan jurusan/bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan industri di Kepri, karena saat ini belum ada sekolah/politeknik yang dapat memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri di Kepri. Pemda juga dapat memetakan kebutuhan SDM pada industri unggulan Kepri dan bekerja sama dengan melaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK), serta berkoordinasi dengan universitas/politeknik di daerah untuk menyediakan kurikulum dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM di lingkup Kepri.
3. Realisasi TKD masih sangat rendah khususnya DAK Fisik sebesar 51,80 persen dan DBH sebesar 68,16 persen, sehingga diharapkan peran pemerintah daerah untuk melengkapi syarat-syarat atau dokumen penyaluran dan mempercepat penyerapan TKD;



4. Pemda perlu memetakan, mengevaluasi, dan melakukan upaya percepatan pengumpulan pendapatan terhadap jenis Pendapatan dengan realisasi yang belum mencapai 75 persen dari Target dan Pendapatan dengan pertumbuhan negatif dibandingkan realisasi *yoy*.
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar minus 2,96 persen. Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong dan mengevaluasi kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
6. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.
7. Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.
8. Dinas Kesehatan Kepri sebagai satker dekonsentrasi perlu memperbaiki proses penganggaran, serta membangun koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan, sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran. Peningkatan kapasitas SDM juga dapat menjadi solusi, dengan memberikan pelatihan terkait proses penganggaran yang tepat dan optimal. Pelatihan lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efisien dan mengatasi masalah ketersediaan SDM.
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri sebagai satker dekonsentrasi perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan pemberian vaksin hewan dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya vaksin bagi hewan ternak. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi bagaimana proses sertifikasi benih pada dapat berjalan dengan lebih efisien, melalui penyiapan benih padi yang unggul, persiapan dokumen sertifikasi, mengikuti alur dan prosedur yang tepat dan bekerjasama dengan pihak sertifikasi Kementerian Pertanian, sehingga alur sertifikasi benih padi dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mengatasi keterbatasan SDM
10. Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PAD untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal vertikal tersebut, yaitu:
 - a. Dengan cara meningkatkan basis data perpajakan daerah, ekstensifikasi pajak, mengembangkan aplikasi dan sistem yang mendukung kemudahan pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah
 - b. Pemda dapat melakukan *mapping* potensi investasi dan pengembangan sektor perekonomian potensial daerah serta membentuk tim *taskforce* peningkatan PAD lintas sektor untuk dapat meningkatkan PAD
11. Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PDRB per kapita untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal horizontal, yaitu Pemda melakukan analisis sektor ekonomi dan investasi potensial untuk pengembangan daerah dan peningkatan lapangan pekerjaan.



12. Pemda dapat mulai melakukan opsi pembiayaan seperti pinjaman daerah, serta penerbitan sukuk dan obligasi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal serta memastikan kemampuan daerah untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan kemampuan untuk membayar investor bagi sukuk dan obligasi daerah.
13. Pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial daerah dan wilayah yang dapat dikembangkan. Contohnya, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Natuna terdapat potensi pariwisata, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan *master plan* untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar wilayah potensi pariwisata untuk dapat dibiayai dengan sinergi beberapa alternatif pendanaan, misalnya pembiayaan proyek tersebut dibagi pembiayaannya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Belanja Kementerian/Lembaga serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta. Pemda dapat berupaya juga untuk meningkatkan potensi investasi di daerah.

● Kepada Pusat dan Daerah

1. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.
2. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalkan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di Kepri.
3. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berada di Kepri.

● Kepada Kanwil DJPb Prov Kepri

1. Pada tahun 2023, terdapat tiga BLU baru di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.
2. Kanwil DJPb Kepri dapat secara berkala melakukan FGD Raperda PDRD dengan mengundang unit eselon 1 Kementerian Keuangan lain dan Bapenda seluruh kabupaten



kota dan provinsi untuk saling bertukar informasi dan memperoleh *progress* penyusunan serta kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Forum tersebut diharapkan akan memacu seluruh pemda untuk dapat mengakselerasi penyelesaian Raperda PDRD yang selaras dengan UU HKPD dan kebijakan fiskal nasional.

3. Kantor Wilayah DJPb Kepri hendaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah, progres kontrak atau proyek yang dibiayai dengan Dana Transfer, capaian output atas penggunaan Dana Transfer serta mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah.
4. Kantor Wilayah DJPb Kepri dapat melakukan sosialisasi kepada pimpinan daerah, Pemda, serta *stakeholder* lain terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan senantiasa mendorong Pemda untuk melakukan sinergi pendanaan kreatif yang *sustain*.
5. KPPN Tanjungpinang perlu melakukan pengawalan anggaran mulai dari proses perencanaan DIPA, terbitnya DIPA dan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja Balai PJN yang terbit pada semester II. Kemudian memastikan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline kegiatan.
6. KPPN Tanjung pinang juga perlu senantiasa mengingatkan satuan kerja BGP dan BPMP agar segera menyelesaikan blokir anggaran, dengan mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif berkoordinasi hingga ke unit eselon I.
7. KPPN Batam perlu memberikan arahan kepada satuan kerja Perwakilan BKKBN Kepri agar dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan *output* dan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

-----, 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan.

-----, 2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan dan Buku

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2022. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2023. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan III 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

-----, 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

-----, 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

-----, 2018. *Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2018*. Tanjungpinang: Badan

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2019. *Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2019*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2020. *Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2020*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2021. *Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2021*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2022. *Tinjauan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2022*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2023. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia September 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau September 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah September 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2023. *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Kepulauan Riau September 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2023*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- , 2022. *Laporan Inflasi IHK Bulan September 2023*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Jurnal

- Bird dan Tarasov. *Closing the Gap: Fipl Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations*. International Working Paper Vol. 2 (2) 2002.
- Solikin, Akhmad. 2023. *Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis*. Jurnal Info Artha Vol.2, No.1, (2018), Hal.65-89
- Suyanto. *Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom*. Develop: Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan Vol. I (1) 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Berita

Aldy, 2023. *Inflasi Kepri September 2023 Terkendali dan Terendah Secara Tahun Kalender se-Sumatera*. Kepri: Batam Pos. Diakses pada 26 November 2023 pada tautan:

<https://m.batamtoday.com/berita-195733-Inflasi-Kepri-September-2023-Terkendali-dan-Terendah-Secara-Tahun-Kalender-se-Sumatera.html>

Perdana. A.P. 2023. *Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura*. Jakarta: Kompas ID. Diakses pada 28 November 2023 pada tautan:

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/09/08/rencana-ekspor-listrik-ke-singapura-coba-dibuat-konkret>

Rachman, Arrijal. 2023. *Tak Hanya Pabrik Kaca, Xinyi Mau Investasi Besar di Rempang*. Jakarta: CNBC Indonesia. Diakses pada 28 November 2023 melalui:

<https://www.cnbcindonesia.com/specialreport/news/20231114/Road-to-CNBC-Indonesia-Awards-2023,-Best-Insurance/index.php>



DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (C to C) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya

DAFTAR ISTILAH

dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadialah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect adalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Indeks Williamson merupakan instrumen pengukuran dalam pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi untuk mengukur kesenjangan yang ada pada pembangunan pada suatu wilayah.

Indeks Entropi Theil merupakan instrumen pengukuran untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan memberikan gambaran lebih rinci mengenai ketimpangan sosial.

DAFTAR ISTILAH

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month on Month (MoM) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022).

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPH)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

DAFTAR ISTILAH

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi - Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

DAFTAR ISTILAH

Quarter to Quarter (qtq) mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesius untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau

DAFTAR ISTILAH

sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dan tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam bekerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

Year on Year (YoY) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).



LAMPIRAN

- Lampiran I Tabel Investasi Kepri Triwulan III Tahun 2022 dan 2023
Tabel Perkembangan Neraca s.d. 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023
- Lampiran II Tabel Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Jalan
- Lampiran III Tabel Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Lampiran IV Tabel Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Lampiran V Tabel Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Pendidikan
- Lampiran VI Tabel Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Pertanian

Lampiran 1.1 - Tabel Investasi Kepri Triwulan III Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

PMDN		2022		2023		Growth
		Triwulan III		Triwulan III		
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	
Sektor Primer	Kehutanan	3	55,60	13	58,80	5,76%
	Perikanan	15	10.437,30	75	13.138,40	25,88%
	Pertambangan	97	38.403,80	447	394.524,70	927,31%
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	39	11.178,70	66	16.591,80	48,42%
	Total (Sektor)	154	60.075,40	601	424.313,70	606,30%
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	22	96.716,60	61	285.634,80	195,33%
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2	0,00	1	0,00	
	Industri Karet dan Plastik	13	29.586,80	45	19.223,40	-35,03%
	Industri Kayu	6	0,00	2	0,00	
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	47	65.722,80	133	267.145,60	306,47%
	Industri Kertas dan Percetakan	15	32.550,00	56	2.122,40	-93,48%
	Industri Kimia Dan Farmasi	15	15.775,10	39	110.896,00	602,98%
	Industri Lainnya	48	3.833,00	135	18.487,60	382,33%
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	71	8.215,20	125	47.514,20	478,37%
	Industri Makanan	36	6.847,40	128	37.687,60	450,39%
	Industri Mineral Non Logam	20	6.444,70	41	67.853,00	952,85%
	Industri Tekstil	11	5,00	10	0,00	-100,00%
	Total (Sektor)	306	265.696,60	776	856.564,60	222,38%
	Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	198	332.340,70	440	776.656,30
Jasa Lainnya		193	44.313,90	734	487.649,70	1000,44%
Konstruksi		242	38.353,50	1.498	464.234,30	1110,41%
Listrik, Gas dan Air		33	32.708,60	166	1.212.059,80	3605,63%
Perdagangan dan Reparasi		1.036	187.676,10	2.493	425.220,20	126,57%
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		92	383.715,40	485	1.237.063,70	222,39%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		175	176.042,30	710	848.568,10	382,03%
Total (Sektor)		1.969	1.195.150,50	6.526	5.451.452,10	356,13%
Total (Sektor Utama)		2.429	1.520.922,50	7.903	6.732.330,40	342,65%

Sumber: NSWI BKPM, 2023 (diolah)

Lampiran 1.2 - Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Jalan

No	Penganggaran	PBJ	Eksekusi Kegiatan	Regulasi	SDM
1	DIPA untuk Dukungan Penanganan Jalan Daerah baru terbit pada semester II (Batch I - 11 Paket), dan akhir triwulan III (5 Paket Batch II) sehingga memiliki waktu yang sempit untuk proses pengerjaannya.	Penyedia pada paket IJD di beberapa wilayah sangat terbatas, misalnya di wilayah Serasan, Natuna, sehingga memerlukan waktu lebih untuk pemakaian alat dan mobilisasi alat pendukung pekerjaan fisik.	Pelaksanaan kegiatan pada IJD ini dilaksanakan pada daerah terluar di Kepri, sehingga memerlukan persiapan dan penanganan terkait dengan lokasi dan cuaca yang tidak bisa diprediksi pada pulau terluar.	-	Paket pekerjaan untuk 11 Paket IJD dilaksanakan pada triwulan III dan IV, di saat SDM pada satuan kerja juga melaksanakan pekerjaan yang sedari awal sudah dilaksanakan. Kondisi ini memerlukan pembagian SDM yang baik pada satuan kerja.
2	Terdapat 5 paket pekerjaan yang bersumber dari SBSN yang memiliki waktu penyelesaian yang bisa diluncurkan pada tahun 2024.;	Terdapat paket pekerjaan Peninting Payalaman baru dilaksanakan pada November	Faktor pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Penanganan Jalan Pulau Serasan, Kab. Natuna tidak selesai dikarenakan keterbatasan alat pada wilayah terluar. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, akan menggunakan mekanisme RPATA.	-	-
3	-	Pelaksanaan kegiatan untuk 3 paket terdapat di Natuna yang memiliki keterbatasan penyedia.	Pelaksanaan kegiatan di pulau terluar untuk penanganan jembatan Buton - Klarik dan Sekunyam - Cemaga di Kab Natuna yang mempersulit mobilitas orang dan barang.	-	-
4	-	Kontrak untuk kegiatan Pelebaran Menuju Standar Ruas Jalan Sialang- Sp. Pengundang KM.46 baru ditandatangani pada bulan Oktober sehingga akan selesai di akhir Desember 2023.	Kegiatan Pelebaran Menuju Standar Ruas Jalan Sialang- Sp. Pengundang KM.46 dilaksanakan pada triwulan IV sehingga terkendala cuaca yang masuk musim penghujan.	-	-
5	-	-	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di pulau terluar dan pada	-	-

			cuaca yang tidak bisa diprediksi.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

Lampiran 1.3 - Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Kesehatan dan KB

No	Penganggaran	PBJ	Eksekusi Kegiatan	Regulasi	SDM
1	(Lainnya) Timeline kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu IV Nov 2023.	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	(Lainnya) Timeline kegiatan. Honor Satgas Stunting BKKBN (OB)-- Realisasi Caput akan 100% di bulan Nov, Proyeksi realisasi anggaran > 97%.	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	Penyesuaian alokasi anggaran dengan kurikulum modul memerlukan adanya revisi POK pada kegiatan. Namun karena adanya kesepakatan internal yang mensyaratkan revisi POK dibatasi maksimal 1 kali per triwulan (karena adanya kekhawatiran mempengaruhi IKPA), maka mengakibatkan perubahan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang semula direncanakan (terdapat penyesuaian kembali terkait jadwal pelaksanaan kegiatan)	-	-	-	1) terbatasnya jumlah mentor dan fasilitator yang akan menjadi pelatih pada kegiatan ini 2) perlu waktu untuk menyusun waktu pelaksanaan menyesuaikan kembali dengan jadwal mentor dan fasilitator (dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak) karena waktu pelatihan cukup panjang sementara SDM pelatih juga merupakan tenaga yang bekerja dibagian pelayanan

Lampiran 1.4 - Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Pendidikan

No	Penganggaran	PBJ	Eksekusi Kegiatan	Regulasi	SDM
1	Terdapat blokir terhadap program guru penggerak untuk daerah khusus	-	Lokasi yang ekstrim, terluar dan terdepan sehingga perlu menyesuaikan jadwal kapal sebagai transportasi peserta	-	terganti pergantian bendahara di bulan Juli dikarenakan daya serap sangat rendah, 15 persen
2	-	-	-	-	-
3	Pada RO ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.350.940.000 dan sudah dialihkan ke BABUN sebesar Rp1.305.690.000 dengan pengesahan DIPA tanggal 10 Oktober 2023 sehingga menyisakan PAGU Rp6.835.125.000 dengan blokir Rp45.250.000	Permasalahan internal pihak ketiga sudah menghambat kinerja BPMP Provinsi Kepri (persoalan administrasi dan kurang kooperatifnya pihak ketiga dalam mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN)	Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari 4 tahap, yaitu TOT, Bimtek, Pendampingan, dan Refleksi yang keseluruhan tahapan harus menunggu pedoman/juknis dari eselon I. Sampai saat ini sudah dilaksanakan hingga tahap Bimtek, dan pada tanggal 4 November 2023 baru selesai pembekalan tim BPMP untuk pelaksanaan pendampingan. Untuk kegiatan refleksi masih belum ada juknis lebih lanjut.	-	1) PPK lama mendapat mutasi promosi ke BPMP Provinsi Papua, dan memerlukan waktu untuk pergantian PPK ini 2) Ketersediaan SDM di BPMP Provinsi Kepri masih dirasa kurang.
4	Terdapat dua kali revisi anggaran yang dilakukan oleh Ditjen GTK	-	Program Sekolah Penggerak melibatkan banyak stake holder sehingga perlu menunggu juknis dari GTK		BGP Kepri hanya memiliki 10 PNS dan 12 PPNPN sementara pekerjaan sangat banyak
5	Pada RO ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp143.411.000 dan seluruhnya sudah dialihkan ke BABUN dengan pengesahan DIPA tanggal 10 Oktober 2023 sehingga menyisakan PAGU Rp693.469.000	-	-		1) PPK lama mendapat mutasi promosi ke BPMP Provinsi Papua, dan memerlukan waktu untuk pergantian PPK ini 2) Ketersediaan SDM di BPMP Provinsi Kepri masih dirasa kurang.

Lampiran 1.5 - Jawaban Kuisisioner Kendala dalam Pelaksanaan RO Harmonis - Pertanian

No	Penganggaran	PBJ	Eksekusi Kegiatan	Regulasi	SDM
1	Dalam penyusunan RKAKL tahun 2023, Kementerian Pertanian menargetkan pemberian vaksin kepada hewan sapi dan kerbau di Kepri sebanyak 39.910 dosis. Namun demikian berdasarkan kondisi di lapangan, satuan kerja hanya sanggup menargetkan realisasi vaksin sebanyak 6.580 dosis sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.	-	1. Terdapat penolakan pemberian vaksin kepada hewan ternak dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi geografis kepulauan di Kepri menyulitkan mobilisasi petugas vaksin,	-	Satuan kerja pelaksana kegiatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK terkendala oleh keterbatasan SDM. Pegawai yang menangani bidang kesehatan dan keluarga berencana hewan di satuan kerja hanya berjumlah 3 orang.
2	-	-	1. Pembangunan tidak dapat dilakukan. Karena area yang selama ini dimanfaatkan merupakan area hutan lindung, sehingga lahan tersebut tidak dapat dihibahkan untuk pembangunan tempat penyimpanan gabah. 2. Penyaluran benih padi kepada kelompok tani, Proses penyaluran benih padi membutuhkan proses yang relatif panjang.	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

5	-	Belum terdapat banyak pilihan penyedia barang jasa yang memproduksi pestisida nabati/hayati.	Atas pengaturan ini, proses pengadaan di Kepri masih terkendala karena belum terdapat banyak pilihan penyedia barang jasa yang memproduksi pestisida nabati/hayati.	Karena adanya pengaturan/regulasi dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yang mewajibkan bahwa bantuan pestisida kepada petani harus bersifat nabati atau hayati (tidak mengandung banyak bahan kimia).	Keterbatasan SDM di satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi/pengajuan permintaan pembayaran, sehingga terdapat kelambatan atas proses pertanggungjawaban anggaran belanja.
---	---	--	---	---	---

